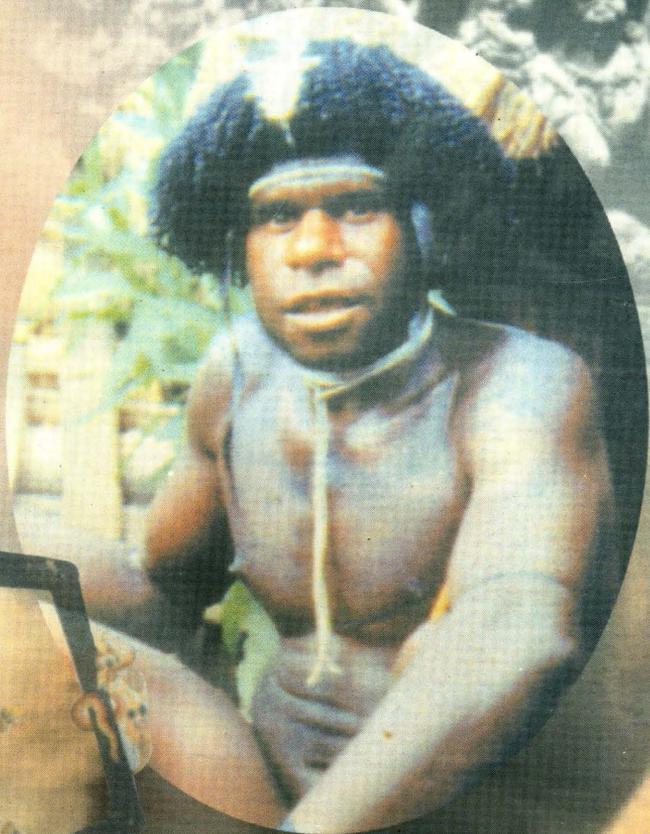
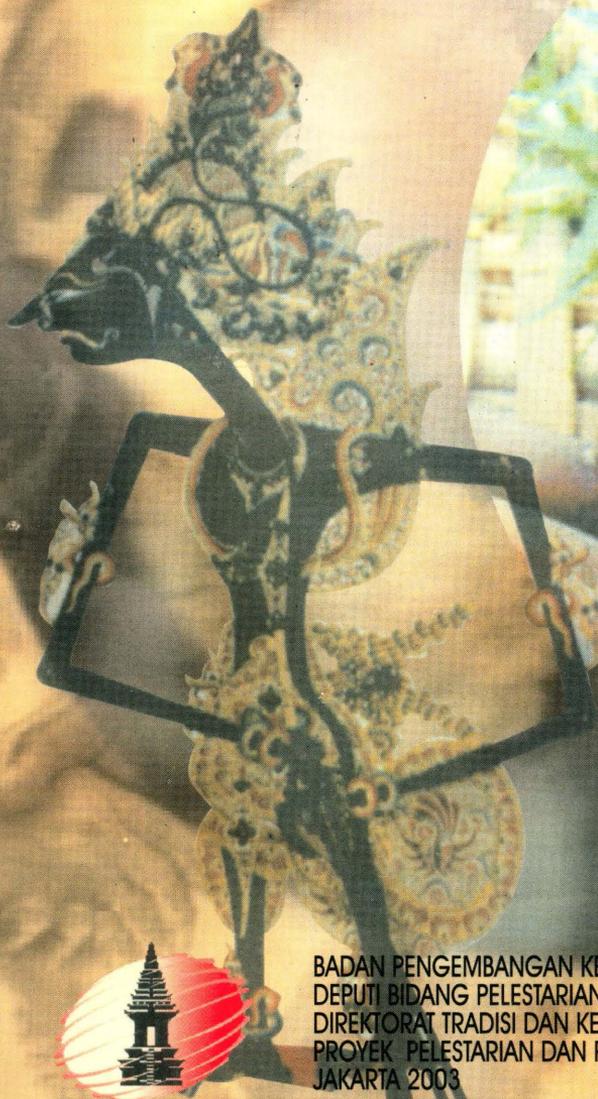


# Integrasi dan Disintegrasi

DALAM PERSPEKTIF BUDAYA



BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA  
DIREKTORAT TRADISI DAN KEPERCAYAAN  
PROYEK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI DAN KEPERCAYAAN  
JAKARTA 2003

# **Integrasi Dan Disintegrasi**

---

## **DALAM PERSPEKTIF BUDAYA**

BADAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA  
DIREKTORAT TRADISI DAN KEPERCAYAAN  
PROYEK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI DAN KEPERCAYAAN  
JAKARTA 2003

# INTEGRASI DAN DISINTEGRASI

## *Dalam Perspektif Budaya*

---

Penyusun : Drs. Suminar, MA  
H. Zalili Sailan  
Laode Abubakar  
Drs. Timoteus Nusan  
Prof. H. KMA. M. Usop, MA  
Basir Mantikiei R. Hanyi, SAg.  
Dr. H. Ataupah, MA  
Prof. Dr. Mursal Esten  
Dr. H. Abdurrahman SH, MH  
Drs. Hariyadi, M. Hum  
Prof. Dr. M. Huliselan  
Adi Suryadi Sofian  
John Bamba  
Syarif Ibrahim Alqadrie

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata  
Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya  
Direktorat Tradisi dan Kepercayaan  
Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan  
Kepercayaan  
Jakarta 2003

Cetakan Pertama Tahun Anggaran 2003

J A K A R T A

Dicetak oleh : **BUPARA Nugraha - Jakarta**

## **SAMBUTAN**

### **KEPALA DIREKTORAT TRADISI DAN KEPERCAYAAN**

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan pada tahun anggaran 2003 melakukan penerbitan dan pendistribusian edisi tentang Integrasi dan Disintegrasi Dalam Perspektif Budaya. Sumber utama pengemasan buku tersebut adalah dari makalah-makalah pilihan kegiatan Temu Budaya yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional di sepuluh wilayah regional tahun 2003.

Tujuan penerbitan dan pendistribusian ini, menghimpun bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa, dan untuk ditawarkan menjadi materi pada kegiatan Dialog Budaya yang dilaksanakan di tempat wilayah. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yaitu Yogyakarta, Padang, Pontianak, dan Manado.

Dengan diterbitkan buku ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan/wawasan masyarakat terhadap berbagai permasalahan kebudayaan di Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan kepada tim penulis, semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya buku ini, diucapkan terimakasih.

Jakarta, Maret 2003  
Kepala,



**Dr. Abdurrahman**

## KATA PENGANTAR

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan pada tahun anggaran 2003 melakukan penerbitan dan pendistribusian edisi tentang Integrasi dan Disintegrasi Dalam Perspektif Budaya. Sumber utama pengemasan buku tersebut adalah dari makalah-makalah pilihan kegiatan Temu Budaya yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional di sepuluh wilayah regional tahun 2003.

Tujuan penerbitan dan pendistribusian ini, menghimpun bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan bangsa, dan untuk ditawarkan menjadi materi pada kegiatan Dialog Budaya yang dilaksanakan di tempat wilayah. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yaitu Yogyakarta, Padang, Pontianak, dan Manado.

Dengan diterbitkan buku ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan/wawasan masyarakat terhadap berbagai permasalahan kebudayaan di Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan kepada tim penulis, semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya buku ini, diucapkan terimakasih.

Jakarta, Maret 2003  
Proyek Pelestarian dan Pengembangan  
Tradisi dan Kepercayaan,



**Drs. Mula Sinaga**  
NIP. 131791271

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN KEPALA DIREKTORAT TRADISI DAN KEPERCAYAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>INTEGRASI DAN DISINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL</b> Oleh : Drs. Suminar, MA .....	<b>1</b>
<b>PLURALISME DALAM KEBUDAYAAN DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL BANGSA INDONESIA</b> Oleh : H. Zalili Sailan .....	<b>12</b>
<b>IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA</b> Oleh : Laode Abubakar .....	<b>31</b>
<b>“IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA”</b> Oleh : Drs. Timoteus Nusan .....	<b>53</b>
<b>JATIDIRI ETNIK/DAERAH DALAM BINGKAI JATIDIRI NASIONAL</b> Oleh : Prof. H. KMA. M. Usop, MA .....	<b>62</b>
<b>“IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA” DAERAH NGAJU KALIMANTAN TENGAH</b> Oleh : Basir Mantikiei R. Hanyi, Sag. ....	<b>69</b>

**STRATEGI REVITALISASI KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM  
PAYUNG KONSEP BHINNEKA**

Oleh : Dr. H. Ataupah, MA ..... 84

**MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA (MINANGKABAU) DI  
ERA GLOBALISASI DAN OTONOMI DAERAH (POKOK-  
POKOK PIKIRAN)**

Oleh : Prof. Dr. Mursal Esten ..... 91

**INTEGRASI NASIONAL : ANTARA KEBUDAYAAN NASIONAL  
DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Oleh : Dr. H. Abdurrahman SH, MH ..... 95

**MASALAH KONFLIK ANTAR SUKU DAN AGAMA DALAM  
KONTEKS MENYIAPKAN FIGUR PEMIMPIN YANG  
KHARISMATIK ARIF DAN BIJAKSANA**

Oleh : Drs. Hariyadi, M. Hum ..... 102

**KRISIS KEBUDAYAAN, KONFLIK DAN KEKERASAN**

Oleh : Prof. Dr. M. Huliselan ..... 116

**KULTUR, DISINTEGRASI DAN INTEGRASI SOSIAL**

Oleh : Adi Suryadi Sofian ..... 128

**KONFLIK DAN KEKERASAN AKAR KOLONIAL DAN POST-  
KOLONIAL**

Oleh : John Bamba ..... 134

**POLA PERTIKAIAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT DAN  
FAKTOR SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK  
YANG MEMPENGARUHINYA**

Oleh : Syarif Ibrahim Alqadrie ..... 155

# INTEGRASI DAN DISINTEGRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Drs. Panji Suminar, MA

## A. Pendahuluan

Dinamika dan perkembangan tata kemasyarakatan cenderung meningkat dengan arah yang tidak dapat terduga. Dalam tataran global, tata dunia baru dibentuk dengan berbasiskan pada penghilangan hambatan-hambatan struktural sehingga dunia dipandang seolah “tanpa batas”. Kondisi ini pada gilirannya menampilkan impaknya pada dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat yang dalam tataran tertentu “relatif “ sulit untuk dikendalikan.

Kondisi global yang dihadapi ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tata kehidupan pada tingkat nasional. Anggapan umum seringkali mengemuka bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai kehilangan identitas diri. Dengan kata lain, masyarakat dihadapkan pada “dilema budaya” dimana satu sisi pola kebudayaan yang ada masih tetap melekat dalam tata kehidupan bermasyarakat, sementara di lain pihak masyarakat dihadapkan pada semakin deras arus budaya luar. Krisis multi-dimensi yang hampir tiga tahun terakhir ini sebenarnya salah satu bentuk dari krisis budaya sebagai dampak dari perubahan tata guna global. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa krisis multi-dimensi tersebut mengindikasikan begitu rapuhnya pondasi budaya masyarakat dalam menahan laju arus budaya luar.

Pada tingkat lokal, masyarakat Bengkulu sebagai bagian integral dari tata kemasyarakatan global dan nasional, cepat atau lambat akan terkena imbas dari perubahan yang tengah dan akan terjadi. Kasus multi-dimensi dan hilangnya identitas daerah mungkin saja terjadi apabila tidak diantisipasi

melalui penguatan (*empowering*) tata kemasyarakatan lokal. Kekayaan khasanah budaya lokal berbasiskan pada heterogenitas etnis sebaiknya dikelola dengan dinamis sehingga mampu membentuk sebuah tata kemasyarakatan yang adaptif, dinamis dan aspiratif.

## **B. Konsepsi Integrasi dan Desintegrasi Sosial**

Berdasarkan pada etnisitas, propinsi Bengkulu termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki keragaman etnis. Beberapa etnis seperti Rejang, Serawai, Lembak, Pekal, Muko-Muko, Melayu Bengkulu, Enggano, Pasemah, dan etnis lain termasuk pendatang merupakan potensi yang cukup kaya. Namun demikian, potensi tersebut tidak akan pernah mampu membangun sebuah tata kemasyarakatan yang dinamis dan integratif apabila tidak dikelola dengan baik. Cerminan dari berbagai daerah lain di Indonesia mengindikasikan bahwa keragaman etnis yang ada dalam sebuah wilayah dapat menjadi sebuah disintegrasi sosial yang mengarah pada konflik.

Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri dari dua fase, yakni fase disorganisasi dan fase disintegrasi. Karena kehidupan sosial kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka konflik akan berkisar pada penyesuaian diri atau penolakan dari faktor-faktor sosial tersebut. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi kehidupan sosial menuju disintegrasi atau menuju ke integrasi (Ogburn dan Nimkoff, 1960 : 107) adalah :

1. Tujuan dari kelompok (*goals and objectives*);
2. Sistem sosial (*Social system*);
3. Sistem tindakan/tingkah laku (*action system*); dan
4. Sistem sanksi (*sanction system/law enforcement*)

Disorganisasi sebagai fase kehidupan yang mendahului disintegrasi sosial diperkirakan sebagai dampak dari perbedaan pandangan tentang tujuan kelompok, nilai dan norma sosial, dan tindakan dalam masyarakat. Apabila sistem hukum atau sanksi terhadap perbedaan pemahaman sistem norma dan nilai, sistem tindakan/perilaku anggota kelompok tidak ketat, maka dengan sendirinya langkah pertama menuju disintegrasi telah dicapai. Dengan demikian, gejala disorganisasi dan disintegrasi sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor (O'Brien, Schrag dan Martin (1964 : 2 ) antara lain :

1. Ketidaksiuaian anggota kelompok mengenai tujuan kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah disepakati;
2. Norma dan nilai sosial yang ada sudah tidak mampu lagi membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan individu dan kelompok;
3. Norma dan nilai kelompok yang telah disepakati anggota kelompok bertentangan satu sama lainnya;
4. Sanksi sudah menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen
5. Tindakan anggota masyarakat telah bertentangan dengan norma dan nilai kelompok.

Sementara itu, integrasi sosial merupakan suatu ikatan sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntunan tentang bagaimana individu berperilaku. Integrasi berhasil apabila (Ogburn dan Ninkoff, 1960 : 89) :

1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain;
2. Tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial.
3. Norma-norma cukup lama konsisten dan tidak berubah-ubah.

Unsur-unsur terpenting dalam pengintegrasian dan solidaritas kelompok antara lain kemargaan; perkawinan; persamaan agama; persamaan bahasa dan adat; kesamaan tanah; wilayah; tanggung jawab atas pekerjaan sama; tanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi; ekonomi; ikatan lembaga yang sama; pertahanan bersama; kerjasama/bantuan bersama; dan pengalaman, tindakan dan kehidupan bersama (Roucek, 1956). Sebenarnya integrasi sosial antar kelompok tersebut dapat tercapai apabila masyarakat yang menjadi anggota suatu kelompok merasa keuntungan yang diperoleh dari kelompok lebih besar dari resiko yang harus ditanggungnya. Demikian juga, kelompok memberikan arah yang jelas tentang bagaimana harus berperilaku dan sanksi yang diberikan apabila melanggar nilai dan norma yang telah disepakati.

Masyarakat Bengkulu secara etnis terdiri dari berbagai kelompok yang masing-masing memiliki norma dan nilai, dan orientasi kepentingan sendiri. Dalam tataran tertentu heterogenitas kelompok ini dapat saja menjadi "rentan" apabila tidak tercapai kesesuaian atau konsensus tentang nilai dan norma yang harus dipegang dan disepakati bersama. Dinamika sosial kemasyarakatan masyarakat Bengkulu akan sangat ditentukan oleh dinamika masing-masing kelompok etnis tersebut. Apabila dianalogikan bahwa masing-masing etnis menjadi sebuah sub sistem dari tata kemasyarakatan Bengkulu, maka apabila salah satu etnis mengalami "kerentanan" sosial maka pengaruhnya akan terasa pada keseluruhan sistem kemasyarakatan Bengkulu. Oleh karena itu, perlu pemahaman bersama bahwa integrasi dan solidaritas kelompok harus tetap dipertahankan tanpa mengorbankan integrasi dan solidaritas antar kelompok yang ada.

### C. Konsepsi Kearifan Lokal

Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari pengaruh unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi. Masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan lingkungan seperti model-model pengetahuan, tata ruang, sistem mata pencaharian hidup, dan pranata-pranata sosial (Suparlan, 1994)

Sifat dinamis dari kebudayaan memungkinkan unsur-unsur atau sub unsurnya mengalami perubahan yang ditentukan oleh para pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Merubah atau mempertahankan unsur atau sub unsur dari kebudayaan tergantung dari anggapan atau penilaian apakah unsur atau sub unsur tersebut masih dibutuhkan atautakah tidak. Unsur dan sub unsur kebudayaan akan dipertahankan oleh pendukungnya apabila dianggap masih bisa memberikan jaminan terhadap keberadaan jati diri dan kesinambungan masyarakat pendukungnya. Sebaliknya, unsur atau sub unsur kebudayaan akan diganti (diubah) apabila dianggap sudah relevan atau tidak bermanfaat bagi keberadaan dan kesinambungan masyarakat pendukungnya.

Rumusan adat istiadat yang isinya disusun berdasarkan hasil interaksi dan interpretasi masyarakat setempat sehingga memiliki *traits* yang spesifik, maka adat istiadat tersebut sering disebut sebagai-suatu kearifan lokal (Tjahyono, et al, 1999). Pada perkembangan selanjutnya, bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut menjadi bentuk orientasi baru bagi berbagai pihak dalam rangka menghadapi dinamika kemasyarakatan. Kembalinya orientasi pada nilai-nilai arif dalam masyarakat sebenarnya sebuah manifestasi dari kegagalan ilmu pengetahuan modern dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang cenderung semakin kompleks.

Perkembangan perhatian terhadap bentuk-bentuk kearifan dan pengetahuan lokal sebagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi telah mampu mendorong berbagai pihak untuk kembali menggali pengetahuan tradisional yang selama ini sudah ditinggalkan (DeWalt, 1994). Bahkan Richards (1985) menegaskan bahwa sistem ide dan pengetahuan lokal dapat memberikan informasi pada kita tentang cara-cara memecahkan persoalan yang tidak dapat terpecahkan oleh ilmu pengetahuan modern.

Pengarusutamaan sistem ide, nilai dan pengetahuan lokal dalam menganalisis perilaku masyarakat menurut Kloppenburg (1991) didasarkan pada pertimbangan bahwa (1) masyarakat lokal sangat peduli akan keberadaan lingkungannya yang terakumulasi melalui pengalaman yang telah menjamin eksistensi mereka; (2) masyarakat lokal sebenarnya memiliki pengetahuan sekaligus kesadaran tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungannya; dan (3) masyarakat lokal pada dasarnya lebih pandai dalam membuat keputusan tentang apa yang akan diperbuat terhadap lingkungannya.

Dalam tataran tertentu, masyarakat kita mulai "merindukan" sebuah tatanan kemasyarakatan yang teduh, damai, dan dinamis. Lonjakan budaya yang dramatis menjadikan masyarakat, termasuk pemimpinnya, telah melupakan pijakan kearifan sebagai pondasi awal terbentuknya sebuah masyarakat. Harga yang harus dibayar ternyata cukup mahal yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Biaya sosial (*Social Cost*) yang diakibatkan oleh penafikan aspek kearifan lokal harus ditanggung oleh generasi yang akan datang.

Apabila diruntut dari sistem ketatanegaraan kita, berbagai kalangan meyakini bahwa melunturnya nilai-nilai "arif" ketata masyarakatan kita dimulai dari pemberlakuan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU tersebut secara

sistematis telah melunturkan sendi-sendi kearifan lokal dalam lingkup dinamika “kemargaan” yang selama ini menjadi lembaga kontrol atas perilaku masyarakat penganut kebudayaan marga. Hilangnya sistem marga mengakibatkan merenggangnya nilai-nilai tradisional yang pada gilirannya telah menurunkan tingkat kohesi sosial. Selain itu, dihapuskannya sistem marga telah mengorbankan tatanan pengaturan kehidupan kemasyarakatan pada tingkat paling bawah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Pengakuan-pengakuan terhadap sumberdaya kolektif menjadi melemah sehingga yang muncul ke permukaan adalah pengakuan sumberdaya individu. Kompetisi dalam memperoleh akses kehidupan menjadi lebih tinggi, dan tidak jarang mengorbankan aspek-aspek kepatutan.

#### **D. Model Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal**

Melenturnya nilai-nilai tradisional yang dialami sebagian besar masyarakat kita menjadi sebuah “momok” yang cukup menakutkan untuk terjadinya disintegrasi sosial. Pertentangan etnis seperti yang dialami berbagai daerah di Indonesia mengimplikasikan adanya benturan kepentingan antar kelompok etnis sebagai akibat dari perbedaan nilai dan norma. Artikulasi kepentingan individu dan atau kelompok sering dilakukan dengan menafikkan eksistensi nilai dan norma individu dan atau kelompok lain.

Sementara itu, beragamanya etnis yang ada di Propinsi Bengkulu secara langsung akan menghasilkan sebuah tatanan kemasyarakatan yang heterogen dengan segala konsekuensinya. Keberagaman ini dapat saja menjadi sebuah potensi “dahsyat” untuk menciptakan tata kemasyarakatan yang dinamis dan integratif. Namun sebaliknya, keberagaman tersebut akan menjadi sebuah “bencana” apabila setiap unsur dalam masyarakat tidak mampu mengembangkan tatanan

kemasyarakatan dalam sebuah lingkup kepentingan dan nilai-nilai bersama.

Dari aspek sosiologis, keberagaman etnisitas senantiasa akan dibarengi dengan munculnya gejala keakuan budaya (*ego-culture*) yang dalam tataran tertentu mengakibatkan tumbuhnya prasangka sosial (*social prejudice*). Keakuan budaya dan prasangka sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik laten yang dalam situasi dan kondisi tertentu dapat saja menjadi pemicu adanya disorganisasi sosial dan disintegrasi sosial (konflik manifes). Konflik laten dari keberagaman budaya antara lain biasanya ditunjukkan oleh sifat eksklusif satu kelompok terhadap kelompok lain. Istilah-istilah yang muncul dari sikap eksklusivisme tersebut antara lain berupa "orang kita" dan "bukan orang kita" yang pada gilirannya menjadi pemicu tumbuhnya prasangka sosial. Sikap tersebut sebenarnya tidak kondusif untuk mengembangkan tata kemasyarakatan yang dinamis dan integratif.

Berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebenarnya memberikan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Bengkulu. Hampir tiga dekade masyarakat Bengkulu, seperti masyarakat lain di propinsi lain di Indonesia, berada dalam tatanan kemasyarakatan yang tidak memungkinkan munculnya inisiatif dan partisipatif lokal. Dengan demikian, sangat masuk akal apabila otonomi daerah disikapi berlebihan dan kadangkala tidak selaras dengan filosofi otonomi itu sendiri.

Berbagai kewenangan yang dilimpahkan ke daerah harus disikapi dengan seksama. Aktualisasi pembangunan daerah sebaiknya dilakukan dengan berbasiskan pada bentuk-bentuk kearifan lokal (*local wisdom based-community development model*) yang selama ini seolah terpinggirkan. Propinsi Bengkulu dengan segala potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, termasuk keragaman etnis,

memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan komparatif dalam pelaksanaan pembangunannya. Keuntungan tersebut dapat digali melalui revitalisasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada. Meskipun sistem kemargaan yang telah meluntur “relatif sulit” dihidupkan kembali, namun filosofi dan rohnya dapat diintegrasikan ke dalam proses pembangunan daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penikmatan hasilnya.

Pentingnya pertimbangan faktor kearifan lokal dalam proses tata kemasyarakatan dan pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan bahwa perwujudan praktis kehidupan sehari-hari masyarakat akan beriringan dengan sistem ide, gagasan, dan nilai lokal yang hidup dan terpelihara sejak lama. Heberlein (1989) menegaskan bahwa sikap dan perilaku yang muncul dari individu atau masyarakat merupakan refleksi dari tatanan nilai yang selama ini dipegang.

#### **E. Revitalisasi Kearifan Lokal**

Derasnya arus informasi dari luar yang disertai dengan sistem ide, gagasan, dan nilai memberikan implikasi pada upaya mengembangkan filter budaya untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan, terutama generasi muda. Hasil penelitian Tjahjono et al (1999) dan Suminar, et al (2001) di sekitar kawasan TNKS menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat masih mengenali substansi atau inti kearifan lokal warisan nenek moyangnya. Peneliti menggunakan kata “dikenali” atau “mengenali” bukan kata “memiliki” atau “memahami” kearifan tersebut. Hal ini disebabkan anggota masyarakat cenderung meninggalkan atau mengabaikan substansi atau inti kearifan lokal warisan nenek moyangnya. Dengan kata lain, masyarakat mengenal adanya sistem ide, gagasan, dan nilai yang bertujuan untuk mengatur tata kemasyarakatan, namun dalam praksis kehidupan sehari-hari

seringkali masyarakat menafikkan eksistensi kearifan yang ada.

Secara sosiologis, gejala tersebut mengindikasikan adanya dilema sosial budaya. Kondisi ini diperkirakan sebagai akibat dari lemahnya revitalisasi atau aktualisasi sistem ide, nilai, dan gagasan ke dalam praksis kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, dilema sosial budaya tersebut tidak hanya melanda komunitas akar rumput (*grass roots*), melainkan lapisan elite pun mengalami hal yang sama. Revitalisasi kearifan lokal ini sangat penting untuk dilakukan dengan pertimbangan semakin kompleksnya fenomena sosial kemasyarakatan yang tidak mampu dipecahkan melalui sistem ide, gagasan, dan nilai-nilai modern.

Bagi masyarakat Bengkulu revitalisasi tersebut memberikan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan dinamika kehidupan kemasyarakatan dalam lingkup nasionalitas dan globalitas. Sebagai sub sistem dari sebuah ekosistem sosial, ekonomi, dan politik nasional dan global, masyarakat Bengkulu suka atau tidak suka akan berhadapan dengan kekuatan eksternal yang dalam tataran tertentu mampu melunturkan sistem ide, gagasan, dan nilai lokal yang telah dijunjung tinggi sejak nenek moyang.

Revitalisasi kearifan lokal masyarakat Bengkulu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni :

1. Eksplorasi dan identifikasi berbagai sistem ide, gagasan, dan nilai tradisional dari seluruh etnis yang ada berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dapat didokumentasikan secara terpadu sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
2. Dari hasil eksplorasi dan identifikasi tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat memformulasikan bentuk-bentuk pendekatan pembangunan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat.

3. Memasukkan perspektif kearifan lokal dalam setiap pengambilan keputusan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan secara tidak langsung merupakan refleksi dari “roh” kearifan lokal masyarakat Bengkulu

Revitalisasi kearifan lokal ini dirasakan semakin mendesak untuk dilakukan, apalagi berlakunya UU No. 22 tahun 1999 memberikan kemungkinan untuk itu. Pengaturan sosial kemasyarakatan berbasiskan pada kearifan lokal dapat menjadi sebuah pondasi kukuh bagi pengembangan sistem sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Seyogianya Propinsi Bengkulu harus mampu menampilkan model pengembangan masyarakat yang berakar pada nilai dan norma setempat sebagai refleksi dari tatanan kemasyarakatan Bengkulu.

## **F. Penutup**

Pada dasarnya, keberadaan suatu sistem sosial akan senantiasa “rentan” terhadap disorganisasi dan disintegrasi sosial. Fenomena tersebut sebenarnya dapat diminimalkan apabila setiap kelompok dan atau individu memahami dan memiliki sistem nilai dan norma setempat yang telah ada secara turun temurun dan disepakati bersama. Hanya saja, keberadaan kearifan lokal tersebut seolah tersisihkan dari tataran nasional dan global. Akibatnya, seringkali kelompok dan atau individu mengalami dilema norma dan nilai yang pada gilirannya menyebabkan hilangnya identitas diri dan kelompok. Revitalisasi bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut nampaknya perlu dilakukan untuk mengandalikan berbagai fenomena sosial yang dari waktu ke waktu terus meningkat.

# PLURALISME DALAM KEBUDAYAAN DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL BANGSA INDONESIA \*)

Oleh : H- ZALILI SAILAN \*\*)

## 1. *Pendahuluan*

Indonesia negara yang bhinneka dari berbagai aspek, misalnya dari segi etnik, adat istiadat, kepercayaan yang perlu dihormati eksistensinya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sentralisasi dalam segala aspek termasuk di dalam kebudayaan ditangan pemerintah pusat telah menjadi pilihan yang terbaik oleh para pendiri negara kesatuan (*founding fathers*). Keputusan ini juga mendapat dukungan dari rakyat karena ia merupakan dialog panjang yang berakar dari latar sejarah negara-bangsa, oleh sebab itu Indonesia yang terbentang dari titik paling barat dengan kota Sabang hingga ke ujung paling timur dengan kota Merauke merupakan kekayaan khasanah budaya Nusantara yang bhinneka dalam segala aspek yang harus dihormati

Masalah kesatuan bangsa Indonesia merupakan permasalahan yang sudah puluhan tahun menjadi fokus perhatian pemikir-pemikir kita dalam menghadapi persoalan tersebut, siapakah yang harus dianggap sebagai bangsa Indonesia dan bagaimanakah orang-orang yang dianggap merupakan bangsa Indonesia dapat dipadu menjadi yang sungguh-sungguh bersatu? Walaupun masalah ini telah menjadi bahan pemikiran para ahli kita, bila mempertanyakan seberapa lama penduduk- pribumi dikepulauan kita telah mendiami kepulauan ini puluhan abad lamanya! Namun masalah kesatuan bangsa Indonesia merupakan masalah yang agak baru, karena terjadi pada awal abad XX ini. Kesatuan penduduk tersebut kemudian dikenal sebagai

bangsa Indonesia, sedangkan nasion Indonesia belum ada (Bachtiar; 1986;20).

Masyarakat kita menempatkan kebudayaan yang kita miliki sebagai produk karya dan karsa manusia Indonesia. Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda juga adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain, terutama di dalam satu kesatuan politik. Ciri utama masyarakat ketika itu adalah tidak adanya kehendak bersama diantara berbagai kelompok masyarakat yang ada.

Kemajemukan masyarakat Indonesia ketika itu tercermin dalam pengelompokan secara vertikal, dalam artian masing-masing kelompok masyarakat yang berdiri sendiri-sendiri itu sekaligus juga merefleksikan adanya kebudayaan sendiri, stratifikasi sosial ekonomi dan sosial politik masing-masing berbeda dalam kategori etnis.

Menurut Furnivall, di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat konflik kepentingan antar berbagai kelompok dan dalam masyarakat majemuk seperti di Hindia-Belanda konflik kepentingan itu menemukan sifatnya yang lebih tajam, karena perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan rasial (Rajab, 1996:4). Dan tampaknya kemajemukan ini terbawa sampai ke masa pasca kemerdekaan dan atau hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka dan menjadi sebuah negara bangsa – *nation state* - telah diperhadapkan dengan pluralisme horizontal, berupa pengelompokan masyarakat Indonesia yang lebih banyak diikat oleh ikatan-ikatan primordialisme - *primordial attachments* – seperti kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama dan suku bangsa. Primordialisme inilah merupakan pengikat asli masyarakat Indonesia dan atas dasar ikatan itulah pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, baik dalam organisasi-organisasi sosial informal dan formal, asosiasi-asosiasi, organisasi

massa, pemerintahan, partai politik, maupun pada organisasi-organisasi yang bertujuan ekonomi.

Pengelompokan yang berbasis pada primordialisme ini kemudian dikenal dengan "**palitik aliran**" yaitu pengelompokan organisasi politik beserta organisasi massa dan pendukungnya yang berakar pada fondasi keagamaan atau kebudayaan sebagai basis pegangan dan orientasi ideologi, bagi partai politik bersangkutan. Pengelompokan semacam ini memiliki potensi konflik yang dapat mengakibatkan terganggunya keutuhan negara bangsa atau terjadinya proses disintegrasi. Juga pada bagian lain cukup menyulitkan komunikasi satu sama lain, apalagi pembauran, karena masing-masing kelompok budaya dalam berkomunikasi cenderung menggunakan kerangka budaya mereka sendiri dan kebudayaan merupakan landasan atau kerangka acuan - *frame of reference* - yang berintikan petunjuk-petunjuk buku bagi pengambilan tindakan dan telah berakar dengan cukup kuat melalui proses sosialisasi di dalam kelompok bersangkutan, sehingga sulit mengalami perubahan. Dalam konteks itulah kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan kendala krusial dalam mencapai integrasi nasional.

## 2. Sentralisasi dan Penyeragaman Budaya

Masyarakat primitif menurut adat kebiasaan menggunakan hubungan sosial di dalam kelompok serta cara-cara memenuhi kebutuhan hidup berlangsung dalam pola pengamalan mengikuti apa yang di perolehnya secara turun-temurun, tanpa perubahan, tanpa variasi dan modifikasi sesuai kebutuhan menurut perkembangan zaman. Spesialisasi yang profesional yang sangat dibutuhkan dalam kolektivisme sebagai fungsi-fungsi dan peran-peran kelompok masyarakat hampir tidak ada; setiap anggota kelompok ikut serta dalam semua kegiatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan

berperang. Pada masyarakat ini tidak ada struktur kelas militer profesional yang fungsinya hanya berperang atau kelompok eksekutif yang berfungsi untuk mengendalikan kekuasaan. Masyarakat primitif tidak mampu menghadapi perkembangan kebudayaan yang semakin maju dan menuntut spesialisasi dikalangan anggota kelompoknya sebagai akibat dari tuntutan kemajuan zaman yang dihadapinya (lihat Habib; 1996).

Kemajemukan suatu masyarakat atau etnisitas dalam suatu bangsa akan menjadi permasalahan yang krusial dalam proses integrasi nasional bila kemajemukan itu dipandang sebagai sesuatu yang statis, atau bila suatu kebudayaan diletakkan sebagai sesuatu yang telah jadi sudah *given final*, tertutup, dan tidak mungkin berubah. Dalam konteks pandangan yang tertutup, melihat kemajemukan masyarakat dan kebudayaan dipandang sebagai "kata benda". Disini kebudayaan dilihat sebagai realitas, sesuatu yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan, sudah terbentuk, dan sudah dilembagakan. Dengan kata lain, kebudayaan dipandang sebagai produk, baik apakah ia dipandang sebagai sistem ide-ide *system of meaning*, sebagai sistem tingkah laku – *System of behavior*, ataupun sebagai perwujudan benda-benda – *material culture* (lihat Rajab, 1996:5)

Dalam konsep bhinneka menuju keikaan, tidak semestinya bila kebudayaan harus diperlakukan sebagai produk yang sudah jadi dan masing-masing kelompok pendukung budaya dianggap telah menciptakan dan memiliki produk budaya yang telah mapan dan sukar atau tidak bisa diubah, dengan begini intergrasi masyarakat majemuk yang memiliki nilai budaya mapan akan menjadi suatu problema yang sulit diatasi atau dipecahkan. Terlihat disini bahwa masing-masing kelompok etnik pendukung produk budaya mereka sendiri tidak akan bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi; hubungan diantara para pendukung budaya akan selalu macet, dan pembauran antar budaya yang menuju ke

arah persatuan merupakan sesuatu yang mustahil akan terwujud.

Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memecahkannya, sebab pengalaman sejarah menunjukkan bahwa mengapa sebelumnya kemajemukan ini justru menjadi keunggulan kita dalam melawan intervensi asing. Hal ini menjadi renungan kita semua dan menjadi bahan penyadaran bagi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, mengapa kemajemukan itu bisa menyatukan barisan kita ketika melahirkan dan membentuk negara bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terus bisa bertahan hingga sekarang ? Mengapa pada masa awal kemerdekaan banyak orang dari berbagai latar belakang, daerah, ras, budaya, agama, suku bangsa dapat bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemudian berupaya untuk membangun persatuan dan kesatuan Indonesia dan bahkan menghendaki tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi semua rakyat tanpa terkecuali, tanpa membedakan adanya ikatan primordialisme. Mengapa pada periode awal kemerdekaan tidak muncul gerakan-gerakan separatis kedaerahan, kesukuan dan keagamaan. Namun malah sebaliknya diantara mereka yang berbeda latar belakang primordialnya dapat bersatu dan berjuang mempertahankan negara proklamasi dari intervensi kolonialisme asing yang ingin bercokol kembali.

Gerakan-gerakan sosial yang terjadi pasca kemerdekaan bukanlah gerakan-gerakan atas dasar primordialisme, tetapi suatu revolusi sosial yang ingin menghancurkan suatu tatanan sosial ekonomi yang dianggap tradisional –feodalistik. Dan akhirnya sejak awal abad XX sampai kira-kira menjelang tahun 1960-an bermunculan organisasi-organisasi sosial, fungsional, asosiasi-asosiasi, dan partai-partai politik besar yang tidak berorientasi dan mendasarkan gerakannya pada ikatan primordialisme.

Bertolak dari sebuah kenyataan bahwa kita sebuah komunitas bangsa yang bersifat plural (berbhinneka), maka kekeliruan mendasar yang perlu diperbaiki adalah perhatian yang sangat minim di masa lalu terhadap pembangunan kebudayaan daerah akibat titik berat yang berlebihan pada kepentingan pusat. Di samping itu juga kekuatan memaksakan penyeragaman berbagai aspek sistem sosial politik dan budaya telah dirasakan sampai melewati ambang batas toleransi yang diinginkan bagi eksistensi jati diri sistem lokal dengan berbagai akibat maupun resikonya (Abdullah ; 2001).

Setelah sekian lama kita terbius oleh semangat yang berlebihan untuk mengorientasikan cara berpikir kita ke satu titik pusat kekuasaan atas nama persatuan dan kesatuan, akhirnya kita mulai berani memandang realitas hakekat kebhinnekaan kita. Meskipun disana masih terdapat segudang hambatan untuk merealisasikan transformasi ke arah paradigma baru. Kini daerah diharapkan tidak perlu lagi hanya menunggu bola sebagai kebiasaan selama ini yang kurang peka, akibat terlalu lama terbiasa dengan ketergantungan pada pusat, dan atau karena kekurangrelaan pusat untuk menyerahkan beberapa kewenangan strategis.

### **3. Pilihan Sentralisasi atau Otonomi Kebudayaan**

Sentralisasi dalam negara kesatuan sesungguhnya telah berlangsung sejak- pemerintahan hindia-Belanda dan baru berakhir setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru. Selama kurun waktu kemerdekaan, khususnya masa Orde Baru praktik sentralisasi dalam kebudayaan sangat menonjol pelaksanaannya. Ketika Demokrasi Parlementer kembali dipraktekkan dalam bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kemudian diteruskan dengan Demokrasi Terpimpin, pemerintah ternyata tidak dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan otonomi.

Sebagai akibatnya adalah terjadilah pelbagai pemberontakan di daerah pada era 1950-an yang lebih disebabkan oleh reorganisasi tentara, pemerintahan, serta terjadinya sentralisasi politik dan ekonomi pada tangan pemerintah pusat (Rajab dalam Said, 2001:5). Kompleksnya masalah tersebut, tidak saja karena kekecewaan terhadap otonomi daerah, dan juga isu hubungan pusat-daerah merupakan salah satu isu penting dalam kasus PRRI-Permesta, Orde Baru, sebagai penerus sesudah Demokrasi Terpimpin seharusnya mempunyai peluang yang luas untuk mempraktekkan negara kesatuan yang berazaskan desentralisasi.

Pengelolaan negara kesatuan yang sentralistik dijalankan Orde Baru menimbulkan kekecewaan daerah-daerah karena Orde Baru tidak ingin memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Meskipun ketentuan perundangan memberikan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi pemerintah Orde Baru tidak melaksanakannya dengan sepenuh hati. Faktor penyebabnya adalah kepentingan elit politik Orde Baru yang ingin menguasai daerah-daerah/provinsi, kabupaten/kota yang memiliki sumber daya alam yang besar untuk dieksploitir dengan maksud mengambil keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya dari kekayaan alam di daerah kepada kroni dan kerabatnya masing-masing.

Praktek seperti ini dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintah pusat dan pejabat perpanjangan tangan mereka di daerah yang berlindung dalam kebijakan pemerintah Orde Baru yang sentralistik untuk menikmati sepenuhnya dominasi pusat. Genggaman penguasa politik pusat terhadap daerah menjadi kuat karena wewenang yang amat besar dan kuat dari pusat untuk menentukan gubernur dan bupati/walikota. Tidak mengherankan bila budaya penguasa politik menunjuk dan mendroping orang-orang yang dekat dengan mereka, baik dari pusat maupun yang ada di daerah untuk memangku jabatan kepala daerah. Langkah ini akan menjamin terpenuhinya

kepentingan ekonomi mereka di daerah, dan sebaliknya amat merugikan daerah dan rakyatnya.

Kekhawatiran lain bagi rezim Orde Baru adalah menggunakan sentralisasi dalam negara kesatuan yang otoriter dan sewenang-wenang adalah alasan yang berlebihan terhadap akan terganggunya stabilitas politik, pembangunan nasional, dan integrasi bangsa. Kekhawatiran yang berlebihan akan terganggunya elemen-elemen tersebut menghasilkan tindakan represif **budaya kekerasan** oleh penguasa negara kepada kelompok-kelompok rakyat atau yang berbeda pendapat dengan pemerintah Orde Baru. Mungkin juga pemerintah Orde Baru tidak ingin melihat daerah menikmati kebebasan. Bahkan sebaliknya kebebasan daerah dinilai sebagai ancaman terhadap negara kesatuan, karena dikhawatirkan daerah-daerah akan mementingkan dirinya sendiri dan dapat merugikan negara kesatuan, seperti kasus pemisahan diri **merdeka**.

Dengan demikian elit politik berusaha selalu mengeksploitir daerah untuk kepentingan kelompok dengan dalih berlindung pada kepentingan nasional. Pengalaman inilah yang menyebabkan banyak daerah tidak berani membantah rezim orde baru karena mereka dapat dituduh melawan kepentingan nasional dan menonjolkan kepentingan daerah *provinsialisme*.

Ketika rezim Orde Baru mengelola kekuasaan negara-bangsa lebih menekankan adanya kesatuan, bukan persatuan dengan mengabaikan keberagaman. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa Orde Baru sepenuhnya tidak melaksanakan motto nasional dari keberagaman yang amat terkenal itu "**Bhinneka Tunggal Ika**" yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari sudut pandang inilah arti pentingnya otonomi daerah bahwa perbedaan-perbedaan yang ada secara alami, seharusnya tetap dipertahankan dan dihormati, meskipun persatuan terus ditegaskan.

Keberagaman budaya di dalam negara kesatuan merupakan tantangan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, meskipun disana ada perbedaan-perbedaan besar diantaranya perbedaan tradisional, budaya, etnis dan golongan kepentingan. Selama rezim Orde Baru lebih cenderung ingin menyeragamkan segala aspek yang tumbuh dari keberagaman itu, ketimbang yang sebenarnya harus tetap dibiarkan tumbuh berbeda secara alami.

Banyak contoh yang dapat dijadikan pijakan dalam mencermati penyeragaman tersebut, seperti penyeragaman desa-desa diseluruh Indonesia, penyeragaman budaya dan etnis melalui kebijakan transmigrasi, terutama di luar Jawa, penyeragaman budaya melalui kebudayaan nasional, bahkan pada atribut-atribut tertentu yang menunjukkan pola penyeragaman. Sebagai buah dari penyeragaman ini menimbulkan protes secara diam-diam dari kalangan masyarakat di daerah karena tidak mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan protes ini berlanjut pada tingkat konflik horizontal. Pada bagian lain penyeragaman ini sesungguhnya telah melanggar nilai-nilai yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang tertuang pada bagian penjelasan bahwa pemerintah haruslah menghormati kebudayaan daerah-daerah dengan segala hak-hak dan asal usul yang dimilikinya. Perhatian terhadap daerah tidak saja karena tuntutan seperti yang telah dikemukakan di atas, akan tetapi keragaman kebudayaan daerah juga bermakna memiliki kearifan-kearifan yang dapat dicontoh dan diteladani dalam pengelolaan negara kesatuan dan juga merupakan sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberdayakan dan mengikutsertakan daerah.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebudayaan di daerah menyebabkan orang daerah merasa terpinggirkan. Perasaan demikian mendorong terakumulasinya segala kebencian dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat dalam mengelola

negara kesatuan. Adanya pandangan pusat melihat daerah sebagai *periphery*, menghadirkan kecenderungan gerakan separatisme. Kondisi ini tidaklah muncul dengan tiba-tiba, tetapi merupakan reaksi yang berantai dalam kurun waktu yang panjang terhadap perasaan dilecehkan oleh pemerintah pusat yang berdomisili dan didominasi oleh etnik Jawa yang beranggapan sebagai *center periphery*, dan kurang peka terhadap eksistensi dan aspirasi serta kepentingan berbagai etnik yang mendiami kepulauan Indonesia.

Pada tahapan awal, perasaan yang dilecehkan itu muncul ketika pemerintah pusat, bukan saja mengambil sumber daya yang ada di daerah dengan alasan sentralistik, tetapi dimanfaatkan untuk membangun Pulau Jawa dan memberikan sedikit dan tidak berimbang dengan keperluan daerah yang bersangkutan. Sementara dari Jawa ke luar Jawa merambatkan kebudayaannya untuk diterima di daerah dengan alasan negara kesatuan dan kepentingan integrasi nasional. Perasaan ini meningkat menjadi antipati, ketika jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan yang ada di daerah diambil alih dan diduduki oleh personil-personil yang berasal dari etnik Jawa, dan kurang memberikan porsi yang lebih adil kepada pejabat yang berasal dari daerah (putra daerah), akhirnya pada persoalan inilah munculnya ketegangan "pusat-daerah" (Leirissa; 1994) pengalaman buruk di masa lalu diharapkan tidak berulang lagi dalam era reformasi sekarang. Koreksi baru dilakukan setelah masyarakat daerah memberikan reaksi yang keras karena frustasinya yang berkepentingan.

Akhirnya perasaan dilecehkan ini terakumulasi menjadi sebuah kekuatan di bawah permukaan, kemudian tumbuh menjadi benih yang subur dari berkembangnya gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah, baik dalam bentuk lunak *civil disobediences*, maupun dalam bentuk yang keras

*opposition, social unrest, insurgency, bahkan rebellion (Bahar, 1999)*

#### **4. Faktor – Faktor Pemicu Menuju Disintegrasi**

Berdasarkan pengelompokan politik masyarakat Indonesia menunjukkan adanya pengelompokan sosio-politik yang bermula pada masa pasca kemerdekaan yang diikat dan berorientasi primordialisme. Sementara ada pula kelompok-kelompok sosial dan politik besar yang mengatasi primordialisme yang berorientasi pada ideologi nasionalisme dengan beranggotakan dari kelompok ras, agama, daerah, dan suku bangsa yang berbeda. Bahkan ada pengelompokan sosial dan politik yang berorientasi primordialisme dimana jumlah anggota dan pendukungnya yang lebih kecil.

Dalam catatan sejarah, menorehkan berbagai gejala yang dimulai pertengahan dekade 1950-an, maka bermunculan gerakan separatis yang mengatasnamakan kesukuan, kedaerahan, dan keagamaan, akan tetapi ternyata gerakan-gerakan itu bukanlah semata-mata pencerminan dari tuntutan primordialisme yang hendak berdiri sendiri secara total. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan, bahwa ikatan-ikatan primordialisme ternyata tidak begitu signifikan dalam mendorong timbulnya gerakan –gerakan separatis tersebut. Meskipun gerakan-gerakan itu timbul di daerah dan dilakukan oleh suku bangsa atau golongan agama tertentu. Akar gerakan lebih disebabkan oleh reorganisasi tentara dan pemerintahan, serta sentralisasi politik dan ekonomi pada pemerintah pusat .

Pada bagian lain adalah terjadinya perubahan kewibawaan tradisional tokoh masyarakat dan ulama akibat berubahnya struktur pemerintahan. Dan bila mempelajari hasil penelitian, maka pluralisme masyarakat Indonesia menjadi ganjalan bagi proses integrasi nasional. Namun bertolak dari

pengalaman sejarah ternyata pluralitas atas dasar ikatan-ikatan primordial tersebut dapat diatasi. Selama ini telah menggunakan pendekatan dengan melihat kemajemukan cenderung untuk meletakkan suatu kelompok masyarakat sebagai suatu komunitas yang tertutup dan merupakan suatu entitas yang berbeda dengan entitas yang lain sehingga sulit untuk dapat berhubungan. Masing-masing entitas cenderung memiliki kehendak untuk berdiri sendiri dan senantiasa mengabaikan dan menempatkan entitas lain sebagai "lawan"

Pandangan yang keliru ini perlu menjadi perhatian kita semua, bahwa masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang secara **absolut** berbeda satu sama lain dan tidak bisa dipersatukan, memiliki kehendak dan daya hidupnya sendiri serta kebudayaan itu dianggap hanya dapat berfungsi di dalam masyarakat pendukungnya sendiri, sementara pada masyarakat lain kebudayaan itu tidak akan berfungsi atau tidak relevan. Jelasnya kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain dianggap berbeda dan sama sekali tidak bisa dijumpai.

Pada era global sekarang ternyata batas-batas wilayah kebudayaan hampir saja tidak ada, seseorang bisa beralih anutan kebudayaan baik sadar atau tidak sadar dan tidak harus sepanjang hidupnya tercengkeram atau tidak bisa melepaskan diri dari kebudayaan asalnya. Maksudnya kebudayaan bisa berubah dan dalam kenyataan memang kebudayaan senantiasa mengalami perubahan, tidak tertutup dan statis, sehingga antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya bisa saling berinteraksi dan berbaur, bahkan dalam proses hubungan **cultural contact** tersebut bisa saja tumbuh dan berkembang suatu kebudayaan baru, suatu bentuk budaya hasil proses akulturasi.

Hubungan-hubungan yang tidak harmonis antara pribumi dan nonpribumi tampaknya menjadi agenda politik utama nasional sejak lama sampai sekarang, beberapa waktu yang lalu kembali meledak di beberapa kota di Maluku,

Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Tengah dan Jawa Barat, disebabkan karena adanya perbedaan absolut dalam kebudayaan yang tidak dapat dipersatukan, tampaknya ledakan konflik yang bernuansa SARA yang terjadi baru-baru ini atau beberapa tahun lalu antar etnis asli pribumi dengan etnis pendatang nonpribumi lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, bukan karena faktor perbedaan kebudayaan. Bila merujuk pada munculnya gerakan separatis pada dekade 1950-an negara dihadapkan pada kemungkinan terjadinya instabilitas, bahkan akan bermuara pada proses disintegrasi, dan ternyata hal tersebut bukan karena faktor primordialisme yang merefleksikan perbedaan kebudayaan, tetapi melainkan akses, kontrol, dan distribusi sumber daya ekonomi tidak merata serta kesempatan partisipasi politik bagi masing – masing kelompok tidak sama. Dalam situasi yang timpang secara ekonomis dan politik orang bisa saja melihat jalan kehidupannya relatif tertutup, untuk mencapai status yang diinginkan berusaha untuk mengerahkan kelompoknya. Untuk keperluan mobilisasi itu mereka cenderung memanfaatkan loyalitas tradisionalnya ikatan primordialisme, sebaliknya kelompok yang diuntungkan oleh adanya situasi yang timpang, berupaya untuk mengerahkan loyalitas tradisional kelompoknya dalam rangka mempertahankan kedudukan mereka.

Permasalahan utama dalam proses integrasi masyarakat majemuk bukan terletak pada kemajemukannya sendiri, dan bukan pula monopoli perbedaan faktor kebudayaan, tetapi pada faktor ekonomi dan politik. Mungkin istilah yang tepat perbedaan kebudayaan merupakan sesuatu yang laten yang dapat mendestabilkan integrasi masyarakat, namun sifat laten itu tidak akan muncul ke permukaan bila sistem ekonomi dan sistem politik bersifat demokratis, dalam arti memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat tak terkecuali. Bila faktor perbedaan

kebudayaan yang laten itu akan menjadi manifes atau muncul ke permukaan akan menimbulkan konflik horizontal bila sistem ekonomi mengalami distorsi yang berlebihan dan sistem politik yang kurang partisipatif, seperti halnya yang terjadi di Nangro Aceh, Maluku-Ambon, Sambas-Kalimantan, Poso, dan daerah lain. Jadi sektor ekonomi dan politiklah yang lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat majemuk, baik antar agama, suku bangsa, daerah, maupun antara golongan minoritas dan golongan mayoritas (lihat Rajab; 1996)

Dalam rangka terpeliharanya konsep negara kesatuan, maka taraf pendidikan sumber daya manusia, harus semakin tinggi dan merata, kesempatan kerja yang terbuka dan dalam rekrutmennya tidak nepotisme, distribusi sumber daya ekonomi yang relatif merata, dan partisipasi politik yang luas, serta berlangsungnya proses globalisasi yang meluas dan intensif akan mendorong memudarnya ikatan primordial, memudahkan komunikasi dan pembauran dalam mempersatukan berbagai ragam kebudayaan. Pengalaman masa silam, bahwa orang-orang yang berbeda secara primordial, tetapi justru mengalami cita-cita ke masa depan yang sama menyebabkan mereka memiliki persepsi, motivasi, orientasi, dan visi yang sama dan dapat bekerjasama dalam kerangka kesatuan negara bangsa.

## **5. Pengembangan Kebudayaan Dalam Negara Kesatuan**

Potret kawasan Nusantara memperlihatkan keanekaragaman kondisi geografis yang pada gilirannya menyebabkan pula keanekaragaman corak dan sifat masyarakat serta budayanya yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Kemajemukan dalam kondisi alam dan sosial budaya masyarakat Indonesia memperlihatkan corak multimedional. Ditinjau dari dimensi perkembangannya

klasifikasi sosial dari masyarakat Indonesia memperlihatkan corak yang beragam dan berada dalam bermacam-macam tahapan.

*Pertama*, gejala kehidupan diukur dengan kriteria efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Melalui pendekatan tertentu diupayakan agar dapat hemat dan menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Dan dengan hasil yang memadai dalam arti kualitas dan kuantitas, maka kehidupan masyarakat menjalankan fungsinya dengan proses mekanisme modern. Sedangkan pada sisi lain, hubungan antar manusia dilakukan dengan motif utilitaristik, yang lebih berorientasi pada materialisme dan pragmatisme (Bernadib; 1990:9)

*Kedua*, bahwa pembangunan yang telah dan sedang berlangsung selama 35 tahun merupakan wujud nyata dari pengamalan makna Pancasila. Menempatkan masyarakat Indonesia melalui penghayatan nilai-nilai budaya berperan sebagai objek dan subjek pembangunan, demi terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang baik hubungannya dengan lingkungan masyarakat maupun dalam diri pribadinya. Keutuhan itu dapat dipertahankan bila beberapa aspek yang menjadi komponennya memperlihatkan eksistensi yang signifikan, seperti komponen religi, budaya dan ilmu pengetahuan.

Pada aspek religius, manusia adalah makhluk unik karena mempunyai kedudukan sebagai makhluk Tuhan, diciptakan oleh-Nya dan mengabdikan kepada-Nya. Dari aspek budaya manusia adalah makhluk etis yang wajib mempertahankan dan melestarikan budaya dan dunia sekitarnya. Dari aspek ilmiah, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bersikap obyektif dan realistik serta dapat secara proporsional bersikap kritis, rasional, terampil, kreatif (Poespowordoyo, 1987 : 17)

Bertolak dari pemilihan ketiga aspek tersebut, maka manusia Indonesia diharapkan dapat memelihara nilai-nilai budayanya secara selaras, serasi dan seimbang. Sebagai manusia Indonesia tidak perlu ketakutan dalam menghadapi masa depan, manusia harus berupaya untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang terjadi dan menjadikan makhluk manusia sebagai obyek yang mengatur dan mengendalikan kemajuan iptek. Kemajuan ilmu dan teknologi sebagai karya budaya pada abad ke21 perlu memperhatikan hakekat sosial budaya yang akan berkembang pada zamannya. Bahwa kecenderungan sosial budaya pada waktu sekarang menunjukkan gambaran masyarakat yang berada pada era globalisasi dengan mencirikan budaya lokal telah bercampur baur dengan budaya nasional dan internasional yang telah mengglobal.

Banyak terjadi penyimpangan dalam tata kehidupan bila kebudayaan lokal menjadi ukuran dan acuan nilai yang harus dipanuti. Tata krama sebagai manusia yang berbudaya telah kehilangan otoritasnya, bahkan budayawan dan pemangku adat tidak lagi menjadi teladan ditengah-tengah masyarakatnya. Sebaliknya kalangan masyarakat sudah enggan atau tidak lagi mentokohkan seseorang sebagai simbol **“pemangku budaya”** inilah yang kemudian dikenal dengan krisis budaya. Dalam menghadapi fenomena ini baik yang bernada pesimistik sampai pada yang optimistik yang menyangkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat sebagai akibat dari menduniannya kebudayaan yang telah kehilangan tembok-tembok pembatas antar budaya.

Dengan kompleksnya permasalahan dan perubahan-perubahan yang terjadi, maka manusia Indonesia yang dapat berperan dalam pembangunan kebudayaan di masa depan dicirikan sebagai berikut ; (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berbudi pekerti luhur, (3)

berkepribadian, (4) beretos kerja, (5) berdisiplin, (6) bertanggung jawab, (7) mandiri, (8) cerdas trampil, (9) sehat jasmani rohani, (10) cinta tanah air, (11) memiliki sifat kebangsaan dan kesetiakawanan Sosial, (12) percaya pada diri sendiri dan memiliki harga diri, (13) inovatif dan kreatif, (14) produktif, (15) berorientasi ke masa depan (Soedjatmoko, 1991: 97). Kelima belas ciri itu bertolak dari pengembangan aspek religius, budaya dan ilmiah, sehingga masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk dapat mengatasi terjadinya konflik horizontal yang diakibatkan oleh faktor sosial ekonomi dan sosial politik yang berpandangan sempit. Sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang, diantaranya harus mempunyai kemampuan serba tahu dan mengenal budaya yang ada di Indonesia agar tidak terjadi pendewaan terhadap budaya miliknya – *ethnosentrisme*.

## 6. Penutup

Jadi, usaha membina persatuan harus diarahkan ke dalam 3 (tiga) aspek pengembangan kebudayaan; (1) membina perkembangan sistem budaya Indonesia, atau membina perkembangan dan persebaran kebudayaan nasional Indonesia dalam arti luas; (2) memperkuat dan memperbanyak kolektiva-kolektiva ke-Indonesia-an yang dikaitkan dengan usaha agar setiap orang, yang menurut undang-undang negara kita adalah warga negara Republik Indonesia, menjadi anggota berbagai kolektiva ke-Indonesia-an sehingga? menjadi jaringan hubungan solidaritas mempersatukan seluruh warga masyarakat Indonesia pendukung kebudayaan nasional kita; serta (3) membina perkembangan unsur-unsur ke-Indonesia-an dari kepribadian masyarakat secara bersama-sama sebagai perwujudan dalam negara kesatuan (lihat Bachtiar; 1986:24)

Kemajemukan disamping merupakan sumber konflik, juga merupakan sumber dinamika yang sangat diperlukan dalam memacu pertumbuhan masyarakat modern. Oleh sebab itu kemajemukan ini perlu diidentifikasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi potensi konflik laten di dalam penyelenggaraan negara bangsa. Kemajemukan sebagai sumber konflik timbul karena perbedaan tradisi, bahasa, hukum dan identitas sosial menyatu dalam kepentingan politik yang menjadi pemicu konflik, kecemburuan dan berbagai prasangka sosial dalam masyarakat. Pemakaian bahasa daerah tertentu dalam interaksi sosial terhadap kelompok etnis yang lain dapat sebagai ekspansi atau perluasan batas wilayah budaya pada etnis lain, demikian pula dengan penggunaan lambang-lambang budaya.

Perluasan batas-batas wilayah budaya ini dapat muncul dalam bentuk fisik, berupa perluasan pemukiman ke dalam kota atau pedesaan pada kelompok etnis lain, seperti transmigrasi atau perluasan wilayah budaya yang melampaui daerah sentral budayanya, seperti antar pulau yang berhadapan dengan benturan budaya, kepentingan politik, ideologi dan agama, konflik seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

Bertolak dari pengalaman masa lalu, maka masyarakat Indonesia sebagai komunitas nasional perlu membangun kualitas budaya yang sama dapat saling berkomunikasi, membaaur, serta hidup bersama dan bersatu hingga pada tingkat pribadi-pribadi dalam kehidupan di kota sampai di desa. Kemacetan komunikasi antar budaya, pembauran akan terjadi apabila ada pembedaan budaya, apalagi adanya anggapan keunggulan budaya pada etnis tertentu dibanding dengan etnis yang lain.

Dalam memelihara tegaknya negara kesatuan tidak cukup hanya dengan idealisme mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Masyarakat luas dalam berbagai

kesempatan selalu mempertanyakan manfaat yang diperoleh dari negara kesatuan. Oleh sebab itu di masa mendatang pemerintah Indonesia sudah bukan tempatnya lagi hanya menggunakan konsep-konsep abstrak untuk mempertahankan negara kesatuan dari ancaman desintegrasi bangsa, seperti demi kepentingan nasional, pengabdian terhadap bangsa dan negara, sebetulnya rakyat sudah jemu. Rakyat kecil sesungguhnya perlu realita atau bukti-bukti konkrit bahwa negara kesatuan sungguh-sungguh amat bermanfaat.

# IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA\*

Oleh: LAODE ABUBAKAR

## I. PENDAHULUAN

Perjalanan Bangsa yang bertanah air di Nusantara ini, apabila titik start dimulai dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 lampau hingga tahun 2002 dewasa ini, dikesani dari sisi waktu, maka 75 tahun yang telah dilewati itu seharusnya sudah menempuh jarak perdalanan yang panjang.

Namun kalau dilihat dari sisi pencapaian sesuatu yang dicita-citakan, ambillah "Kemakmuran dan Ketentraman hidup Bangsa" boleh dikatakan perjalanan Bangsa masih sebatas "jalan di tempat yang melelahkan".

Dari Sumpah Pemuda itu kita telah dibekali "Semangat Persatuan" berupa: Berbangsa satu, Bangsa Indonesia - Bertanah air satu, Tanah air Indonesia - Berbahasa satu, Bahasa Indonesia.

Dengan bekal Sumpah Pemuda itu kita melangkah lagi dan sampailah dijenjang "Gerbang Indonesia Merdeka".

Dirumah besar (Indonesia) namun masih kosong itu, kita berlega rasa karena telah menghirup udara kemerdekaan, sambil menatap yang terbaca "REPUBLIK INDONESIA" dan sebuah lambang "GARUDA PANCASILA" yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika".

Walau unsur "Budaya Indonesia" tidak disinggung secara jelas pada Sumpah Pemuda, namun kalau semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu disimak secara mendalam sesungguhnya "unsur Budaya Bangsa Indonesia" sudah tercakup pada Bhinneka Tunggal Ika itu.

Karena rumah besar Indonesia itu sudah ada dan kita sudah berada didalamnya, maka kita bertekad untuk

mengisinya dengan "wujud-wujud Budaya yang beridentitas Indonesia" agar dinikmati bersama, didukung bersama warga Bangsa dan hasil jerih-payah kita itu dapat menimbulkan rasa kebanggaan masyarakat Indonesia".

Kita berani mencanangkan cita-cita itu akan sukses karena : Rakyat Indonesia berjumlah besar - Bumi Indonesia, Sumber Daya Alam (SDA) nya cukup berpotensi - Rakyat Indonesia memiliki dinamika hidup yang tangguh - Rakyat Indonesia memiliki budaya warisan leluhur yang beraneka ragam dan berlimpah.

Para pendiri Republik ini telah menitip pesan bagi generasi penerus agar tetap mencintai rumah besar Indonesia itu sebagai milik bersama, memelihara dan mempertahankannya secara bersama-sama pula agar Bangsa Indonesia mencapai Kemakmuran dan Ketentraman hidup sebagaimana; yang dicita-citakan, Persatuan Bangsa Indonesia tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, memecahkan masalah yang dihadapi bersama senantiasa berdasarkan asas Musyawarah-mufakat dan didalam pergaulan masyarakat dunia, bangsa Indonesia berperan bebas aktif dan tetap tampil ber-kepribadian Indonesia.

Ketika Bangsa dan Negara dipimpin oleh Soekarno, bangsa Indonesia masih tetap bersatu, walau ada juga yang menggoda agar rumah besar Indonesia dipisah-pisah menjadi bagian yang banyak.

Karena didalam cara memahami "Indonesia yang bersatu" harus tetap sesuai dengan ikrar Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Bangsa diperjuangkan dengan upaya yang panjang dan penuh kesulitan, maka ketika bangsa Indonesia ditekan agar menanggalkan kepribadiannya dengan tegas Soekarno berprinsip : Lebih terhormat "Bangsa Indonesia" berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) dari pada makmur tetapi kembali dikuasai Imperialis.

Karena sebagian warga bangsa tidak sabar untuk menikmati Kemakmuran dan Ketentraman yang lebih segera, maka Soekarno yang dijuluki sebagai Pimpinan Orde-Lama disingkirkan dan digantikan Soeharto yang diperkenalkan sebagai Pemimpin Orde-Baru yang tampil menjanjikan Kemakmurn dan Ketentraman harus tercipta selama Orde-Barunya berkuasa.

Demikianlah rekaman pendek Identitas Bangsa kita dimasa kepemimpinan Soekarno selaku pimpinan Orde-Lama.

Bangsa Indonesia yang masih mengidap trauma pengkhianatan G 30 S/PKI, tetapi senantiasa merindukan Kemakmuran dan Ketentraman hidup, merasa terobati oleh pesona gaya Pembangunan yang diperankan Pemerintahan Orde-Baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Pada paruh awal pemerintahannya, bangsa Indonesia masih tetap pada pesona gaya pembangunan ala Orde-Baru.

Memasuki paruh berikutnya, bisul dan borok Kepemimpinan Orde-Baru mulai bermunculan secara beruntun mengejutkan Bangsa Indonesia, Karena - Sumber Daya Alam (SDA) yang semula diharapkan dapat menghidupi Bangsa dan Negara berkelanjutan, ternyata telah terkuras tidak bijak.

- Kesatuan Bangsa menggejalah mulal retak.
- Bangsa mulai kehilangan arah, karena semakin banyak penataran P4 disuapkan, semakin pudar dan luntur pula Kepribadian Bangsa.
- Ekonomi Bangsa dan Negara merosot tajam, tergadai utang yang sangat banyak.
- Kehidupan Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan Hukum dan Keadilan tidak terpadulikan lagi.
- Budaya bangsa terancam krisis

Apa biang semua kenyataan itu ? Jawabannya, karena Budaya dan Mentalitas Bangsa mengalami kemerosotan nilai yang parah selama Orde-Baru berkuasa.

Semua kenyataan yang dialami Bangsa dan Negara seperti itu, adalah merupakan "Krisis Budaya" yang oleh kalangan awam mcngenalnya sebagai "berkecamuknya dan simpangsiurnya perilaku dan pikiran yang mengancam rusaknya tatanan budaya hidup yang telah dimiliki Bangsa.

Sebenarnya kalau perobahan kebijakan dan pergantian Pemerintahan berlangsung sesuai norma-norma yang telah menjadi kesepakatan Bangsa, sesungguhnya kenyataan pahit seperti telah diketengahkan tidak perlu terjadi.

Tetapi karena Kepribadian dan Identitas Bangsa dipraktekkan berdasarkan setera Rezim Orde-Baru itu hanyalah sebagai topeng untuk menenangkan dan menyenangkan Bangsa pada sesaat saja dan menciptakan mentalitas yang "yes a men" "nrimo" dan "hura-hura" saja, maka sebagai hasilnya telah membuhkan "watak-perilaku dan daya serap Ilmu/pendidikan bagi Generasi penerus menjadi rusak.

Krisis Budaya yang melanda kehidupan/budaya Bangsa tersebut, ditandai oleh

1. Merebaknya praktek KKN diberbagai lini,
2. Berperannya sikap/praktek Otoriter dalam pemerintahan disegala tingkat.
3. Adaptasi Budaya luar, tidak disesuaikan dengan kebutuhan Kepribadian Indonesia.
4. Pemerataan sebaran Pembangunan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang sangat mendesak lagi tepat guna.
5. Keadilan, penegakan hukum, HAM cenderung diabaikan.
6. Pemangkasan Adat/Budaya yang berpihak pada rakyat dihalalkan secara sistematis.

Semua anasir-anasir tersebut terakumuler menjadi "biang Kesenjangan Sosial Ekonomi dan hilangnya rasa percaya rakyat terhadap Pemerintah dan lembaga-lembaga Pembuat kebijakan serta Pengaman Kebijakan yang dinilai sebagai produk-produk budaya Orde-Baru.

## II. Transisi Identitas

Kalau kita menelusuri perjalanan Bangsa sejak Indonesia merdeka (17 Agustus 1945) hingga masa kini, terkesan bahwa bangsa Indonesia masih tetap mempertahankan identitasnya sebagai Bangsa Indonesia berdasarkan apa yang terikrar pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 lampau.

Hanya saja didalam perjalannya itu, sebagai Bangsa yang baru merdeka, pasti menghadapi berbagai ujian menuju kedewasaanya dalam berupaya mewujudkan cita-cita Bangsa mencapai Kemakmuran dan Ketentraman hidup itu.

Identitas yang sangat hakiki adalah Kepribadian Indonesia yang berlandaskan Pancasila Undang Undang Dasar 45 dan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Dimasa kepemimpinan Soekarno (diidentikkan sebagai Pimpinan Orde Lama), sejak memulai langkahnya memimpin Negara dan Bangsa, telah menghadapi masalah-masalah yang berat karena disatu sisi harus berupaya memperkokoh persatuan bangsa, disisi lain berupaya mewujudkan cita-cita "Kemakmuran dan Ketentraman Hidup Bangsa".

Didalam perjalanannya mengantarkan Bangsa dan Negara, ia menghadapi tekanan-tekanan baik dari dalam, maupun dari luar. Dari dalam antara lain keinginan sebagian Bangsa agar menikmati Kemakmuran sesegeranya, pada hal, kondisi Negara dan Bangsa masih serba minim. Dari luar, pihak penjajah belum ikhlas melepaskan kekuasaannya, sehingga Indonesia harus diganggu supaya Bangsa dan Negara tetap kacau, lalu dijajah kembali, minimal ingin mengendalikan kebijakan yang diambil oleh Bangsa dan Negara melalui pimpinan Negara.

Didalam sikon yang serba sulit, dan karena Soekarno melihat masih ada potensi yang dipegang teguh oleh Bangsa

Indonesia yakni "Kepribadian Indonesia", maka menghadapi ujian dari dalam dan luar itu, dengan jiwa besar dan nyerempet-nyerempet bahaya, telah mencanangkan berbagai kebijakan antara lain : Dekrit Kembali ke UUD 45, menciutkan Partai-partai lalu menempatkan partai-partai didalam wadah NASAKOM (kelompok Nasionalis, Agama dan komunis), Demokrasi Terpimpin; Ekonomi terpimpin; berviveri vericoloco - Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri); bahkan dengan tegas mengaiak negara negara yang telah bebas dari penjajah agar membentuk kekuatan baru sebagai Bangsa-bangsa Dunia ke 3.

Bangsa Indonesia dimasa kepemimpinan Soekarno, benar-benar didalam posisi tidak menentu (berani tetapi cemas). Kelompok aliran komunis tidak sabaran lalu mengkhianati Bangsanya, melakukan gerakan yang kita kenal sebagai G 30 S/PKI pada tahun 1965.

Karena Bangsa Indonesia masih tetap memiliki rasa kesatuan dan Persatuan, maka dengan dipelopori ABRI dibawah kendali Soeharto selaku Pangkostrad, Bangsa Indonesia berhasil menumpas PKI sampai keakar-akarnya.

Sebagai penyelamat Bangsa dan Negara, Soeharto dipercayakan Bangsa sebagai Pemimpin Bangsa dan Negara sekaligus Pemimpin Orde Baru.

Bangsa Indonesia yang mengidap trauma dan masih jauh dari sikon yang makmur kembali bersemangat lagi setelah Soeharto mencanangkan Kemakmuran dan Ketentraman Bangsa dan Negara selama kekuasaan masih dalam genggamannya.

Selama paruh pemerintahannya yang awal, dengan gaya kepemimpinan Orde Baru yang diterapkannya, melalui PELITA demi PELITA terkesan ada tanda-tanda sukses mengantarkan Bangsa dan Negara menuju tercapainya cita-cita yang telah lama dirindukan. Hal itu dapat dibuktikan dengan sebaran-sebaran proyek-proyek mulai dari proyeck wc.

Rakyat di desa-desa sampai pada gedung, pabrik / industri, proyek tambang dan waduk / irigasi yang belum pernah dikesani rakyat di masa Pemerintahan Orde Lama. Lapangan kerja terbuka, kesempatan belajar terbuka selebar-lebarnya, publikasi melalui media cetak dan elektronik melegakan masyarakat sampai di pedesaan.

Yang lucu menurut kesan rakyat, adalah demokrasi dipasung dimulai dari penciptaan 10 partai menjadi hanya 3 partai, HAM, Marginalisasi, Keadilan dan Penegakan Hukum mulai terabaikan. Pada paruh pemerintahannya yang berikut, rakyat mulai terkesan oleh gaya kepemimpinan yang bukan lagi memakmurkan dan berpihak kepada Rakyat, tetapi telah terkesan munculnya penindasan, perampasan hak rakyat malah hak asasi manusia, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ketidakpastian hukum, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, arogansi Aparat Pemerintah / ABRI / Penegak hukum dan merosotnya moralitas.

Praktek KKN, Penyalahgunaan Jabatan, merebaknya bisnis keluarga / Anak Pejabat yang merambat sampai kedesa-desa, bagai mode Orde Baru yang jelas-jelas diperagakan tanpa malu-malu mulailah muncul kecurigaan, sikap tidak puas, mengkritisi perilaku yang telah menyimpang dari etika dan kepribadian Bangsa dan penafsiran Pancasila dan berbagai ketentuan Hukum berdasarkan interaksi masing-masing pribadi atau golongannya. Borok dan bisul yang di tutup-tutupi Orde Baru tidak lagi mampu dikemas secara rapih, maka terbongkalah setelah terjadi "Krisis monoter" yang satu per sata muncul berbentuk krisis-krisis lain. Kalau diurung balik, biang dari segala krisis itu terpulang juga pada krisis Budaya Kepribadian Bangsa yang rapuh dan Mentalitas yang bobrok.

Pada hakekatnya terbongkarnya gaya pemerintahan Orde Baru yang telah merusak citra Bangsa seperti yang dialami pada akhir-akhir ini, adalah merupakan kerja keras

Gerakan Reformasi yang dipelopori kalangan Mahasiswa dan kalangan warga Bangsa yang masih memiliki kepedulian terhadap utuhnya kepribadian/identitas bangsa dan tegaknya kesadaran untuk memelihara terhadap utuhnya kepribadian dan identitas Bangsa dan tegaknya kesadaran untuk memelihara Pancasila dan Harkat serta Martabat Bangsa.

Setelah gaya hidup dan Kebijakan ala Orde Baru dipangkas, maka nasib bangsa dan Negara beralih ditangan Pemerintah Reformasi dan Generasi Reformasi.

Karena gelagat pola pikir dan bertindak Bangsa masih tetap konsisten pada Kepribadian Bangsa Indonesia, Pengamalan Pancasila dan UUD 45, maka kita tunggu dan lihat bagaimana Bangsa dan Negara ini akan ditata menuju pencapaian cita-cita kemakmuran dan ketenteraman Bangsa kita kedepan.

### **III. KONFLIK DAN KEKERASAN**

Sangat ironis sekali, pada saat Rezim Orde Baru memulai debutnya pada tahun 1966 berkuasa di Negara Pancasila ini, suara gegap-gempita mengumandangkan untuk memakmuran dan menciptakan ketenteraman Bangsa dan Negara, setelah 32 tahun kemudian, secara mengejutkan ternyata Bangsa yang penuh harap telah digiring kelembah penderitaan.

Bagi Penguasa Orde Baru mulai dari tingkat atas sampai ketingkat bawah termasuk kelompok-kelompok loyalisnya, pasti telah menikmati kemakmuran itu walau realitas pada setiap tingkatan tentu berbeda-beda. Tetapi pada realitas ketenteraman sebagaimana yang diharapkan, masalah inilah yang meresahkan.

Bagi sebagian besar Bangsa Indonesia, justru mengalami yang sebaliknya. Kecuali penderitaan yang langsung dirasakan sehari-hari, ternyata Rezim Orde Baru

telah menggadaikan aset Bangsa dan Negara yang cukup besar, sehingga untuk melunasi utang luar negeri tersebut, Bangsa Indonesia terbebani tekanan mental yang berkepanjangan.

Kalau kita kembali mengenang berbagai konflik dan kekerasan berdarah berbagai Kota/Daerah di Indonesia yang merebak menjelang dan sesudah Soeharto lengser (Juni 1988), terjadinya konflik - konflik itu boleh dikatakan motif sama yakni Kesenjangan Sosial Ekonomi yang kronis dan akumulatif yang terkemas oleh faktor-faktor Etnis dan Agama.

Konflik - konflik berdarah yang terjadi dimasa-masa akhir kekuasaan rezim Orde Baru, bahkan ada beberapa konflik hingga kini belum terselesaikan adalah :

1. Konflik di Sumbawa : antara penduduk orang Sumbawa dengan penduduk orang Bali, Peran Ekonomi, hampir semuanya dikuasai oleh Orang Bali.
2. Konflik Kupang (NTT) : Antara penduduk asli Timor dengan WNI Cina. Karena siapa saja pendatang yang berpotensi seperti Cina, maka orang Buton, Bugis, Makassar, Jawa dijadikan pula sasarannya.
3. Konflik di Medan : Antara pribumi dengan Cina/Non Pribumi. Pihak Non Pribumi menguasai porsi ekonomi terbesar, sementara pribumi memperoleh rezeki sisa dari Non Pribumi.
4. Konflik di Jakarta : Antara Pribumi dengan Non Pribumi ( WNI Cina Walau secara kuantitatif Pribumi relatif mengimbangi Non Pribumi,namun porsi rejeki besar tetap pada Cina

5. Konflik di Ambon : Berawal antara orang Ambon Kristen dengan orang pendatang dari Buton-Bugis Makassar (BBM) berkelanjutan dengan orang Ambon Islam dijadikan sasaran pula. WNI Cina walau menguasai ekonomi, namun tidak dijadikan sasaran. Karena pada umumnya beragama Kristen.
6. Konflik di Maluku Utara : Antara Penduduk asli ( kultur Tidore ) dengan penduduk asli ( kultur Ternate ). Sumber konflik pada lokasi tambang pendulangan emas.
7. Konflik di Sambas : Antara penduduk asli Dayak dengan pendatang dari Madura. Orang Dayak dimarginalkan ditanah leluhurnya.
8. Konflik di Poso : Antara penduduk asli beragama Kristen dengan yang beragama Islam. Penduduk yang Kristen termarginalkan.
9. Konflik di Pontianak : Antara pendatang orang Madura dengan orang Dayak. Orang Melayu dan Cina (lama). Kelompok orang Dayak, Melayu dan Cina dimarginalkan.

Dari semua konflik tersebut, peran provokator secara diam-diam dan rapih serta ampuh, menyulut api konflik yang cepat dan luas jangkauannya.

Bila ditelusuri, munculnya kesenjangan Sosial Ekonomi yang menimbulkan konflik kekerasan yang berlangsung secara sistimatis dan cenderung terorganisir itu, pada dasarnya berpangkal dari pertentangan nilai Orde Baru yang tetap

bertekad mempertahankan status-quo dengan kelompok Reformasi yang pro Demokratisasi dan anti KKN.

Kelompok pro Status - quo mengeksploitasi kerusuhan-kerusuhan dengan tujuan menggagalkan pemilu dan menciptakan disintegrasi Sosial-Budaya dan Nasional

Kelompok-kelompok radikal, baik secara pro Status-quo maupun Reformasi menggunakan isu SARA, utamanya Etnis yang merupakan Artibut Jati diri Bangsa dan Agama berpotensi Universal, Kedua atribut tersebut merupakan senjata ampuh-untuk mengobarkan semangat / api kerusuhan.

Walau konflik disetiap daerah / Kota saling berbeda namun prosesnya hampir sama antara lain :

1. Ada gejala membangun superiority untuk menundukkan pilhak lain baik pada sisi Sosial Budaya, Maupun dari sisi Ekonomi. Prosesnya berlangsung merupakan menguasai ketidak berdayaan kelompok agar tidak muncul kesetaraan, atau dapat juga terjadi sebagai proses memarginalkan masyarakat minoritas/lokal
2. Pada posisi transisi, ada masyarakat, hidup dengan budaya paternalistik, sementara pihak lain sedang terjadi perubahan modernisasi dan reformasi. Situasi ini menimbulkan pertentangan norma bahkan ketegangan di saat ada desakan proses keterbukaan dan kebebasan.
3. Kegamangan Reformasi yang berupa ide-ide kebebasan, demokratisasi, transparansi yang tumbuh di dalam Reformasi sekarang ini mendorong kebebasan membetulkan kesalahan penyimpangan sesual cara / capaiannya, yang sudah tentu tidak seluruh harus demikian itu realisasinya .
4. Kekurang mampuan aparat Pemeritah menjabarkan semangat Reformasi yang sedang muncul dan berkembang sehingga dalam menginformasikan perubahan yang terjadi keberpihakan opini yang menimbulkan sikap berseberangan antar pihak-pihak yang merasa terlindungi

dengan pihak yang merasa tertekan terhadap situasi yang berkembang.

5. Adanya gejala - gejala moral dan etik, HAM dan harkat-martabat menurut Adat/Hukum tidak secara nyata ditegakkan.
6. Rasa termarginalkannya kelompok minoritas/lokal sehingga berlindung pada atribut Etnis Agama.

Menganalisa konflik kekerasan yang terjadi diberbagai Kota/ Daerah pada akhir-akhir ini, pada dasarnya bukanlah karena masing-masing kelompok/Etnik ingin menegakkan Superioritas Etnis/Kelompok, atau usaha memisahkan diri dari kehidupan majemuknya.

Kesimpulan yang di dapat adalah, bentrokan yang berwujud keras bahkan pertumpahan darah serta kerusakan materi itu adalah merupakan "protes budaya" terhadap ketidakadilan, kecurangan dan penindasan yang mereka alami.

Juga bisa disimpulkan-perlakuan pembedaan itu secara tidak langsung dianggap sebagai pembersihan /pelenyapan Etnis mereka, yang dianggapi sebagai pelanggaran kesepakatan bersama para pendiri Negara misalnya pada saat Negara butuh partisipasi Etnis tersebut , aparat Negara/Pemerintah memperlakukan dengan hormat, setelah ada masalah/kasus yang dikeluhkan ternyata aparat bersikap Acuh tak Acuh ( tidak peduli ).

Dengan demikian dapat disimpulkan lagi, bahwa konflik berdarah yang terjadi merupakan petunjuk kuat agar tercipta hancurnya tata sosial majemuk yang ada serta tuntutan untuk menciptakan tatanan sosial yang berasas atas dasar saling menghormati, hidaritas dan memelihara.

#### IV. REPOSISI TERHADAP ADAT / TRADISI

Salah satu peranan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terukir pada lambang Garuda Pancasila kita adalah untuk mengingatkan setiap warga Bangsa bahkan siapapun juga agar memahami keberadaan Bangsa Indonesia yang berbeda-beda Etnis namun tetap menjadi satu.

Bahasa Indonesia yang merupakan milik bersama, kelompok-kelompok etnisnya tersebar diseluruh Nusantara itu masih memiliki pula Bahasa Ibu masing-masing yang patut diakui semua pihak sebagai wujud Budaya Bangsa Indonesia. Pemahaman hakekat Bhineka Tunggal Ika itu, mencakup pula seluruh Budaya yang diwariskan para leluhur yang bertanah air di Nusantara ini.

Berbicara tentang Adat dan tradisi, ada satu yang patut disesalkan pada saat Pemerintahan Orde Baru berkuasa yakni : menyebelahkan peran adat/tradisi bahkan memarginalkan Masyarakat Adat. Penyesalan itu sangat beralasan sekali, karena Masyarakat Adat Orde Baru mengidentikkannya sebagai "Orang Primitif" Masyarakat Terasing" Masyarakat Perambah Hutan " dan lain-lain . Secara tersirat, dari berbagai sebutan itu, kalangan masyarakat adat merasa di " Anak Tiri " kan oleh Negara.

Begitu juga sempitnya daya nalar Pemerintah Orde Baru sehingga memandang peranan Adat dan Tradisi itu hanya sebatas atribut rakyat pedesaan manakala menyelenggarakan perkawinan adat ataupun upacara panen dan lain-lain.

Padaahal kalau direnung-pikirkan secara arif, rumusan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia itu adalah bersumber dari adat dan nilai-nilai tradisi Nusantara, bukan adat/tradisi Bangsa Amerika, Afrika atau Eropa.

Secara implisit, peranan adat dan tradisi mengatur tertib-tertib perilaku manusia mulai pada saat dilahirkan di muka bumi ini, sampai setelah manusia itu mengalami mati.

Untuk melihat berapa besarnya peranan adat dan tradisi untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman masyarakat, berikut ini dihadirkan beberapa contoh

a. Adat dan tradisi untuk memelihara dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Masyarakat-masyarakat pesisir di kawasan Indonesia bagian Timur mengenal " Adat Sasi " yakni memungut / Memanen hasil ( utamanya hasil laut ) hanya diperbolehkan pada masa tertentu. Ketentuan teradatkan itu, dimaksudkan agar aneka biota laut ( utamanya hasil laut yang dimaksud ) pada saat pelarangan itu dapat ber-reproduksi sehingga jenis-jenis hasil laut tersebut dapat berkembang - biak lagi dan lingkungan habitatnya tidak rusak. Karena biasanya hasil laut yang dipungut / dikumpulkan memilih yang telah mencapai ukuran ( besarnya memenuhi syarat ) maka hasil laut yang masih kecil berpeluang tumbuh lagi secara alami. Kearifan adat/tradisi itu ditaati/dihormati oleh seluruh masyarakatnya. Setelah Pemerintah mengeluarkan surat izin mengumpulkan hasil laut, berdasarkan kekuasaan yang dilimpahkan Negara, maka pemegang izin mengumpul hasil laut sekehendak hati tanpa peduli ketentuan-ketentuan adat setempat.

Karena kearifan Adat/Tradisi telah diabaikan, maka kenyataan yang terjadi hasil laut setempat telah punah dan lingkungan menjadi rusak. Kita bertanya siapa yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Rakyat yang memegang teguh adat, atau Warga Bangsa yang moderen itu.

b. Contoh lain : Di suatu Desa, Pemerintah Orde Baru menunjuk seorang ABRI menjadi Kepala Desa. Demi suksesnya pelaksanaan Perintah dari atas, sang Kepala

Desa melaksanakan perintah tersebut tanpa menghiraukan kearifan adat setempat maka rusaklah tatanan Sosial Ekonomi di Desa itu. Rakyat bertanya dalam hatinya, sudah beginikah pemerintah membangun Desa dan masyarakat kami ? contoh lain lagi :

- 1) Ketika Sang Ayah masih menjadi murid sebuah SD dimasa Orde Lama, masih diajarkan mata pelajaran Budi - Pekerti. Waktu itu belum ada mata pelajaran matematika, namun berhitung masih bisa diselesaikan diluar kepala. Akhlak murid masih cukup baik. Ketika Sang Murid tadi menjadi Ayah dari Anaknya, Sang Anak yang telah menjadi Murid Sekolah di masa Orde Baru, Sang Murid itu tidak lagi memiliki sopan-santun, akhlaknya rusak, bodoh dan b

Contoh tersebut sebagai salah satu kenyataan betapa suramnya masa depan anak Bangsa ketika tidak lagi mengenal Adat Sopan - Santun dan tradisi-tradisi yang hidup di lingkungannya.

Sebuah pengalaman sebagai penggambaran tatanan masyarakat Bangsa yang tidak lagi menghormati Adat/Tradisi kehidupan yakni terjadinya berbagai konflik kerusuhan berdarah yang sangat mencoreng wajah kepribadian Bangsa Indonesia. Kejadian yang sangat menyedihkan itu, sedikit banyaknya karena peranan Adat dan Tradisi kehidupan masyarakat telah diabaikan .

Untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut ternyata, nanti setelah ada turun tangan pemuka-pemuka Adat setempat barulah dapat diredakan, karena masyarakat yang menghormati Adat Istiadat dan tradisi kehidupannya, tidak takut bedil, makna adat istiadat warisan leluhurnya dicemarkan (tidak dihormati).

Sampai kapan petinggi-petinggi pembuat dan pelaksana kebijakan di Negeri ini untuk memahami bahwa

peranan Adat dan Tradisi -Tradisi masyarakat masih sangat dibutuhkan guna memantapkan kepribadian Bangsa Indonesia.

Kalau benar-benar segenap warga Bangsa ini menyikapi peran Adat/Tradisi Nusantara ini secara bijak dan arif, barangkali masih lebih banyak kadar baiknya Adat / tradisi itu. Dipelihara dan diamalkan, ketimbang adat / tradisi itu di kuburkan lalu masyarakat adatnya dimarginasikan.

Karena Bangsa Indonesia kini berada di Era Reformasi, maka sudah selayaknya berbagai Adat dan Tradisi yang berlimpah ruah di Nusantara ini, digali kembali, dihimpun, dipilah-pilah, ditapis, sehingga diperoleh hasilnya : Adat dan Tradisi-tradisi yang masih baik dan di butuhkan bagi pembangunan Bangsa dan Negara, supaya diambil, dilestarikan serta diamalkan sebaliknya Adat/Tradisi yang tidak cocok dengan perkembangan zaman, tidak perlu diamalkan, tetapi secara bijak, dipelihara pula sebagai bukti kekayaan Budaya Bangsa dengan berbagai cara-cara pelestariannya.

Yang sangat mendesak bagi Bangsa Indonesia untuk memposisikan Adat/Tradisi itu untuk diarahkan pada pembangunan Bangsa dan Negara adalah :

1. Mencari kebijakan dan kearifan Adat di Nusantara ini untuk tidak membiarkan, Budaya KKN merebak lebih luas, bahkan dilenyapkan secara tuntas.
2. Mencari resep dari peran Adat masyarakat Nusantara, agar aparat di berbagai Instansi dapat berwibawa ( tidak berwatak korup)
3. Mewujudkan kembali Adat/Cara-cara memelihara lingkungan dan sumber daya alam sehingga penggarapannya dilandasi nilai-nilai kearifan.
4. Mencari resep pembentukan Budi Pekerti generasi muda dari peranan Adat di samping peran Agama.
5. Mencari tambahan ramuan dari Adat/Tradisi untuk penyempurnaan kepribadian Bangsa.

Upaya kearah me-reposisikan Adat/Tradisi tersebut barangkali sudah saatnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Otonomi Daerah mengambil inisiatif nyata dengan mengikutsertakan Budayawan, sosiolog, antropolog tokoh masyarakat mencari penyelesaian dari sisi Budaya bagi penyakit yang dialami Bangsa.

## **V. PENUTUP / KESIMPULAN**

Kalau perjalanan Bangsa Indonesia dipersonifikasikan sebagai " Bahtera Indonesia " yang berlayar menuju pulau yang dicita-citakan, katakan saja Bahtera Indonesia yang semula hanya sekali berlayar, pulau yang dicita-citakan itu sudah dicapai, ternyata karena berbagai halangan harus ditempuh beberapa Etape yakni

**"ETAPE PERTAMA, kita sebut saja GENERASI PENGANTAR INDONESIA MERDEKA**

"Bahtera Indonesai" itu ber-awak-an Warga Bangsa, ada yang berperan sebagai awak bahtera dan ada sebagai pelambang. Sesuai konsensus bersama dilayarkan itu, belum lengkap sebagai nahkoda adalah Soekarno. Bahtera yang dilayarkan itu belum lengkap persiapannya, selain bekal ikrar Sumpah Pemuda dan " Kepribadian Indonesia " yang identitasnya adalah : Jati - diri ( Bhineka Tunggal Ika )- Tekad bersatu yang teguh tetap bersemangat mencapai cita-cita Bangsa ". Dengan bekal itulah Soekarno yang tadi percaya sebagai Nahkoda mengarahkan Haluan bahtera, sekalipun Bahtera di hadang badai dan gelombang dan bentang karang yang menghalang.

Salah satu ciri kepribadian Bangsa Indonesia adalah Rakyat harus tunduk pada " Pimpinan Panutan ". Dikala Bahtera menghadapi badai - gelombang, ternyata sejumlah manusia ( awaknya dan penumpang ) kerdil kepribadiannya, sehingga berbagai pendapat muncul menjadi penghambat,

apalagi di antara penumpang telah ada yang memaksakan keinginannya. Agar persatuan Bangsa tidak pecah, maka Soekarno sebagai Nahkoda Bahtera memilih jalan terbaik adalah membuat Super Semar.

Pada Etape pertama itu tersimpulkan : Kalau kita menginginkan Bangsa dan Negara Republik Indonesia tetap utuh bersatu, maka itulah salah satu wujud kepribadian Bangsa Indonesia.

Walau Bahtera Indonesia di hadang berbagai cobaan, toh Bahtera itu sampai juga di pantai yang aman dan terhindar dari " Ancaman Tenggelam "

ETAPE KEDUA, kita sebut saja GENERASI PENGEMAS INDONESIA MERDEKA.

Bahtera Indonesia kali ini menumpang lebih banyak lagi, karena Bangsa Indonesia tidak sabaran lagi dan mendesak terwujudnya cita-cita Bangsa itu segera tercapai, tidak ingin lebih lama hidup dalam penderitaan. Apalagi Soekarno yang mendapat kepercayaan selaku Nahkoda telah berjanji akan mewujudkan cita – cita Bangsa selama Pemerintah Orde - Baru berada di tangannya. Seluruh Warga Bangsa percaya dan terpesona, apalagi tanda-tanda kemakmuran dan ketentraman itu telah di buktikan pada paruh awal kekuasaannya. Setelah pelayaran memasuki paruh berikutnya, gejala-gejala yang tidak beres bermunculan pada Bahtera Indonesia antara lain: Bahtera mulai bocor dan kian bertambah parah. Persediaan bekal telah dihabiskan koki dan orang - orang dekat dapur, malah sejumlah tikus tidak malu - malu berlagak seperti juru masak. Layar sobek, malah tidak ditambal, dayung dan gala dipotong dijadikan kayu api, kemudian dipreteli agar haluan Bahtera tidak menentu. Malah tali temali yang ada, atas perintah Sang Nahkoda digunakan untuk menjerat / mengikat siapa saja diantara penumpang Bahtera yang berani bersuara memberi saran, teguran yang bertujuan demi kebaikan dan keselamatan Bahtera dan semua

penumpang. Pendek kata, siapa saja menghalang keinginan Nakhoda dan awak Bahtera akan ditindak bahkan bila perlu di buang kelaut.

Suasana yang sesungguhnya tidak perlu terjadi, namun juga, para penumpang yang masih memegang teguh rasa persatuan dan tetap memiliki kepribadian Bangsa menggalang kebersamaan berperan selaku Reformis supaya terbangun rasa kesadaran bersama. Demikianlah suasana pelayaran Bahtera Indonesia pada Etape ke - 2.

Apa yang kita temukan pada Etape tersebut adalah Pancasila sebagai Pedoman, Bhineka Tunggal Ika di robek - robek. Keserakahan menjadi-jadi, HAM dan Keadilan terabaikan, pikiran-pikiran yang baik tergubris, dan nilai-nilai Budaya Bangsa dinodai.

Kalau pada pelayaran etape pertama Kepribadian Bangsa dan Rasa Persatuan itu terkesan ada dan dimiliki, maka pada etape kedua, terkesan sudah luntur dan pudar. Para Reformis memaksakan agar Bahtera diarahkan pada pulau terdekat untuk mengatur formasi langkah terbaik agar pada Etape berikutnya menuju sasaran pencapaian cita-cita bangsa, pelayaran sudah muncul, rapih penuh gairah.

ETAPE KETIGA, kita sebut saja GENERASI PENG-UTUH INDONESIA MERDEKA.

Sebenarnya, andai pelayaran pada etape kedua berlangsung dengan baik, tidak perlu lagi ada etape ketiga. Artinya pelayaran etape ketiga itu menjadi etape kedua, sehingga jarak waktu untuk mencapai cita-cita bersama itu lebih segera.

Kini Generasi Peng-utuh Indonesia Merdeka, tengah sibuk membenahi dan memperbaiki Atribut Bahtera yang perlu diperbaiki, dan berbagai perlengkapan yang diperlukan pada pelayaran etape berikutnya.

Karena seluruh warga bangsa menghargai jasa-jasa Gerakan Reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto

sebagai Nahkoda Orde Baru, dimana Gerakan Reformasi itu tengah dilaksanakan disegala bidang, maka sudah selayaknya kita titik pikiran guna melengkapi hasil kegiatan Gerakan Reformasi antara lain:

1. Tanpa kita disadari, pemahaman dan arti "Kepribadian Bangsa" yang beridentitas Indonesia itu dewasa ini menggelajah luntur dan pudar, sehingga bila atribut itu, disandangkan kepada pejabat, terkesan dimata rakyatnya, pejabat itu tidak memiliki Kharisma dan wibawa. Adakah bangsa Indonesia belum berpikir untuk menyepuh kembali kepribadian yang luntur itu dengan resep-resep Nusantara yang mengendap pada Adat Leluhur ?
2. Untuk menghambat penggarapan Sumber Daya Alam (SDA) semena-mena, pengrusakan lingkungan yang tidak bermoral, sudah perlu dipikirkan pemberlakuan Adat "Tana Kaombo" ( hutan larangan) di Nusantara ini, karena peraturan Hutan Larangan yang diciptakan Pemerintah (Orde Baru) tetap saja dilanggar oleh pihak pemegang Izin Pengolahan Hasil Hutan. Hal yang sama Pemerintah perlu memberlakukan "Adat sasi" untuk pengumpulan hasil Laut, hanya pada masa-masa tertentu agar Biota Laut tertentu disuatu kawasan dapat ber-reproduksi dan ber-regenerasi secara alami.  
Kenyataan yang berlaku selama Pemerintahan Orde Baru, siapa saja memiliki Izin Pengumpulan Hasil Laut, seenaknya saja menggarap Sumber Daya Alam karena Izin telah diberikan Pemerintah. Masih banyak lagi kebijakan dan kearifan masyarakat adat, yang kurang atau sengaja tidak dipikirkan oleh Pemerintah, padahal yang sepele itu merupakan biang rusaknya tatanan sosial ekonomi Bangsa.
3. Pemerintah Orde-Baru menghimbau masyarakat agar "menciptakan kerukunan" "kebersamaan" "kesatuan dan persatuan" atau "menciptakan yang bermoral", Aneh dan

lucu, karena ciri-ciri yang perlu dipanuti dari pihak yang menghimbau itu, tidak dikesani oleh masyarakat.

Barangkali sudah saatnya Gerakan Reformasi memelopori penggalian Adat/Tradisi masyarakat Nusantara untuk melengkapkan Kepribadian Bangsa Indonesia.

Rakyat diwilayah Sulawesi Tenggara, bahkan Bangsa Indonesia perlu mengangkat dan mengamalkan Falsafah Hidup Masyarakat Buton "Binci-binciki Kuli" ( artinya "cubitlah diri sendiri, sebelum mencubit orang lain) maksudnya kalau sesuatu dirasakan oleh diri, maka rasa seperti itu dirasakan pula oleh orang lain, jika demikian supaya tercipta rasa rukun, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, janganlah memberi kesan buruk terhadap sesama manusia.

Didalam kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan dan kepentingan apa saja, pelaksanaannya dijabarkan dalam kenyataan dan sikap dan perilaku dan perisara :

1. POMAA MAASI AKA                      sayang menyayangi. Yang tua menyayangi yang muda, atasan menyayangi bawahan, yang kuat menyayangi yang lemah.
2. POANGKA ANGKA TAKA              Hormat menghormati. Yang muda menghormati yang tua, Bawahan menghormati Atasan.
3. POPIA PIARA                          Pelihara                      memelihara, Lindung                      melindungi, menggalang                kesetia-kawanan.
4. POMAE MAEKA                        Taat mentaati terutama dalam masalah Hak dan Kewajiban.

Falsafah hidup Binci binciki kuli dan keempat sila penjabarannya itu, merupakan pegangan tata krama masyarakat Buton yang telah diamalkan sejak 6 Abad lampau hingga kini dan seterusnya, karena telah terbukti, walau masyarakatnya terdiri beraneka Etnis dan beraneka bahasa, namun tetap merasa satu, tetap rukun, merasa senasib, berbaur dalam keragaman.

Akhir perjumpaan ini saya sampaikan sebuah pesan leluhur:

**" KENIAKEA MPU ADATI, MAMUDAACA INDA U MAEA TEE U PEKAEA "**.

Artinya : Pegang teguhlah Adat, agar tidak dipermalukan dan mempermalukan.

# KONSEP POLITIK DAN STRATEGI KEBUDAYAAN INDONESIA “ IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA “

oleh: **Drs. Timoteus Nusan**

## **PENGANTAR**

Suatu kenyataan yang perlu kita sadari bahwa keanekaragaman kebudayaan yang ada di negara kita Indonesia, merupakan modal bangsa yang harus tetap dipelihara dan dikembangkan.

Bangsa Indonesia telah memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai pengikat kemajemukan tersebut, yang disadari sebagai salah satu jati diri bangsa dan menjadi salah satu modal pembangunan bangsa Indonesia.

Kemajemukan atau heterogenitas budaya dan ratusan suku bangsa mengandung kekuatan dan keindahan, sehingga kebhinekaan yang sudah ada harus dibina, dipelihara dan dikembangkan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia pada dasarnya dibangun oleh tiga dasar yang dominan yakni nilai religius, nilai solidaritas dan nilai estetika. Dengan kesamaan nilai tersebut, seyogianya memudahkan proses penyesuaian dan pembauran budaya maupun suku-suku bangsa yang sangat beranekaragam (heterogen)

Suku-suku pendatang yang ikut mendiami pulau Kalimantan harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya daerah setempat, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Kalimantan. Dengan demikian bagi pihak pendatang berlakulah pepatah lama, yang mengatakan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”.

Kebudayaan daerah yang didalamnya terdapat kebudayaan-kebudayaan suku bangsa, yang masing-masing mempunyai ruang batas toleransi yang diatur dalam norma sosial, dan ketentuan hukum adat, agar kita menyadari kedudukan dan peranan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu diingatkan bahwa sebagai pendukung kebudayaan daerah setempat yang saling berhubungan dengan daerah lain dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan simbol-simbol kebudayaan daerah lain, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terancam.

Dengan mencermati hal tersebut diatas, maka perlu adanya dialog antar warga masyarakat Indonesia, sehingga terbangun rasa kebersamaan dalam perbedaan untuk membangun bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Kemajemukan budaya yang ada di Indonesia ini tidak merupakan sumber konflik, akan tetapi diharapkan menjadi kekuatan untuk menangkal disintegrasi dan sebagai modal bangsa untuk menutup dan mempersempit keterbelahan atau keretakan bangsa. Keragaman budaya sebagai faktor penentu bersemangat masyarakat, berbangsa dan bernegara, harus dijadikan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan bermodalkan keragaman budaya akan membawa dan mewujudkan integrasi serta persatuan nasional yang semakin kuat dan tangguh, baik masa kini maupun untuk masa yang akan mendatang.

Dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 menyebutkan: "Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya sebagai kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di Indonesia adalah sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat

memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Kebudayaan pada hakekatnya adalah perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti yang luas. Oleh karena kebudayaan merupakan pola pembelajaran dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Wujud kebudayaan dapat berupa tingkah laku, peralatan benda-benda dan gagasan atau nilai budaya.

Kebudayaan Indonesia adalah penjelmaan rasa kebersamaan bangsa Indonesia yang menghuni kepulauan Indonesia. Kebhinekaan budaya dalam kebersamaan adalah bertolak dari pengakuan adanya pluralisme budaya Indonesia. Dalam hubungan ini, kebudayaan dianggap sebagai perekat kehidupan bersama, bukan karena persamaan kepentingan (common interest) sesaat belaka, melainkan dorongan untuk mendapatkan persamaan nilai-nilai dasar (shared basic value) sebagai kerangka acuan perilaku dalam kehidupan bersama itu.

## **“ IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA ”**

### **A. TRANSISI IDENTITAS**

Identitas dan ciri khas masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah dengan mata pencaharian dengan sistem perladangan. Kegiatan perladangan ini dengan cara membuka lahan tempat bercocok tanam, sekaligus berkebun dengan cara tumpang sari. Padi dan sayur-sayuran ditanam secara serempak.

Kegiatan ladang berpindah ini sudah secara turun temurun dilaksanakan. Secara umum dapat dimaklumi bahwa kegiatan ladang berpindah tidak memperlihatkan dampak lingkungan yang signifikan; masyarakat adat Dayak sudah tahu dan mengerti tentang cara membakar hutan yang tidak merembes kemana-mana. Lokasi perladanganpun sudah

dipilih secara selektif dan mereka sangat patuh kepada aturan dan adat yang berlaku di desa dimana mereka tinggal.

Masyarakat adat Dayak Kalimantan tidak pernah memabat hutan secara membabituta. Mereka tahu persis dimana yang diperbolehkan dan dimana yang tidak diperbolehkan. Sifat dan cara pengerjaan ladang berpindah ini dilakukan dengan cara yang cukup unik, yakni melalui pranata agama, sesuai dengan keyakinannya.

Kegiatan matapencaharian perladangan ini dilakukan dengan tolong menolong dan ini pertanda hubungan kekeluargaan yang erat dalam masyarakat adat Dayak Kalimantan.

Kegiatan tolong menolong ini berbentuk gotong royong. Kegiatan gotong royong ini telah berkembang sejak masyarakat Dayak mengenal hidup berkelompok bersama-sama mendiami sebuah Rumah Besar yang disebut "Betang" dimana dihuni oleh beberapa keluarga. Kegiatan tolong menolong dalam bentuk gotong royong tidak hanya pada kegiatan perladangan, melainkan terlihat pula pada kegiatan lain seperti, kegiatan mendirikan rumah, kegiatan keagamaan, kegiatan pesta perkawinan, kegiatan kematian dan kegiatan kerja bakti dan sebagainya.

Hutan-hutan di sekitar perladangan sangat dipelihara dengan baik. Mereka menebang hutan untuk keperluan mendirikan rumahpun sangat selektif, agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Bahkan ada daerah-daerah yang dianggap sakral dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Masyarakat adat Dayak Kalimantan sangat menjunjung tinggi kelestarian alam sekitar.

Masyarakat dan kebudayaan lokal Kalimantan, selama Orde Baru telah mengalami proses marginalisasi secara sistematis. Kebudayaan asli masyarakat adat Dayak Kalimantan merupakan elemen terbesar dalam struktur penduduk. Kalimantan dalam pembuatan kebijakan

pembangunan, eksistensi masyarakat adat ini belum terakomodasi atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional. Perilaku tidak adil ini dapat dilihat dengan jelas dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai “masyarakat terasing”, “masyarakat ladang berpindah” dan “masyarakat primitif”. Pengkategorian dan pendefinisian semacam itu membawa implikasi pada percepatan penghancuran sistem dan pola masyarakat adat, baik secara ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat menjadi dibawah kekuasaan dan kontrol pemerintah. Berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Transmigrasi dan Undang-Undang Penataan Ruang telah menjadi instrumen utama dalam pengambil alihan sumber-sumber ekonomi masyarakat adat Dayak secara kolektif dan nepotis kepada perusahaan-perusahaan swasta tertentu dan Badan Usaha Milik Negara. Akibat dari kebijakan dan politik pengelolaan sumber-sumber daya alam yang tidak adil di Kalimantan telah timbul konflik horizontal antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Resource capture dan marginalisasi ekologis, mengakibatkan akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali, kemudian melahirkan marginalisasi ekonomi masyarakat adat. Marginalisasi ekonomi masyarakat adat merupakan basis konflik sosial vertikal dan horizontal di Kalimantan

Dari sisi sosial budaya, selama pemerintah Orde Baru, para perencana dan pelaksana pembangunan di Indonesia menganggap nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai simbol keterbelakangan yang menghambat pembangunan. Kebudayaan masyarakat tradisional merupakan gambaran dari masyarakat yang belum maju, ditandai cara berfikir irasional serta cara kerja yang tidak efisien. Sebaliknya masyarakat modern merupakan simbol dari kemajuan, pikiran rasional dan cara kerja yang efisien.

Bertolak dari anggapan tersebut dilaksanakan rekayasa untuk mengubah nilai-nilai tradisional masyarakat adat antara lain perlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Hal ini telah menghancurkan institusi politik masyarakat adat. Pemaksaan Sistem pertanian modern untuk menghapus sistem pertanian tradisional ladang berpindah kearah pertanian menetap serta penatagunaan tanah hutan adat untuk kepentingan hutan tanaman industri dan perkebunan telah menghancurkan basis material kebudayaan masyarakat adat di Kalimantan.

Kehadiran BUMN dan perusahaan perusahaan swasta lainnya seperti pemegang HPH/HTI di Kalimantan, seharusnya mereka ini memberi kesejahteraan pada masyarakat adat Kalimantan, namun justru merampas basis material masyarakat adat.

Globalisasi telah menjadi kenyataan. Globalisasi merupakan sebuah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah dunia menjadi satu format budaya. Globalisasi bukan saja merupakan gejala kontemporer namun berlangsung seiring dengan peradaban manusia.

Globalisasi yang ditunjang oleh kecanggihan teknologi komunikasi ini telah melahirkan fenomena sosial yang disebut global village. Konteks perubahan kebudayaan yang terjadi di Kalimantan ini dapat disebut krisis kebudayaan Kalimantan,

karena perubahan-perubahan struktural yang dialami warga masyarakat sebagai krisis kelangsungan hidup mereka sendiri dan merasakan identitas sosial terancam. Sudah sampai pada gilirannya bahwa masyarakat adat Dayak Kalimantan untuk dapat ikut serta mendefinisikan konsep politik dan strategi kebudayaan. Pemerintah harus dapat mengakhiri tindakan regime of significance (rezim pemaknaan) yang cenderung melakukan dominasi dan hegemoni makna atas peristiwa, pengetahuan, kesadaran dan wacana.

## **B. KONFLIK DAN KEKERASAN**

Dalam situasi sosial yang tidak menentu (anomie) norma-norma kehidupan bermasyarakat seyogianya menunjukkan peran aktifnya, dengan mengedepankan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Masyarakat Indonesia yang majemuk itu sedang mengalami pergeseran sistem nilai sebagai akibat pembangunan serta ketidakstabilan ekonomi dan politik. Tidak dapat dihindari perbedaan antar suku bangsa meruncing menjadi konflik dan kekerasan yang menggoncangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bangsa Indonesia khususnya masyarakat adat Kalimantan perlu menyadari dan memahami akan keberadaan kemajemukan masyarakat dengan kekhasan latar budaya dan sejarah masing-masing. Kenyataan menunjukkan bahwa belakangan ini sering terjadi konflik dan kekerasan antar suku bangsa, sehingga membawa korban jiwa dan harta yang tidak sedikit.

Konflik dan kekerasan yang kerap terjadi di beberapa daerah, satu diantara penyebabnya adalah belum adanya saling pengertian dan pemahaman tentang sejarah dan sosial budaya di antara masyarakat dan suku-suku bangsa. Oleh

sebab itu, wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang keanekaragaman, budaya bangsa pada masyarakat perlu disikapi secara arif dan bijaksana.

Dalam kenyataan kehidupan di masyarakat terjadi suatu kompetisi dalam segala bidang kehidupan. Mereka saling berjuang demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran sendiri. Terjadi pula persaingan dalam merebut sumber daya alam yang tersedia dan terbatas, ini dilakukan oleh kepentingan kelompok kecil (subgroups), mereka mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan konflik dan kekerasan, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Konflik dan kekerasan yang pernah terjadi di beberapa tempat di Kalimantan, murni pertikaian antar etnis, bukan pertikaian antar agama. pertikaian yang pernah terjadi ini, sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat Dayak Kalimantan, namun itulah yang terjadi. Pada hakekatnya konflik dan kekerasan yang pernah terjadi di Kalimantan, bukan karena kecemburuan sosial, bukti.suku Dayak tidak pernah mengusir ataupun memusuhi suku-suku lain, melainkan dapat saja bergaul dengan ramah dan toleran.

Pada jaman dahulu para pendatang yang masuk ke pedalaman Kalimantan cukup dihargai, bahkan diberi makan. Contohnya suku Jawa dapat saja bekerja sama dengan suku Dayak. Peristiwa yang pernah terjadi di Kalimantan, sebenarnya akibat dari perilaku oknum etnis tertentu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya suku Dayak Kalimantan, sehingga akhirnya terjadi bentrok atau konflik.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari, maka untuk masa-masa mendatang pemerintah daerah harus melaksanakan pendataan terhadap para pendatang, sehingga para pendatang ke daerah Kalimantan dapat terseleksi dengan baik, jangan sampai pulau

Kalimantan menjadi tempat persembunyian rampok, garong pencuri dan pembunuh dari daerah lain.

Apa yang harus dilakukan sekarang ialah kita harus mencari jalan untuk secara berangsur, tetapi pasti, mempersempit dan menutup retak-retak konflik yang seringkali muncul. Sejalan dengan itu, maka salah satu hal dapat segera dilakukan ialah melanjutkan kembali dialog budaya diantara warga bangsa untuk memperbaharui pemahaman tentang budaya bangsa.

**JATIDIRI ETNIK / DAERAH  
DALAM  
BINGKAI JATIDIRI NASIONAL  
Prof. H. KMA M. Usop, M.A.**

Ketua Presidium Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalteng [ LMMDD-KT ]

## **PENDAHULUAN**

Dalam makalah ini saya menulis bukan tentang berbagai ragam budaya di Kalteng ataupun di Indonesia yang beraneka ragam, tetapi tentang integrasi budaya dalam bingkai daerah dan nasional. Bingkai budaya nasional yang juga menjadi bingkai perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya ialah falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai landasan ideologi dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Dalam bingkai nasional itu tidak hanya terjadi proses atau perkembangan integrasi nasional, tetapi juga terjadi proses integrasi daerah yang juga aneka ragam etnik dan sub-etnik yang memiliki budaya masing-masing yang berbeda-beda tetapi juga memiliki kesamaan-kesamaan (Bhinneka Tunggal Ika) : berbeda-beda tetapi tetap satu juga (unity in diversity).

Proses integrasi dan interaksi tersebut berkembang membentuk suatu jatidiri [*identity*] atau suatu [*ethnicity*]--- kesadaran etnik atau kedaerah-an : ke-jawa-an, ke-minangkabau-an, ke-batak-an ataupun ke-dayak-an [utus], dll. Seorang/ warganegara Indonesia dapat memiliki jatidiri bangsa Indonesia tetapi juga tetap memiliki ciri-ciri khas [jatidiri] etniknya : seorang

Indonesia dapat menyebut dirinya “saya Indonesia Jawa” atau “saya Indonesia Dayak” dll. Seseorang tidaklah dapat menghilangkan sama sekali keetnisannya walaupun dia adalah seorang/ warganegara Indonesia.

Ke-daerah-an atau ke-etnis-an dalam pengertian di sini bukanlah bersifat eksklusif atau suatu “isme” sebagaimana dimaksudkan di dalam istilah “primordial-isme” yang bersifat negatif dan eksklusif, tetapi suatu pengertian yang inklusif, alamiah dan manusiawi yang sejalan dengan pengertian / konsep Bhinneka Tunggal Ika.

Jatidiri daerah/ etnik sebagai hasil dari suatu proses integrasi kebudayaan dapat berkembang dan berwujud integratif, tetapi dapat juga menjadi disintergratif. Karena itu bingkai integrasi nasional haruslah kuat dan berdayatahan untuk membentuk suatu “jatidiri nasional yang berwajah etnik” atau suatu “kepribadian nasional yang berwajah daerah”.

Seorang warga hasil pembauran atau suatu perkawinan campuran antara dua etnis yang berbeda tetap harus mengalami proses penemuan jatidirinya seorang Indonesia yang “lebih ke ayahnya” atau lebih ke ibunya”. Dua orang bersaudarapun dapat memiliki “wajah kepribadian” yang berbeda.

Dalam Interaksi dengan seorang warganegara asing pun, kita menemukan kesamaan kita sebagai manusia [kemanusiaan] dan kesamaan kepentingan dan misi kita sebagai faktor yang merukunkan dan memungkinkan suatu kerjasama, bahkan sesuatu “integrasi”

## **PANCASILA DAN BUDAYA BETANG**

### **Pancasila**

1. Bahwa alam semesta dan lingkungan hidup dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar umat

manusia dapat hidup mengembangkan kebudayaan dan peradabannya dari masa ke masa untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena itu, kami sebagai ciptaan Tuhan Maha Esa bertekad untuk tidak merusak alam dan lingkungan hidup kami yang merupakan mitra dalam perjalanan hidup kami di dunia. Manusia dan Alam adalah satu. Karena itu, segala sumber daya alam wajib kami manfaatkan dan kami lestarikan secara berkelanjutan agar tumbuh suatu keseimbangan hidup tidak hanya di dalam diri kami, tetapi juga dalam masyarakat dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sebagai wujud akhlak kami pada Alam dan Manusia serta ketaqwaan kami pada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Bahwa untuk itu, kita bertekad berjuang untuk menegakkan kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban [civility] tidak hanya dalam pergaulan hidup kami sesama warga negara dan umat manusia, tetapi juga dalam interaksi kami dengan Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Bahwa kita sebagai warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia bertekad untuk bekerjasama dan bergotong royong untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak tersebut yang merupakan kekuatan yang memadukan [integrative] sehingga kita dapat memelihara kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa kami dalam kerangka kehidupan berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain.
4. Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan mulia ini, kita menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam suatu proses demokrasi yang menghargai hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, sehingga kami selalu dapat berpartisipasi dan memilih langsung wakil-wakil kami yang akan memberikan bimbingan dan arahan dalam perjuangan mewujudkan deklarasi ini.
5. Bahwa kita dalam perjuangan melestarikan Lingkungan Hidup ini dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dengan demikian kami dapat pula ikut serta

- memberikan sumbangan pada kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi masyarakat dunia.
6. Pada dasarnya Pancasila itu dengan sila pertama "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" menjamin kebebasan beragama; dengan sila kedua "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*" menjamin Hak Azasi Manusia; dengan ketiga "*Persatuan Indonesia*" menjamin suatu negara kebangsaan; dengan sila keempat "*Kedaulatan Rakyat Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan*" menjamin demokrasi dengan perwakilan yang berlegitimasi tinggi [sistem pemilihan langsung]; dengan sila "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*" menjamin kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat.
  7. Dengan bobot moral/ akhlak yang tinggi menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika : Perbedaan adalah rahmat demi keserasian/ keharmonisan kehidupan baik dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dengan bangsa-bangsa lain dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Pandangan dan orientasi moral yang demikian sangat sesuai dengan paradigma global yang menonjolkan akhlak terhadap manusia [HAM], akhlak terhadap alam dan toleransi. Orientasi demikianlah yang merupakan dasar-dasar dari perkembangan yang berdayatahan/ berkesinambungan [sustainable development]
  8. Pancasila adalah bingkai kerangka budaya/ peradaban Indonesia Baru yang sekaligus menjamin dan memayungi perkembangan budaya lokal atau sistem nilai luhur termasuk sistem nilai adat yang relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila adalah wadah/ bingkai/ penyaringan untuk interaksi dan integrasi di dalam negeri dan dengan dunia luar negeri.

## Budaya Betang

1. Budaya Betang [budaya rumah panjang : sistem nilai-nilai/norma-norma kehidupan bermasyarakat berdasarkan kekeluargaan, kebersamaan, kesetaraan dalam masyarakat terbuka yang majemuk, multi-etnik, multi-agama atau masyarakat madani [*civil society*] yang Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan *sub-kultur dari Pancasila*. Tradisi atau adat yang telah berkembang selama satu abad ini sejak Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 mengandung 1] nilai-nilai damai [menentang cara-cara kekerasan], menekankan nilai-nilai/cara-cara hapakat/ basara atau musyawarah/ mufakat dalam menyelesaikan masalah, 2] percaya kepada Tuhan Yang maha Esa [kebebasan beragama], 3] menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan 4] kebangsaan atau utus, serta 5] nilai-nilai kesejahteraan bersama yang berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila yang hidup di keluarga masyarakat Dayak ini berkembang terus dalam proses interaksi dan integrasi nasional dalam bingkai/ krangka budaya [*cultural framework*] nasional. Pancasila yang relevan dengan perkembangan budaya modern yang global. Sistem nilai demikianlah yang akan berkembang menuju suatu peradaban/ kebudayaan baru Indonesia dan daerah [dalam hal ini Kalimantan Tengah]. Dalam bingkai ini tiap daerah dapat mengembangkan ciri-ciri budaya dan jatidirinya baik dalam wujud sistem nilai, sistem sosial dan wujud fisik masing-masing dalam kebinneka-tunggal-ika-an
2. Mengingat secara historis semua suku Dayak di Pulau Kalimantan memiliki tradisi hidup di dalam rumah panjang dengan kesetiakawanan/ solidaritas yang tinggi, mengetahui dan mengayati Rapat Damai Tumbang Anoi 1894, dan kepercayaan kepada TYME serta dengan berbagai variasi dinamisme [kepercayaan segala sesuatu memiliki tenaga dan kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup], Budaya Betang tidak hanya mampu menjadi bingkai budaya pemersatu suku-suku Dayak di Kalteng saja, bahkan juga suku-suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan apapun agama yang mereka peluk. Paham dinamisme ini tidak hanya dapat meginteraksi dan mengintegrasikan diri dengan sistem nilai yang lain dan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahkan juga dengan agama-agama yang ada. Masyarakat Dayak dewasa ini memeluk berbagai agama, tetapi tetap hidup berdampingan secara damai di bawah naungan rumah panjang.

3. Kerukunan dan kesetaraan dalam perbedaan dan kemajemukan dalam suatu masyarakat terbuka, masyarakat madani, masyarakat Bhinneka tunggal Ika sangat sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Dayak, Polarasi yang tajam dan dominasi satu atas lainnya tidak akan menjamin kedamaian di bumi Kalimantan.

## **PERWUJUDAN**

- Perkembangan Indonesia selama 57 tahun [lebih setengah abad ini] adalah proses dan bentuk perwujudan yang dinamik menuju kebangsaan dan masyarakat yang ideal : masyarakat Pancasila.
- Demikian pula perkembangan Propinsi Kalteng selama hampir setengah abad ini [45 tahun] adalah proses dan perwujudan yang dinamik menuju masyarakat Budaya Betang dalam bingkai masyarakat Pancasila/ NKRI.
- Dalam konflik yang terjadi belakangan ini nampak adanya suatu solidaritas/ kesetiakawanan yang luas bahkan sampai ke luar daerah yang menandakan adanya suatu jatidiri Kalteng. Pola penyelesaian konflik di kalteng --- dimana partisipasi masyarakat sangat tinggi ---- berbeda dengan pola di Kalbar ataupun di daerah-daerah lain.

## KESIMPULAN

1. Budaya Betang atau sistem nilai/ normal/ adat Dayak Kalimantan Tengah merupakan sub-kultur/ bagian integral dari Pancasila/ Bhinneka Tunggal Ika/ NKRI menuju suatu kebudayaan peradaban Indonesia Baru dengan bineka ragam budaya etnik : keperibadian [jatidiri] nasional dengan bineka wajah/ kepribadian/ jatidiri etnik yang saling berinteraksi dan berintegrasi secara nasional dan antar daerah. Pancasila/ Bhinneka Tunggal Ika merupakan bingkai/ filter integrasi dan interaksi dengan budaya bangsa-bangsa lain menuju suatu masyarakat madani [civil society] nasional dan Internasional.
2. Pembangunan nasional dan daerah berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang berbasis masyarakat [ekonomi rakyat/ sektor informal] dan SDA [community-base and natural resources-based sustainable development] sejalan dengan pembangunan berkelanjutan global, sehingga terjadi integrasi/ kerjasama dan interaksi yang dinamik dan terbuka. Alam adalah mitra manusia dalam kehidupan yang harmonis.
3. Keragaman/ perbedaan dan perubahan adalah hukum alam, karena itu kita haruslah mengendalikan diri/ menyesuaikan diri. Etnisiti dalam masyarakat terbuka bersifat integratif dan inklusif Etnosentrisme, seperti isme-isme lainnya yang menganggap dirinya paling hebat/ paling baik, bersifat disintergratif dan eksklusif. Demikian pula halnya dengan jatidiri atau kepribadian.

Palangka Raya, 4 Juni 2002

# **IDENTITAS DAN KRISIS BUDAYA DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH**

Oleh: Basir Mantikei R. Hanyi, S, Ag.

## **I. IDENTITAS DAYAK KALIMANTAN TENGAH.**

Suku yang menempati sebuah pulau yang cukup besar yang penuh dengan kekayaan alamnya ini, pertama-tama disebut dengan nama sukunya UTUS PALANGKA BULAU dan pulau PALANGKA BULAU. Suku yang pertama kalinya menempati pulau ini adalah turunan Maharaja Bunu dengan diberikan identitasnya utus Palangka Bulau. Suku ini diturunkan oleh Ranying Hatala Langit (sebutan Kaharingan) Tuhan Yang Maha Esa.

Palangka Bulau adalah nama sebuah benda yang disakralkan oleh orang Dayak. Nama lengkapnya Palangka Bulau Lambayung Nyahu.

Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, kelompok-kelompok masyarakat yang ada hidup secara turun-temurun dari jaman kejaman, kehidupan orang Dayak terdiri dari beberapa jaman, yaitu :

1. Jaman Maharaja Bunu (utus Palangka Bulau).
2. Jaman Bawi Ayah.
3. Jaman Tetek-Tatum.
4. Jaman Maruhum.
5. Jaman Bandar.
6. Jaman Tambun Bungai.
7. Jaman Penjajahan Belanda.

### **1. Jaman Maharaja Banu.**

Pada jaman Maharaja Banu ini adalah nenek moyang orang Dayak yang diturunkan dengan Palangka Bulau Lembayung Nyahu. Kehidupan masyarakat pada saat itu selama kurang lebih 10 turunan tidak bisa mati. Nenek moyang orang Dayak pada jaman itu kalau sudah sampai saatnya, mereka langsung menuju suatu tempat,, misalnya muara-muara sungai besar, Gunung-gunung, lembah dan danau, karena mereka menyatu kehidupannya dengan alam mereka langsung gaib (masih ada tetapi wujudnya tidak nampak), yang biasa disebut, Ijin Tumbang Kahayan, Ijin Tumbang Katingan, Ijin Puruk Bondang, Ijin Bukit Tangkiling dan lain sebagainya.

Identitas orang Dayak pada saat itu disebut utus Palangka Bulau, yang artinya menunjukkan asal-usul mereka Maharaja Bunu yang diturunkan dengan Palangka Bulau. Pada jaman itu nenek moyang orang Dayak (utus Palangka Bulau) menyebarkan dirinya dan mencari tempat hidup yang nyaman, aman tentram, damai dan sejahtera, menuju beberapa sungai besar dan kecil melalui jalan darat yang disebut **Nyoo** yaitu dari hulu sungai yang satu menuju hulu sungai yang lainnya, seperti :

1. Ongko Tingan, menuju sebuah sungai yang diberi nama sungai itu sama dengan namanya karena ia orang pertama.
2. Ongko Saruyan, di Sei Seruyan.
3. Ongko Mantaya, di Sei Mentaya.
4. Ongko Kahayan, menetap di Sei Kahayan
5. Ongko Kapuas, di Sei Kapuas.
6. Ongko Baritu, di Sei Baritu
7. Ongko Lamandau, di Sei Lamandau.
8. Ongko Arut, di Sei Arut.

Begitu dan seterusnya nama sungai, danau, lembah, Bukit dan gunung diberi nama sama dengan nama orang yang pertama kali menempatinnya. Begitu pula nama-nama manusia atau orang-orang Dayak selalu mengambil atau membuat nama dari nama pohon, akar, tumbuh-tumbuhan, binatang, burung dan lain sebagainya. Contoh :

Nama orang.	Nama binatang, burung dll.
Tingang	nama burung. Tingang.
Tengang.	nama akar Tengang.
Gajah.	nama binatang.
Belanga	nama guci.
Lalang.	nama guci.
Telep.	nama benda.
Lilis.	nama benda
Lamiang	nama benda
Dahuyan	nama pohon
Tongkoi	nama pohon
Tambun	nama binatang air, dst.

Begitu pula membuat nama-nama kampung Desa/ Kelurahan, Kota Gedung, jalan dan lain-lain cenderung nama orang, benda, tokoh pekerjaan dan lain sebagainya. Contoh.

Kelurahan Palangka.	nama benda.
Kabupaten	Kapuas nama sungai.
Kecamatan Bukit Batu	nama bukit.
Desa Sungai Raung	nama benda.
Gedung Batang Garing	nama pohon.
Aula Jayang Tingang	nama pohon.
Jalan Tambun Bungai	nama orang.
Jalan Kapuas	nama sungai.

Jalan Cilik Ciwul                      nama orang.  
Hotel Dandang Tingang   nama bulu ekor tingang.  
Hotel Sampaga                    nama Sungai.  
Hotel Danau Mare.            Nama Danau.  
Dan seterusnya.

## **2. JAMAN BAWI AYAH HADURUT.**

Kehidupan masyarakat Dayak pada jaman itu menyatu dengan orang-orang dari Pantai Danum Sangiang (alam atas) selama 7 tahun lamanya. Bawi Ayah adalah sebutan dari beberapa orang yang berkumpul dalam satu kelompok dengan jumlah 120 orang laki-laki dan 120 orang perempuan. Mereka inilah yang disebut kelompok Bawi Ayah. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang tata-cara hidup dan kehidupan, bermasyarakat, berkelompok, mengajarkan kaum perempuan menganyam dan lain sebagainya. Begitu pula kepada kelompok laki-laki mereka mengajarkan tentang pelaksanaan upacara dari tingkat yang paling kecil sampai ketinggian yang lebih besar. Kegiatan itu bertempat di Desa Tangkahan sekarang kecamatan Banama Tingang Kabupaten Kapuas.

## **3. JAMAN TETEK TATUM.**

Mulai jaman inilah nenek moyang orang Dayak saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, dari sejumlah turunan Maharaja Bunu yang diturunkan setelah mereka belajar dengan Bawi Ayah, agar mereka membagi diri dan menyebar kemana-mana seperti

- Raja Helu Maruhum Usang.
- Raja Sariantang Penyang.

- Kameluh Rangkang Sangiang.
- Raja Landa Bagadung Batu.
- Raja Sina Bakuncir Panjang.
- Raja Siam Tempun Tambaku Mangat.
- Raja Kaling Babilem Pamungkal Garantung.
- Raja Pait Panuang Ringgit.
- Raja Jampa Panuang Balanga.
- Garahasi Minton Panuang Badil Tambun.
- Nyai Siti.
- Diang Lawai.
- Nyai Bitak.
- Nyai Bamun.
- Raja Malayu Batatopong Bulau.
- Patih Rumbih.
- Dambung Bakurap.
- Patih Dadar.

#### **4. JAMAN MARUHUM.**

Raja Helum Maruhum Usang. Pada jaman inilah Nenek moyang orang Dayak mulai mengelompokkan dirinya membuat desa-desa disetiap kampung/ Desa dengan menggunakan petunjuk manajah Antang mencari Petunjuk.

#### **5. JAMAN BANDAR.**

Mulai dari kehidupan Bandar sudah sering pergi merantau ke negeri orang, Mengadakan hubungan dagang dengan Raja Barunai dll.

#### **6. JAMAN TAMBUN BUNGAI.**

Pada priode Jaman ini kerajaan Cina sudah berkali-kali masuk pulau Batang petak ini mengadakan hubungan ekonomi dan perdagangan. Raja Cina melihat kesenangan orang Dayak apabila dalam kehidupannya ada memiliki Balanga (Guci) karismanya seperti bangsawan.

Cina banyak membeli jenis-jenis Balanga dan dibawa ke negeri Cina dan dicetak, dibuat di Cina dan diperdagangkan kembali ke pulau utus Batang Petak langkap dengan tahun pembuatannya.

Setelah itu manusia semakin bertambah ilmu pengetahuannya mereka sudah bisa membuatnya sendiri dengan tidak membeli lagi dari /cina yang diberi nama halamaung tajeta (baru) Balanga Sambas karena dibuat dikabupaten Sambas Kalimantan Barat.

## **7. JAMAN PENJAJAHAN BELANDA.**

Sejak penjajahan Belanda masuk ke Indonesia pada abad ke-16 selama kurang lebih 350 tahun termasuk di Kalimantan. Pada saat itulah perubahan nama Utus Batang petak berubah menjadi- pulau Borneo (nama pemberian belanda). Kehidupan Masyarakat Dayak pada jaman ini bida hidup bersatu berkumpul dalam rumah Betang (belum bahadal) kehidupan dalam rumah betang melambangkan kerukunan, persatuan yang menandakan orang Dayak satu Utus atau satu turunan.

Politik Adu Domba Belanda semakin menjadi mengakibatkan Suku Dayak tidak bisa bersatu, sehingga terjadilah perkelahian antar kelompok, saling balas-membalas (hakayau dan habunu) antara masyarakat aliran sungai kahayan menyerang masyarakat di sungai mahakam begitu seterusnya. Akibat perpecahan itu hubungan persaudaraan di antara orang dayak atau hubungan kekeluargaan berangsur-angsur menurun hilang. Terjadilah rekayasa Damai Tumbang Anoi oleh Belanda seolah olah Belanda yang mempunyai pemikiran untuk mendamaikan Habunu/Hakayau yang terjadi dikalangan masyarakat Dayak Borneo. Padahal Damai Tumbang Anoi adalah hasil pemikiran Damang Batu dihulu Kahayan

tahun 1835 atas kesepakatan bersama tokoh-tokoh Dayak, hasil manajah Antang atas petunjuk para leluhur.

Ciri khas pakaian orang Dayak pada waktu itu adalah hewah atau bahewah. Pakaian jenis hewah itu dikarenakan kekurangan kain atau bahan pakaian, pakaian yang di gunakan dibuat dari kulit kayu (nyamu) atau sejenis kayu yang memiliki serat kulitnya lembut seperti Siren dan pohon Saluli / Kala. Bahan makanan pun serba kekurangan orang Dayak hanya makan ubi kayu (jawau) dibuat Kopus dan Rampang.

## II. IDENTITAS PAKAIAN ORANG DAYAK.

Jenis atau nama pakian yang dikenakan oleh orang Dayak untuk kalangan laki-laki yaitu :

### a. Tato (tutang)

- Tutang Patik Ranggan Bunu =
- Tutang Bulau Marintik =
- Tutang Patik Paleng =
- Tutang Kunjat Antang =
- Tutang Bunter =
- Lawah Lamiang =
- Lawah Bulau Urai =
- Tutang Kalibambang duhung =
- Kuling Hariwung Sawang =
- Bilit Anden Sangen =
- Sariguna Tengku =
- Sariguna Ali =
- Tutang Tambun Pulu =
- Tutang Pakan Hewan =
- Tutang Burung Tingang =

- Tutang Empui Malem =
- Tutang Tiung Antu =
- Tutang Tandang Menteng =
- Tutang Kambang Garing Manyangen =
- Tutang Salipan Bungai =

b. Pakaian.

- Sarumpah Bulau = Sendal/Sepatu
- Kuling Hariwung Sawang = Celana
- Timpung Bambahuluan Peteng = Ikat Pinggang
- Baju Lantang Timpung = Baju
- Tisin Pangarikir Bintang = Cincin
- Hinting Santangi Randae = Santagi
- Bulau Repang Sambe = Repang Sambe
- Bulau Pantar Tatah = Silap (gigi emas)
- Jujung Sampulau Dare (sejenis topi) = Sampulau Dare (sejenis topi)
- Luhing Angkul Timpung = Ikat Kepala.

c. Alat Perlengkapan.

- Duhung Papan Benteng = Duhung (Sejenis tombak)
- Batun penyang = Kumpulan penyang.
- Ulai Telun penyang = Terbuat dari rotan anyaman.

d. Pakaian Perempuan.

- Salui Penambayang = Sarung
- Hinting Santagi Randae = hinti Santagi
- Bulau Repang Sambe = Repang Sambe
- Bulau Pantar Tatah = Silap (gigi emas)
- Bulau Pating Sumping = Anting-anting
- Rabia Jujung = Cucuk Kende.

Kehidupan dan Adat istiadat Orang Dayak Ngaju Kal –Teng.

Adat istiadat masyarakat Dayak Ngaju Kal-Teng yang meliputi Adat Perkawinan dengan ciri khasnya tersendiri yang mungkin lain dari daerah yang lain seperti Adat perkawinan atau Kawin Adat. Perkawinan Adat atau Kawin Adat menurut Kharingan, adalah suatu perkawinan/ pernikahan yang dilaksanakan bagi mereka yang secara tidak terduga bisa terjadi yang disebut dengan istilah sala Hurui Perkawinan antara Pamannya dengan Keponakannya, antara Kakek dengan cucunya. Perkawinan seperti inilah yang disebut kawin Adat dan bukan adat perkawinan. Hal-hal seperti ini mengakibatkan/menimbulkan Pali.

#### 1. Pengertian Pali.

Pali ada dua macam yaitu :

Pali sebagai larangan untuk anak-anak kecil yang bersifat nasihat atau mendidik, contohnya jangan main api bisa terbakar, jangan main pisau bisa luka, jangan main di air bisa tenggelam, dan lain sebagainya. Kemudian Pali sebagai pantangan atau tabu, jenis Pali seperti ini sangat berbahaya apabila terlanggar atau dilanggar bisa berakibat fatal, pali makan ikan Lawang dan lain-lain. Apabila dimakan atau satu kali makan ikan Lawang, satu anaknya mati disebut pali panyampah.

#### 2. Mimpi/Nupi Papa.

Menurut Dayak kaharingan, mimpi dibagi menjadi dua bagian antara lain :

Mimpi biasa dan Mimpi sebagai pertanda.

Mimpi biasa sering dikatakan sebagai bunga-bunga tidur. Berarti mimpi seperti ini tidak ada pengaruhnya atau tidak ada akibatnya untuk kehidupan sehari-hari.

Mimpi sebagai bertanda, adalah apabila mimpi Gigi patah atau lepas, tidak lama setelah itu ada musibah dalam kerabat keluarga. Sehingga kita menafsirkan , suatu

musibah atau kematian itu sudah kita ketahui sebelumnya melalui mimpi dan lain sebagainya.

3. Dahiang-Mandahiang.

Dahiang ada dua pengertian yaitu : Dahiang Buruk dan Dahiang Baik. Dahiang atau mandahiang adalah suatu pertanda yang melalui pengamatan, penglihatan dan pendengaran. Dahiangf buruk contohnya. Apabila kita membuat perjalanan jauh ataupun berusaha dan atau kegiatan lainnya. Pergi jauh berangkat dari rumah, dan saat keluar rumah tiba-tiba kayu roboh pohon tumbang dll. Itu menandakan bahwa perjalanan nanti akan menghadapi bahaya maut.

Dahiayang baik atau memberikan petunjuk yang baik, contohnya : apabila kita mengadakan perjalanan berburu, berusaha dan lain-lain, ditengah jalan ketemu ular, burung, binatang dan lain-lain, menyeberang jalan dari arah kiri kearah kanan posisinya didepan, itu pertanda baik, menandakan bahwa semua kegiatan kita akan mendapatkan hasil yang mengembirakan.

4. Pirasat atau Parasat.

Menurut orang Dayak Kaharingan, Parsat adalah suatu ciri atau tanda-tanda yang ada tersimpan dalam tubuh, misalnya :

- Parasat tenggelam (buseng)
- Parasat Luka (Bahimang)
- Parasat disambar Buaya (nyambar Bajai)
- Parasat mati melahirkan anak (matei manak)
- Perasat Janda/duda (balu/Buyu)
- Parasat Luka (matei bahimang)
- Perasat kena kayu (natal kayu) dan lain – lain sebagainya.

Menurut ajaran Dayak Kaharingan, parasat bisa terjadi atau bersumber dari makanan dan mimpi .

5. Kebiasaan atau Tradisi Dayak kal-teng.

Pada prinsipnya orang Dayak memiliki kebiasaan dan tradisi yang menjadi ciri khasnya atau identitasnya dalam rangkaian kegiatan upacara dan lain-lain:

- Mana sai Berburu
- Mansana Musim buah
- Ngarungut Harubuh
- Badeder Rumah setang
- Ngacapi Pernikahan
- Marabab Dan lain
- Manyuling Bahasa Ibu
- Menganyam Berladang

Dari uraian diatas sudah jelas bagi kita yang merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah , Yang tetap terpelihara secara turun temurun.

## 1. KRISIS BUDAYA DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

Latar belakang krisinya Budaya Dayak Ngaju Kalimantan Tengah adalah karena masuknya agama-agama non Kaharingan antara lain:

- a. Pengaruh agama lain contohnya sekarang dimana-mana di pelosok Kalimantan tengah para penginjil beroperasi dengan seenaknya saja. Sehingga mereka mengatakan:
  - Pasah karamat yang dimiliki oleh orang Kaharingan karena pindah ke agama lain, harus dicabut dan dibakar.
  - Pasah patahu harus dicabut dan dibakar.
  - Benda-benda budaya seperti guci, penyang, minyak bubut, minyak lawu, minyak pacul yang secara

khusus untuk menolong dan mengobati orang sakit semuanya harus dibakar atau dibuang ke air.

- Mangkok gantungan sahur harus dilepas, dibuang atau dipecahkan, karena disana semua setan.
- b. Sandung, pantar dan sampudu harus ditebang, dicabut dan dibuang hal ini terjadi dimana-mana.
- c. Pukung pahewan, tempat tempat disucikan dan tempat-tempat yang di keramatkan oleh orang kaharingan semuanya habis dibabat dan dirusakkan.
- d. Pengaruh bahasa

Pengaruh bahasa ini hampir 75 persen penduduk Dayak kota tidak lagi menggunakan bahasa Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Akibat bahasa itu kalau kakek neneknya berkomunikasi dengan cucunya tidak bisa menggunakan bahasa Dayak. Malah anak cucunya tidak mengerti bahasa Tambi-Bunya. Apabila menggunakan bahasa asal nenek – moyang suku Dayak yang kita kenal, bahasa Sangiang. Banyak pakar-pakar budaya Dayak menterjemahkan, bahasa Sangiang untuk orang orang luar yang salah. Contohnya: Batang Garing atau Isenmulang, Batang Garing berasal dari kata bahasa Sangiang yang artinya: batang adalah batang garing adalah batang atau kayu. Kalau disebut batang garing berarti batang-batang maka salahlah kalimat itu. Garing menurut kaharingan ada beberapa jenis yaitu:

- Garing babasung rujan
- Garing tungket langit
- Garing nganderang
- Garing pakapulu

Keempat jenis garing ini adalah untuk upacara kehidupan misalnya untuk upacara balaku untung dan lain-lain. Nama garing dalam upacara kematian adalah:

1. Garing santa nangkenya kambang kabanteran bulan
  2. Garing benduh nyahu
  3. Garing salampuk bulau
  4. Garing belum mandawen timpung hakabeken bantikaetik
  5. Tandak garing:
  6. Garing belum babasung rujan
  7. Haparuruk nyalung kaharingan belum
  8. Bauat rentai sangkabilan bawak
  9. Habaner garantung
  9. Batunjang duhung bahangkang bunu
  10. Habatang mariang hai
  11. Baupak tipung sakalat laut
  12. Baedan badil tabun
  13. Habungking bakam batu
  14. Mamating suling ringun tingang
  15. Musu lamiang bua garing belum
  17. Motok garanuhing kurik
  18. Mambuku tisin pangarigir bintang
  19. Mandawen timpung hakabeken bantikae
  20. Mangambang bulau tapaurai bulan
  21. Batalujuk bunu balayang hampak
  22. Mamantis nyalung kaharingan belum
  23. Belum manyawau talang nyalung kaharingan belum
- e. Bahasa komunikasi masyarakat Dayak Ngaju Kalteng

Pertama-tama bahasa yang dipakai sehari-hari oleh orang Dayak adalah bahasa Sangiang seperti yang tertulis dalam kitab suci manawur dan kitab suci panaturang bagi pemeluk kaharingan. Karena pengaruh suku, bahasa dari beberapa bangsa luar yang masuk ke negeri Dayak, sehingga banyak pula ragam bahasa yang digunakan. Contohnya sekarang dalam buku

Kalimantan memanggil sekarang disempurnakan menjadi Kalimantan membangun oleh Bapak Cilik Riwt hampir ratusan suku dan bahasa yang ada di Kalimantan oleh sebab itu posisi bahasa Sangiang (bahasa nenek moyang orang Dayak) hanya bertahan pada mereka yang masih menganut kaharingan. Karena kurangnya pemahaman terhadap bahasa Sangiang, maka sering timbul kekeliruan pada orang Dayak sendiri, seperti contoh di bawah ini:

Batang garing. Batang garing terdiri dari dua suku kata yaitu batang dan garing. Batang artinya pohon (bahasa Dayak Ngaju) garing artinya batang (bahasa Sangiang) berarti kata batang garing artinya batang-batang atau pohon-pohon.

Isen mulang ( Bahasa Sangiang) kalimat yang lengkap adalah diabuli nggetu bunu panjang isen garantung kemalesan mulang netes talin kamara ambu. Bahasa Sangiang disebut bahasa bawi dan bahasa Hatue. Bawi Hatue istilah dalam bahasa Sangiang adalah sinonim dalam bahasa Indonesia tetapi mengandung pengertian yang lengkap. Artinya "setiap suatu perjuangan atau kegiatan ia tidak akan kembali atau pulang kalau tidak berhasil, arti singkat pantang mundur, berarti tidak berhenti-hentinya dalam suatu perjuangan melawan kemalasan, kebodohan, kemelaratan, kemiskinan, dan lain-lain.

Ciri khas orang Dayak Malahab.

Malahab terbagi menjadi dua bagian: Malahab untuk upacara ritual yang sifatnya untuk kesenangan atau kegembiraan adalah sebagai berikut:

U, .... panjang kemudian KU. I. Kemudian jenis Malahab untuk upacara tiwah pada saat manganjan dan upacara mambale bunu sebagai berikut; Lo, lo, lo.... Panjang kemudian U, ..panjang KU, I. Hal hal

seperti ini kalau diucapkan tidak pernah benar karena tidak mengerti itulah sebabnya orang Dayak Ngaju menjadi krisis budaya.

Terima kasih.

# STRATEGI REVITALISASI KEBUDAYAAN NASIONAL DALAM PAYUNG KONSEP BHINEKA

Oleh Dr. H. Ataupah, MA

## I. PENDAHULUAN

Sang Khalik yang maha kuasa telah menciptakan aneka species binatang di planet, sambil mengaruniai tiap species binatang itu seperangkat kemampuan naluri khas, agar tiap species binatang itu dapat hidup adaptif pada lingkungan hidupnya yang berkondisi tertentu. Sejumlah species serangga maupun binatang besar tertentu diberkati sang khalik dengan kemampuan hidup bermasyarakat teratur tetap tetap tanpa proses perkembangan. Khalikah hidup manusia (*homosapiensis*) pun dikaruniai kemampuan naluri untuk dimanfaatkan pada awal hidup tiap bayi manusia. Tetapi setelah kemampuan belajar sejak masa dini anak manusia makin mantap, kemampuan naluri manusia makin berkurang karena terganti oleh kemampuan hasil belajar mengajar sampai menjelang ajalnya. Hasil belajar umat manusia yang bersifat akumulatif selektif selama satu kala yang panjang akhirnya mengakibatkan umat manusia masa kini merupakan satu-satunya species binatang bermasyarakat dan sekaligus berkebudayaan di planet bumi ini.

Hasil penelitian ahli-ahli arkeologi dan paleoantropologi makin mengungkapkan bahwa supaya para leluhur originator manusia mula-mula hidup dan berkembang biak dibagian timur tenggara Benua Afrika. Dari sanalah keturunan menjalani suatu proses persebaran dan pengembaraan, sehingga mereka sudah dapat menghuni berbagai pelosok bumi yang tidak amat ekstrem keadaan iklim dan keadaan edakfiknya sebelum orang-orang Eropa

menjelajah dan mengklaim penemuan daerah-daerah baru diluar tanah air tradisional mereka.

Dalam proses persebaran dan pengembaraan umat manusia selama berabad-abad itulah berbagai gelombang dan golongan manusia mencapai dan menghuni berbagai pulau/bagian pulau di kepulauan Indonesia, termasuk kepulauan Nusa Tenggara Timur. Proses dan hasil penghunian kepulauan Indonesia dalam jangka lama itu telah turut menentukan corak Bhineka Tunggal Ika masyarakat dan kebudayaan Indonesia masa kini.

Sudah merupakan suatu pengetahuan umum bahwa masyarakat dan kebudayaan yang amat erat berkaitan itu adalah hasil ciptaan dan milik khas manusia. Namun demikian para ilmuwan sosial budaya belum sependapat tentang devinisi maupun konsep tentang masyarakat dan kebudayaan. Pada umumnya dapat diterima oleh orang awam maupun ilmuwan sosial bahwa : suatu masyarakat manusia tercipta jika suatu kesatuan manusia saling berinteraksi, atau saling bergaul secara berkesinambungan dalam waktu relatif lama berdasarkan satu sistim kebudayaan tertentu, atau adat istiadat tertentu serta berdasarkan suatu perasaan dan keinginan bersatu oleh berbagai alasan diantara para warga kesatuan manusia bersangkutan.

Para ilmuwan sosial budaya pada umumnya belum bersepakat tentang devinisi dan konsep tentang kebudayaan. Mereka bersepakat bahwa tiap jenis kebudayaan mempunyai wujud dan komponen atau unsur universal. Tetapi mereka belum sepakat apakah tiap jenis kebudayaan mempunyai dua ataukah tiga wujud. Pemakalah memihak pada mereka yang berpendapat bahwa :

- a. Setiap kebudayaan terdiri atas tiga wujud, yaitu

1. Wujud kebudayaan yang bersifat ideal, yang disebut sistem kebudayaan yang sepadan artinya dengan istiadat
  2. Wujud kebudayaan berbentuk aktifitas berpola yang disebut sistem sosial
  3. Wujud kebudayaan berbentuk benda hasil karya manusia yang disebut benda kebudayaan.
- b. Tiap jenis kebudayaan terdiri atas tujuh unsur kebudayaan universal yang oleh pemakalah disebut tujuh komponen kebudayaan

Masing-masing kebudayaan terdiri atas tiga wujud kebudayaan. Lihat gambar dan penjelasannya.

## **2. KEBUDAYAAN SEBAGAI HASIL PROSES BELAJAR MENGAJAR MANUSIA**

Orang awam dibidang studi masyarakat dan kebudayaan pada umumnya berpendapat bahwa kebudayaan itu sepadan atau hampir sepadan maknanya dengan kesenian. Padahal berdasarkan skema yang dikemukakan diatas, kesenian hanya merupakan salah satu komponen yang setiap kebudayaan dimanapun didunia ini, termasuk di Indonesia. Tiap komponen kebudayaan universal itu terdiri atas wujud kebudayaan ideal, wujud perilaku teratur atau berpola mantap, dan wujud benda-benda kebudayaan.

Wujud kebudayaan ideal itu terdiri dari atau sejumlah pemikiran/gagasan, nilai, norma, keyakinan, iman, pandangan hidup, cita-cita dan sebagainya yang terdapat dalam otak pendukung kebudayaan tertentu, sehingga tidak dapat dilihat oleh siapapun. Semua pemikiran/gagasan, nilai, norma dan seterusnya itu selalu saling berhubungan menjadi suatu sistem yang dinamik, sehingga terbentuklah suatu sistem kebudayaan yang bersumber dan bermula dalam otak para

pendukung kebudayaan tertentu yang biasanya saling berinteraksi berkesinambungan.

Walaupun sistem kebudayaan itu dapat langsung dilihat, keberadaannya dan berkelanjutan keberadaannya beserta fungsinya dapat diketahui dan dipahami oleh sesama pendukung kebudayaan tertentu itu, maupun oleh proses dan hasil pengamatan seksama oleh pengamat peneliti-peneliti kebudayaan terlatih, mahir dan berpengalaman. Kenyataan sosial budaya itu terjadi, karena sistem kebudayaan itulah sumber pencetus dan faktor penggerak aneka perilaku teratur atau mantap yang dilihat/disaksikan oleh orang lain.

Kombinasi secara sengaja dan bertujuan tertentu di antara berbagai unsur-unsur sistem kebudayaan tertentu dengan aktivitas-aktivitas yang teratur warga masyarakat dapat menghasilkan benda kebudayaan yang mudah di indrai. Berbagai jenis benda kebudayaan berukuran kecil maupun besar yang bernilai artistik tinggi maupun tidak, dapat tercipta untuk memenuhi aneka kebutuhan, keperluan dan kerakusan manusia, sejak zaman dahulu kala hingga masa ini, dan seterusnya.

Sudah barang tentu berbagai jenis benda kebudayaan itu dapat diciptakan oleh manusia perorangan maupun oleh sekelompok manusia yang tergolong rata serta kesatuan manusia yang dinamika masyarakat dengan memanfaatkan satu atau lebih jenis bahan baku yang berada dalam lingkungannya dan atau yang diperolehnya melalui pengolahan, barter/jual-beli. Untuk dapat menciptakan berbagai benda kebudayaan, manusia sebagai khalifah hidup sosial budaya memerlukan dan menggunakan komponen sistem pengetahuan dan komponen sistem teknologi yang diciptakan dan dibinakembangkan melalui proses belajar mengajar.

Komponem kebudayaan ainya yang tidak disebut/dijelaskan secara eksplisif dalam makalah ini pun

diciptakan dan atau dibinakembangkan melalui proses belajar satuan manusia tertentu ditempat tertentu, lalu selanjutnya dapat disebarluaskan melalui berbagai cara, sarana dan prasarana kepada satuan-satuan masyarakat lain ditempat lain yang tidak mau dan atau tidak mampu mencipta-berkembang sendiri hal/benda kebudayaan tertentu. Jadi pada hakekatnya kebudayaan itu adalah hasil proses belajar satuan-satuan manusia tertentu ditempat tertentu, lalu dapat disebarluaskan kepada sesama manusia diberbagai pelosok dunia, termasuk Indonesia.

Kesatuan-kesatuan manusia yang berhasil mengembangkan dan memproduktif hasil belajar mengajar secara maksimal dan optimis untuk menghasilkan dan menyebarkan aneka jenis benda kebudayaan (kepada sejumlah besar satuan masyarakat yang memerlukan benda-benda kebudayaan yang tak mau/tak mampu dihasilkan sendiri) merupakan masyarakat produsen yang berpotensi besar untuk berkuasa. Sebaliknya satuan-satuan masyarakat pengimpor aneka benda kebudayaan berpotensi besar menjadi masyarakat konsumen yang relatif bergantung pada masyarakat produsen eksportir yang lebih berkuasa.

### **3. KONSEP BHINEKA TUNGGAL IKA DAN REVITALISASI KEBUDAYAAN INDONESIA**

Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dicapai setelah seluruh rakyat di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin nasional Indonesia berhasil mengakhiri sistem kolonialisme Belanda di Indonesia yang diikuti dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dalam tahun 1950.

Pada awal era Negara kesatuan itulah usul Mr. Muhammad Yamin diterima Pemerintahan Indonesia agar Indonesia menggunakan konsep Bhineka Tunggal Ika

digunakan sebagai semboyan Nasional Indonesia yang tertulis dibawah kaki gambar Garuda Pancasila Indonesia. Semboyan Nasional Indonesia itu merupakan suatu lambang tekat bulat seluruh rakyat Indonesia yang bersama pemerintah Indonesia untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang bercorak pada serba aneka, namun telah bertekad dan akan tetap bertekad untuk bersatu, merdeka dan berdaulat.

Konsep Bhineka Tunggal Ika itu tidak diciptakan oleh almarhum Mr. Muhammad Yamin dan atau kawan-kawannya segenerasi. Semboyan itu ditulis oleh Mpu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit. Konsep itu diintroduksikannya berdasarkan keyakinannya bahwa, perpecahan persatuan masyarakat dan kebudayaan oleh konflik berkepanjangan diantara para penganut agama Hindu dan agama Budha dapat mengakhiri keberlanjutan keberadaan kerajaan Majapahit. Diharapkannya agar realisasi semboyan itu dapat menjadi faktor pemersatu rakyat demi berlanjutnya keberadaan kerajaan Majapahit. Almarhum Mr. M. Yamin mengusulkan semboyan kebudayaan itu untuk direalisasi demi kokohnya persatuan dan kesatuan rakyat, masyarakat Indonesia untuk kepentingan Nusa, Bangsa, Tanah Air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak tahun 1969, dilakukanlah suatu proses pembangunan Nasional untuk mengisi kemerdekaan dan kedaulatan. Ditinjau dari sudut pandang kebudayaan, pembangunan Nasional Indonesia itu adalah suatu pembangunan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Untuk mensukseskan tujuan pembangunan diperlukan persatuan dan kesatuan nasional dibawah kendali ketat politik pemerintahan orde baru yang dikendalikan oleh presiden Soeharto. Sejumlah besar dana pembangunan dipinjam dari luar negeri sedangkan pimpinan pemerintahan dan pembangunan berada didalam tangan pemimpin-pemimpin Indonesia dengan sejumlah penasehat asing.

Sejumlah kekeliruan dan kesalahan besar telah dibuat selama proses pembangunan berada dalam genggaman pemerintahan orde baru yang memperlemah vitalitas kebudayaan Nasional Indonesia. Perlemahan vitalitas kebudayaan itu telah mengakibatkan serangkaian krisis yang mengancam integritas bangsa dan negara Indonesia. Perlemahan vitalitas itu patut diupayakan untuk dihentikan melalui suatu proses revitalisasi kebudayaan dengan menggunakan konsep Bhineka Tunggal Ika Indonesia. Dalam rangka kelanjutan eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia masyarakat Indonesia patut mengandalkan sistem kebudayaan nasional Indonesia yang relatif masih kokoh kuat diberbagai wilayah negara kesatuan Republik. Semoga semboyan Bhineka Tunggal Ika Indonesia dapat direalisasi demi kelanjutan keberadaan Indonesia yang utuh.

Kupang, 26 Agustus 2002

# **Melestarikan Nilai-Nilai Budaya (Minangkabau) Di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah (Pokok-Pokok Pikiran)**

oleh Prof. Dr. Mursal Esten  
Ketua STSI Padangpanjang

## I

Topik ini mengandung sekurang-kurangnya tiga masalah prinsip Pertama, menyangkut usaha **melestarikan**. Kata ini begitu sering diungkapkan, tetapi juga begitu sering di dalam prakteknya menjadi salah-kaprah. Kedua menyangkut **nilai-nilai Budaya** (Minangkabau). Kita juga sering keliru melihat (menetapkan) mana yang dianggap nilai budaya (Minangkabau). Dan mana yang bukan. Ketiga, menyangkut masalah **globalisasi dan otonomi daerah**. Globalisasi dianggap sebagai “musuh”, ditakuti, sehingga kata yang sering digunakan dalam hubungan globalisasi adalah “menghadapi”, padahal seyogianya kita harus berproses bersamanya. Globalisasi dan otonomi daerah bisa berjalan bersama, karena (seperti juga dikatakan John Naisbitt) proses globalisasi memerlukan identitas budaya yang kuat.

## II

Melestarikan nilai budaya tidaklah sama dengan melestarikan benda purbakala atau mengawetkan sesuatu sehingga ia tetap utuh seperti sediakala. Melestarikan nilai - budaya dimaksudkan untuk membuat nilai - budaya itu tetap hidup dan tetap terpakai di masa kini dan masa - depan.

Soedjatmoko pernah mengatakan kelangsungan hidup masyarakat etnis dan nilai - budaya etnis amat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat dan budayanya menyediakan semacam jendela bagi masuknya udara segar (pembaharuan) ke

dalamnya. Dalam arti kata kelangsungan hidup masyarakat dan budaya etnis ditentukan oleh sistem - budaya masyarakat dan budaya etnis itu sendiri.

Masyarakat (Alam) dan kebudayaan (Adat) memberi tempat terhadap terjadinya perubahan di dalam Alam dan Adat. Dasar filsafatnya menunjukkan hal itu : **Alam Takambang Jadi Guru** di dalam Alam tidak ada yang kekal, selalu mengalami perubahan. Demikian juga di dalam adatnya.

Ada dua jenis adat pertama, Adat yang berbuhul mati dan **Adat berbuhul sintak** Adat yang berbuhul mati terdiri dari **Adat yang sebenar Adat** dan **Adat yang di Adatkan**. Adat yang sebenar adat yaitu adat mengikuti seluruh hukum dan sifat alam. Pada saatnya akan berubah sedangkan Adat yang di Adatkan adalah seluruh ajaran dari pendiri dan perumus Adat Minangkabau, yakni Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Kedua **Adat Berbuhul Sintak**. Adat ini adalah penjabaran dari Adat yang berbuhul mati. Rumusan dan penjabaran ini dilakukan melalui **musyawarah**. Karena dilakukan melalui musyawarah, maka musyawarah pulalah yang bisa melakukan **perubahan**.

Dengan demikian masyarakat dengan kebudayaan Minangkabau adalah masyarakat dan kebudayaan yang menjadikan **perubahan** sebagai pondasi bagi kelangsungan hidup masyarakat dengan kebudayaannya. **Adat dipakai baru, kain dipakai usang**. Adat kalau mau tetap terpakai haruslah selalu diperbaharui.

Dengan sendi adat demikian maka orang Minangkabau menjadi orang yang sangat terbuka. Kritik terhadap pelaksanaan adat Minangkabau yang tidak benar, justru datang dari orang Minangkabau. Novel-novel Indonesia yang menyerang dengan pedas feodalisme, ditulis oleh pengarang-pengarang Minangkabau. Pencetus rasa ke Indonesiaan kebanyakan adalah

tokoh-tokoh Minangkabau. Sikap itu tidak membuat kehilangan keminangkabauannya.

Tradisi bagi orang Minangkabau bukanlah bagian dari masa - lalu. Tradisi selalu terpakai: "adat dipakai baru, baju dipakai usang" ia selalu terbuka untuk diperbaharui. Daya perubahan kearah pembaharuan suatu kebudayaan seperti Soedjatmoko, berakar kepada Vitalitas kebudayaan itu sendiri. Modernitas di dalam adat dan kebudayaan Minangkabau tidak hanya lahir oleh sesuatu yang berasal dari luar, tetapi terutama ditentukan oleh apa yang ada di dalam adat atau tradisi Minangkabau itu sendiri. Tradisi harus tetap baru dan kebaruan itu adalah bahagian dari tradisi Minangkabau.

### III

Globalisasi adalah proses mengglobalnya "tribe" (satu bangsa) tertentu. Diramalkan oleh **Jhon Naisbitt** ada sejumlah suku - bangsa yang akan mengglobal. Di samping Cina, Jepang, Anglosaxon, Arab dan Afrika, suku Melayu dan Minangkabau akan menjadi suku - suku yang mengglobal di masa - depan.

Di dalam proses globalisasi ini faktor **identitas** menjadi amat penting. Hanya suku-suku yang memiliki identitas yang kuat dan jelas yang mampu mengglobal. Untuk itu diperlukan identitas yang mampu mendorong dan mendukung berlangsungnya proses globalisasi. Masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki ciri-ciri budaya yang memungkinkan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau bisa menjadi **subjek** di dalam proses perubahan kebudayaan. Ciri-ciri budaya tersebut adalah ciri masyarakat yang **demokratis** (egaliter), **terbuka**, **kemampuan adaptasi yang tinggi kritis** dan **tingkat mobilitas masyarakat yang** juga tinggi. Ciri-ciri dan sifat-sifat budaya yang demikian harus tetap dipertahankan sehingga masyarakat dan kebudayaan Minangkabau dapat menjadi subjek di dalam proses globalisasi.

Kita berharap lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( LKAAM ) dapat menjadi lembaga bagi berlangsungnya proses pembaruan, bukan sebagai lembaga pembela status – Quo.

## **INTEGRASI NASIONAL: ANTARA KEBUDAYAAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

**Oleh: Dr. H. Abdurrahman SH. MH**

Dalam konteks perbincangan tentang "kebudayaan Nasional " dan "kebudayaan Daerah" tidak banyak orang yang memberikan perhatian terhadap apa yang berlangsung dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung pada tanggal 1 – 11 Agustus 2002. Dalam sidang tersebut telah dilakukan perubahan (Amandemen) Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diantara Pasal yang dirubah adalah Pasal 32 UUD 1945 tentang Kebudayaan Nasional.

Dalam Naskah Pasal, Pasal 32 UUD 1945 berbunyi: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Kemudian ada Penjelasan resmi pasal tersebut yang ada pada masa Orde Baru dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Perubahan Pasal tersebut melahirkan Pasal 32 baru UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Sedangkan Penjelasan UUD yang terdapat pada naskah asal, semenjak dilakukan amandemen pertama tahun 1999 sudah tidak mempunyai tempat lagi dalam kerangka Undang-Undang Dasar sehingga secara substansial material sudah dapat dikatakan tidak ada lagi.

Ketentuan tersebut memberikan arahan tentang strategi kebudayaan baru tentang kewajiban Negara untuk

- a. memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Hal ini mengisyaratkan kepada kita tentang kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional di tengah kebudayaan yang bersifat global dan dalam suasana globalisasi. Negara wajib mempertahankan dan melindungi kebudayaan nasional dari bangsa Indonesia agar tidak menjadi tersingkir dalam pertarungan peradaban (*clash of civilization*, meminjam istilah Samuel Huntington).
- b. menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini memberikan "kewenangan" kepada masyarakat sendiri baik masyarakat bangsa (nasional) maupun masyarakat lokal (daerah) untuk mengembangkan dan memelihara kebudayaannya masing-masing.
- b. menghormati dan memelihara bahasa daerah, yang sekarang dipertahankan berbagai kelompok etnik di Indonesia sebagai salah satu identitas mereka dalam kerangka nasional diakui sebagai kekayaan budaya. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 yang sampai sekarang tidak diadakan perubahan yang

menyatakan : "Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia". Dengan adanya ketentuan Pasal 32 baru terdapat jaminan konstitusional untuk menggunakan bahasa daerah dalam berbagai forum resmi.

Prinsip ini menuntut penjabaran lebih operasional dalam strategi pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah dalam suasana global.

Sebelum ini, amandemen kedua terhadap UUD 1945 yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Dari amandemen ini kita dapat mencatat paling tidak ada tiga hal yang mempunyai keterkaitan dengan topik bahasan ini, yaitu :

- a. Adanya penambahan ketentuan baru berupa Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang". Ketentuan ini termasuk dalam bab mengenai "Pemerintah Daerah" sehingga ia merupakan pengakuan hak otonomi dari berbagai masyarakat hukum adat yang ada di berbagai wilayah Indonesia termasuk hak untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaannya masing-masing dalam kerangka kebudayaan daerah.
- b. Adanya penambahan pasal berupa Pasal 28 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : " Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Ketentuan ini termasuk dalam bab baru tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini merupakan sebuah ketentuan yang mengakui identitas budaya masyarakat tradisional sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati, dengan demikian adalah merupakan hak asasi dari setiap masyarakat tradisional yang ada di Indonesia untuk mempertahankan identitas budayanya

masing-masing. Istilah masyarakat tradisional yang digunakan dalam pasal ini adalah sebagai padanan dari istilah "masyarakat adat" yang banyak digunakan dan dianggap sebagai terjemahan dari "indigenous people" yang digunakan dalam dunia internasional namun dianggap kurang tepat untuk masyarakat Indonesia. Namun ada pula yang mempersoalkan justru istilah "masyarakat tradisional" yang kurang tepat karena ia sering dihadapkan dengan masyarakat modern sehingga terasa ada konotasi negatif. Tetapi dengan pengakuan ini "masyarakat tradisional" yang umumnya ada di daerah-daerah berhak untuk mengembangkan "kebudayaan daerah"nya masing-masing. Ketentuan yang mirip dengan Pasal ini adalah ketentuan Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/998 yang menyatakan : "Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hal ini juga dapat dibandingkan dengan salah satu prinsip pembaruan Agraria dan Pengelolaan sumberdaya alam yang disebutkan dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 yang menyatakan "mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria/sumberdaya alam".

- c. Adanya penambahan ketentuan baru berupa Pasal 36 A berkenaan dengan lambang negara. Pasal tersebut menyatakan "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Sekalipun lambang negara dengan semboyan tersebut diatas secara formal telah dipergunakan sejak tahun 1951 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 (LN. 1951 No. 111) tentang Lambang Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950, namun secara konstitusional baru dilakukan setelah Negara Republik Indonesia berusia lima puluh lima tahun. Diakuinya Bhinneka Tunggal Ika (sekalipun

beragam nama tetap satu) sebagai semboyan Nasional dalam UUD mengandung konsekwensi pengakuan terhadap keberagaman budaya - dari berbagai kelompok etnis namun ia masih berada dalam bingkai budaya nasional sebagai lambang adanya Integrasi nasional.

Adanya berbagai ponegasan sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai arti penting pada satu sisi akan memperkuat kebudayaan nasional dalam artian kukuhnya integrasi nasional sedangkan pada lain pihak memberi angin segar berkembangnya kebudayaan daerah yang oleh sementara pihak dikhawatirkan kalau tidak dikelola secara baik dapat menciptakan disintegrasi nasional. Memang kebangkitan kebudayaan daerah tidak secara serta merta akan berkembang menjadi disintegrasi nasional bahkan sebaliknya malah akan lebih memperkuat integrasi nasional bilamana ia dikembangkan secara baik

Semenjak era reformasi sudah mulai timbul kekhawatiran tentang mula goyahnya integrasi nasional. Konflik-konflik sosial yang berhasil diredam oleh Pemerintah orde baru selama tiga dasawarsa untuk menunjukkan begitu kukuhnya integrasi nasional, dalam era reformasi mulai mencuat terjadi diberbagai tempat. Konflik etnis dan konflik agama telah muncul, tuntutan otonomi daerah yang bersifat luas dan khusus mulai bermunculan dengan menonjolkan kekhasan daerahnya masing-masing dinilai oleh sementara pihak sebagai sebuah kecenderungan ke arah proses disintegrasi nasional

Kebangkitan masyarakat adat yang dicanangkan oleh Kongres Masyarakat adat Nusantara(17-22 Maret 1999) di Jakarta yang juga melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Masyarakat Nusantara (AMAN) adalah salah satu fenomena kebangkitan masyarakat lokal dan kebudayaan daerah. Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh AMAN disebutkan bahwa Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini pada pokoknya menggugat negara. Posisi masyarakat adat terhadap negara harus ditata

ulang. Pengingkaran terhadap kedaulatan masyarakat adat dengan sendirinya melemahkan kekuasaan negara.

Statemen yang merupakan pandangan dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang posisi masyarakat adat terhadap negara diawali dengan penegasan "kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara" adalah pernyataan yang paling tajam dan bukan mustahil menjurus pada terjadinya disintegrasi di Indonesia. Kemudian penegasan dalam tuntutan mengatakan : " untuk itu kami masyarakat adat nusantara dengan ini menyatakan/menggugat pemerintah Republik Indonesia karena ternyata telah melakukan peminggiran, penindasan, penghancuran secara sistematis, perampasan dan pengusuran hak masyarakat serta melakukan pelanggaran HAM (politik, okonomi dan sosial budaya).

Kemudian DEKLARASI AMAN yang dicetuskan pada tanggal 17 Maret 1999 menyatakan :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya :
3. Jauh sebelum negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini
4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang tidak berbeda dengan makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri
5. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara se-nusantara wajib untuk saling

bahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang layak dan berdaulat.

Penegasan ini menuntut apa yang dikemukakan di atas untuk melakukan penataan ulang tentang hubungan antara negara dan masyarakat adat.

Masyarakat daerah, memang melalui solusi seperti itu tidak mungkin diterapkan sepenuhnya untuk masyarakat-masyarakat lokal lainnya. Karena itu upaya lain yang ditempuh adalah dengan pemberian otonomi yang lebih luas bahkan dalam bentuk otonomi khusus sebagaimana yang diberikan kepada Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dan Propinsi Papua yang juga ingin di contoh oleh daerah-daerah lain. Apakah ini merupakan solusi yang terbaik untuk mempertahankan adanya integrasi nasional dan dijadikan sebagai penangkal proses disintegrasi nasional perlu untuk diteliti dan dikaji lebih jauh.

# **MASALAH KONFLIK ANTAR SUKU DAN AGAMA DALAM KONTEKS MENYIAPKAN FIGUR PEMIMPIN YANG KHARISMATIK ARIF DAN BIJAKSANA**

Oleh: Drs. Hariyadi, M.Hum

## **PROLOG : KERAWANAN SOSIAL**

Belum pernah dalam sejarah pasca-kemerdekaan bangsa dan negara terjadi keporak-porandaan "bangsa" dan "demokrasi" - dua aspek yang saling berkaitan dalam proses pertumbuhan kenegaraan kita, seperti yang sekarang kita alami. Ada saat-saat ketika ideologi menyebabkan bangsa terpecah atas berbagai pasangan konflik aliansi. Maka situasi konflik antara komunisme dengan modernisme Islam sewaktu-waktu berubah menjadi konflik terbuka. Ada pula masanya ketika kecenderungan sentralisme yang dianggap eksklusif berhadapan keras dengan regionalisme yang tak sabar, tetapi sekarang? Apa saja corak pasangan yang secara teoritis bisa dilihat sebagai berada dalam situasi konflik yang tidak pernah tampil dalam konflik terbuka? Antara desa yang bertetangga, murid-murid dari sekolah yang berdekatan, pendatang dengan penduduk setempat, pemakai jalan dengan penduduk yang tinggal di pinggir jalan, aparat pemerintah dengan pedagang kecil atau pengemudi ojek, preman yang berkeliaran dengan penduduk setempat, kesatuan etnis yang berbeda, pribumi dengan non-pribumi, Islam dan Kiisten, kaya dan miaskin, pengikut doktrin yang orthodox dengan yang dianggap heteredoks, bahkan antara militer dengan polisi, dan entah pasangan situasi konflik apa lagi. Bahkan lebih sering berbagai pasangan dalam situasi konflik menemukan afinitas dan menghasilkan konflik terbuka yang lebih keras. Kesemuanya bukan saja menunjukkan ciri-ciri dari terjadinya disintegrasi sosial. Tetapi juga anarki sosial. Jika ini saja belum cukup, integrasi nasional dan teritorial pun telah pula menjadi taruhan.

Dalam situasi yang penuh kegalauan ini ada kalanya primordialisme lama merupakan perlindungan terhadap ancaman yang dianggap datang dari kelompok lain atau menjadi landasan sikap agresif terhadap yang lain, tetapi tak jarang pula landasan ini sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Corak pluralitas yang telah semakin kompleks telah tidak lagi bisa dengan begitu saja dipasangkan dengan primordialisme dalam pengertiannya yang semula.

Keabsahan dari mitos, reifikasi dan penetrasi primordialisme yang subversif terhadap pluralisme seakan-akan mendapat pembenaran selama dukungan dari sistem kekuasaan yang otoriter dan sistem patronage tergoncang oleh krisis moneter maka pilar-pilar yang mendukung sistem itu pun mulai saling bertumbangan. Maka ketika itu bukan saja segala kemampuan untuk menjaga riak-riak dinamis yang dipantulkan oleh tatanan sosial yang pluralistik menjadi problematik yang serius. Ketika itulah realitas semu yang diciptakan oleh mitos, reifikasi konsep dan penetrasi unsur primordialisme yang subversif pun mendapat tantangan yang keras dan perkembangan realitas sosial yang sesungguhnya.

Seandainya proses pembangunan pada waktu lalu tidak dilihat hanya sebagai tonggak-tonggak statistik yang pasif, melainkan sebagai sesuatu yang bergerak, maka kita akan bertemu dengan gerak peralihan sosial yang seakan-akan tanpa henti. Maka tampaklah bahwa memang sesungguhnya esensi pembangunan itu adalah perubahan. Demikianlah selama proses pembangunan kita antara lain berhadapan dengan percepatan dari mobilitas geografis, yang didorong urban bias dan konservatisme dalam penentuan wilayah pertumbuhan.

Dari sudut mana pun ingin dilihat, kesan akan kuatnya bias kekotaan dari strategi pembangunan tak terhindarkan. Ketika pertumbuhan ekonomi telah dijadikan sebagai strategi utama, dengan dalih "membesarkan kue, sebelum dibagi-bagi" dan pada saat pilihan telah dijatuhkan pada usaha ke arah terwujudnya

masyarakat industri, maka sengaja atau pun tidak penekanan pada pengembangan kota pun seperti tak terhindarkan. Strategi dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mempunyai bias kota inilah yang menyebabkan percepatan yang sangat hebat dari urbanisasi. Baik sebagai pekerja industri maupun sebagai pekerja konstruksi bangunan yang bersifat musiman para pekerja mendatangi kota yang dianggap serba menjanjikan. Gejala ini bukan saja menyebabkan penetrasi urbanisme ke dalam kehidupan desa, sebuah gejala kultural yang diperkirakan terjadi dalam konteks ekonomi kapitalistik, tetapi juga penyebaran proletarianisme di kota-kota. Maka di kota-kota pun berdiam komunitas-komunitas yang menjadi dan diperlakukan sebagai golongan yang kalau ungkapan lama dari Toynbee boleh dipakai - "in but not of the society".

Di samping itu ketidak seimbangan regional discrepancy juga pembangunan nasional yang telah dilancarkan juga menyebabkan kota-kota dan daerah-daerah tertentu memantulkan efek magnetis yang kuat bagi terjadinya migrasi. Dengan begitu, praktis menjadikan setiap kota, di manapun di tanah air kita, dan daerah-daerah tertentu, sebagai mozaik dari keragaman etnisitas dan agama. Sekarang tidak ada satu kota pun bisa menyebutkan dirinya relatif homogen. Perbedaan dari struktur kependudukan di antara kota-kota lebih banyak ditentukan oleh kadar heterogenitas yang dialaminya dan kemampuan kota untuk melebur communities of strangers, dengan simbol dan kelembagaan khas masing-masing, apakah rumah peribadatan, organisasi orang sekampung dan sebagainya, ke dalam sebuah masyarakat kota yang bersifat inklusif.

Pembangunan ekonomi bukan saja mempercepat mobilitas geografis, baik spontan dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota, maupun yang diatur dalam program transmigrasi dan diharapkan menjadi pendorong pembangunan pertanian, tetapi juga memperluas kesempatan bagi mobilitas sosial, yang dimungkinkan oleh kekuatan pasar, pendidikan dan birokrasi.

Mobilitas sosial ini menambah kompleksitas dari kemajemukan sosial yang disebabkan oleh mobilitas geografis. Kalau dinamika pasar adalah sebuah wilayah kompetitif yang "tak mengenal bendera" dan keberhasilan dalam dunia pendidikan sangat tergantung kepada kemampuan ekonomis dan intelektual, maka aliansi politik yang tepat adalah saluran terpendek untuk mendapatkan tempat data sistem birokrasi. Dalam suasana ini bukanlah hal yang aneh jadinya kalau pendatang bisa lebih berhasil dalam usaha menaiki tempat yang lebih tinggi dalam proses mobilitas sosial. Dalam dinamika pasar yang enggan untuk mengenal prejudice bukan tak mungkin para pendatang lebih berhasil memenangkan persaingan.

Demokrasi pendidikan, mekanisme pasar dan birokratisasi kehidupan politik adalah unsur yang dapat menyebabkan dipertanyakan dan bahkan digugahnya kemantapan sistem hirarki dan status yang telah berurat berakar. Pola distribusi wibawa dan kekuasaan yang selama ini diterima sebagai sewajarnya saja mulai mengalamn goncangan. Pendidikan dan pasar yang semakm terbuka menghasilkan "orang baru" yang menuntut tempat yang sesuai dengan tingkat mobilitas yang dialaminya. Masalahnya pun menjadi lebih rumit jika sejak semula berbeda secara horizontal. Ketika inilah primordialisme mengalami transformasi menjadi pluralisme yang kompetitif. Birokratisasi data kehidupan politik, menjadikan suasana kompetitif harus diselesaikan dalam suasana aliansi politik yang didominasi oleh sistem kekuasaan, bukan oleh kecenderungan sosial politik masyarakat.

Sudah dapat diperklrakan bahwa situasi konflik yang dilahirkan oleh kompleksitas dari hubungan kemajemukan horizontal, yang ditentukan oleh perbedaan ras, etnis dan agama dengan kemajemukan vertikal yang bersifat hirarkhis dan yang didapatkan dalam situasi persaingan yang sangat keras di lkota-kota. Semakin kota tersebut menjadi tarikan ekonomi dan pusat persaingan birokrasi maka semakin intens pulalah situasi konflik

itu. Meskipun demikian, bolehlah dikatakan bahwa tanpa kecuali semua ibukota propinsi merupakan jaringan dari pasangan situasi konflik yang bersifat multidimensional.

Konsep situasi konflik hanyalah mengacu bahwa pasangan yang berada dalam situasi ini secara hipotetis dimungkinkan untuk terlibat dalam kompetisi bahkan konflik untuk mendapatkan status dan wibawa yang lebih, kekuasaan atau kekayaan yang mempunyai sumber terbatas. Akan tetapi kesemuanya tak lebih daripada kemungkinan analitis belaka selama conflict management yang diperlihatkan wibawa dan wewenang dari pemegang kekuasaan masih kuat dan dihormati. Semuanya barulah merupakan potensi konflik saja kalau saja kesempatan ekonomi yang tersedia tidak menutup kemungkinan golongan-golongan yang tertinggal dalam persaingan untuk mendapatkan bagian mereka, meskipun kecil.

Kalau saja segala hasrat normatif yang tumbuh dalam konteks pluralitas yang kompleks ini mendapat saluran yang wajar maka bisa juga diperkirakan bahwa kesemua situasi konflik yang berdimensi banyak ini akan berangsur-angsur menemukan pola peleburannya, apalagi kalau saja sistem kepemimpinan lokal yang didukung oleh tradisi masyarakat madani sehat dan kreatif.

## **INTERAKSI, KONFLIK DAN KEPEMIMPINAN**

Ada tiga faktor yang menentukan corak interaksi berbagai kelompok etnis dalam suatu masyarakat majemuk : (1) kekuasaan (power); (2) persepsi (perception); dan (3) tujuan (purpose). Kekuasaan merupakan faktor yang utama (primary) dalam menentukan situasi interaksi berbagai etnis tersebut, sedangkan faktor-faktor lainnya ditentukan oleh faktor utama ini. Kelompok etnis yang memegang kekuasaan disebut juga sebagai *dominant-group* atau kelompok dominan yang menentukan “aturan permainan” dalam masyarakat majemuk tersebut (Royce, 1982:3).

Kekuasaan kelompok dominan berasal dari kombinasi (1) kekuatan material; (2) ideologi dan (3) hak historis. Kekuatan material meliputi kekuatan ekonomis dan demografis, yaitu penguasaan sumber hidup dan jumlah manusia (manpower). Sedangkan faktor ideologi bertalian dengan tingkat budaya (civilisasi) yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu. Hak historis menentukan status kelompok etnis tersebut apakah dia dianggap sebagai tuan rumah (host pop), yang disebut juga sebagai penduduk asli, atau pendatang (migrant) dalam suatu wilayah pemukiman tertentu. Bruner (1969) seorang antropolog Amerika, berdasarkan penelitiannya di Indonesia mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang menentukan suatu kelompok etnis itu berstatus dominan, yaitu : (1) faktor demografis; (2), politis dan (3) budaya lokal (setempat). Dalam hubungan ini Bruner mengemukakan salah satu contoh, kelompok etnis Sunda di kota Bandung menduduki status dominan terhadap kelompok etnis lainnya, karena secara kombinasi etnis Sunda memiliki keunggulan dalam tiga faktor tadi dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di kota itu.

Kelompok dominan dalam masyarakat majemuk mencoba berfungsi sebagai "wadah pembauran (melting pot)" kelompok-kelompok etnis lainnya. Sedangkan kelompok-kelompok minoritas (subordinate-group), mereka menggunakan budaya kelompok etnis yang dominan (super ordinate-group) sebagai orientasi akulturasi dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari tampak, bahwa kelompok-kelompok minoritas ini berusaha menggunakan bahasa, etiket, pakaian, sistem budaya, tipikal makanan dari kelompok dominan. Sebab itu, kelompok etnis yang dominan ini berfungsi juga sebagai kelompok budaya yang dominan (dominan - culture). Demikianlah misalnya, orang Banjar yang tinggal di kota Bandung berusaha untuk mempelajari bahasa Sunda, bertingkah laku lebih halus seperti orang Sunda, membiasakan diri dengan makanan tipikal Sunda, agar dapat diterima dalam pergaulan masyarakat majemuk kota Bandung

tersebut. Tentu saja dalam kehidupan intern kelompok-kelompok etnis minoritas ini masih banyak yang mempertahankan kesetiaan primordial mereka, seperti penggunaan bahasa daerah masing-masing, adat dan kebiasaan lainnya yang dianggap perlu untuk mempertahankan, identitas etnis mereka. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa di kalangan generasi kedua atau ketiga dari kelompok ini terdapat semacam "erosi (menipisnya)" pengetahuan mereka terhadap "isi" dari kesetiaan primordial tersebut, walaupun keadaan ini bukan otomatis berarti "pengingkaran" terhadap identitas etnis mereka.

Pada masa kolonial orientasi akulturasi nasional kelompok-kelompok etnis Indonesia, termasuk kelompok Cina perantauan ialah kepada kebudayaan Belanda. Tidak ada satu kelompok etnis bangsa Indonesia saat itu yang dapat menjadikan dirinya sebagai kelompok dominan, sebab kekuasaan politis dan ekonomis tidak berada di tangan bumiputera, sebab itu pula orang Cina di pulau Jawa, umpamanya dalam proses akulturasinya tidak berorientasi kepada kebudayaan Jawa, karena kebudayaan Jawa pada saat itu berada dalam status inferior. Setelah kemerdekaan, kelompok-kelompok etnis di Indonesia termasuk orang Jawa telah menjadi tuan rumah di tanah airnya sendiri. Perubahan situasi ini telah turut mengubah orientasi akulturasi orang Cina perantauan di Indonesia. Ternyata di Jawa dewasa ini orang-orang Cina perantauan, terutama generasi kedua yang lahir di Jawa telah lebih banyak berorientasi ke kelompok elite (priyayi) Jawa, terutama tampak dalam pemakaian nama, bahasa, dan sikap atau tingkah laku dalam pergaulan.

Kelompok-kelompok etnis dalam masyarakat majemuk di perkotaan sesudah kemerdekaan sebagian besar berorientasi kepada kelompok yang berstatus sebagai "dominant-culture", seperti Semarang, Jogja, Surabaya kepada kelompok etnis Jawa, Makasar kepada Bugis, Bandung kepada Sunda. Keadaan ini disebabkan karena "kebudayaan nasional" sebagai wadah

asimilasi yang ideal untuk seluruh kelompok etnis belum ada (kecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan).

Faktor kedua dalam interaksi berbagai etnis ialah faktor persepsi, yakni bagaimanakah kelompok etnis yang satu mengamati dan memandang kelompok lainnya. Bagaimanakah mereka memandang masyarakat secara keseluruhan. Kita sangat jarang mengamati dan memandang sesuatu tanpa bias, karena orang mengamati dan memandang sesuatu seperti apa yang diinginkannya dan membutuhkan mata terhadap apa yang tidak diharapkannya. Persepsi antar etnis mengambil bentuk konkrit dalam simbol dan stereotype. Simbol dan stereotype terbentuk dalam pergaulan antar etnis, jadi bukan hasil dari proses satu arah, dan bukan pula terjadi dalam situasi yang terisolasi. Persepsi suatu kelompok terhadap kelompok lain mungkin pada suatu situasi bisa sesuai, tetapi mungkin pula bertentangan pada situasi yang lain, karena kedua manifestasi pengamatan ini (lambang dan stereotype) dasar operasinya bergerak antara mitos dan realitas.

Kelompok etnis tertentu dapat dikenal dari lambang-lambang yang dipergunakannya, seperti bentuk rumah, pakaian, warna yang digemari, **dialek**, gaya hidup dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Lambang-lambang ini merupakan "cap" suatu kelompok etnis yang diwariskan secara turun-temurun. Dari sisi lain orang juga memberikan "cap" kepada suatu kelompok etnis dalam bentuk stereotype, seperti kasar, suka berkelahi, mau menang sendiri, penurut, setia, halus, rajin, dan lain-lain. Stereotype ini akan berangsur-angsur berubah apabila kontak antar etnis lebih banyak didasarkan kepada realitas dari pada mitos. Tetapi, hal ini akan muncul kembali apabila terjadi ketegangan atau konflik. Kedua belah pihak akan mendasarkan kesalahan pihak lain kepada stereotype di atas.

Selanjutnya, bentuk interaksi berbagai etnis ditentukan pula oleh tujuan dan interest (kepentingan-kepentingan) tertentu dari masing-masing kelompok etnis. Kelompok etnis, sebagaimana

juga kelas, merupakan kelompok interest (interest-group). Pengamatan ahli-ahli ilmu Sosial dewasa ini banyak membuktikan adanya kecenderungan menyatunya kelas dan kelompok etnis, karena kedua kategori sosiologis ini merupakan kelompok interest (Cohen 1974, 1976 Glazer & Moynihan 1976, Parson 1976). Usaha untuk meraih kepentingan kelompok etnis ini dalam masyarakat mejemuk banyak dilakukan atas kepentingan dasar lain, seperti kepentingan agama, pembangunan daerah, golongan ekonomi tertentu, dan lain-lain. Usaha untuk menutupi kepentingan etnis dalam masyarakat majemuk diperlukan agar tidak kelihatan atau dituduh eksklusif, ekstrem, daerahisme, dan lain-lain atau juga agar tidak terjadi bentrokan langsung dengan kepentingan kelompok etnis lainnya atau dengan kepentingan nasional.

Apabila pada suatu situasi terdapat keinginan sementara kelompok etnis untuk maju menduduki posisi "dominant-culture", maka keadaan ini akan menimbulkan persaingan yang sengit antara kelompok etnis. Konflik-konflik dapat saja terjadi mulai dari terminal taksi, pasar-pasar, kantor-kantor pemerintah dan swasta, sampai ke sekolah-sekolah. Konflik-konflik ini apabila ditelusuri tidak terlepas dari benturan-benturan kepentingan kelompok-kelompok etnis untuk memperebutkan 'posisi dominan' dalam berbagai lapangan hidup tersebut. Koalisi-koalisi kekuatan antar kelompok etnis sering terlihat dalam arena pertarungan ini, dan hampir merupakan "dagang sapi" sebagaimana layaknya suatu pembentukan kabinet dalam suatu pemerintahan. Dalam setiap penyusunan tim kerja umpamanya yang dipentingkan terutama adalah representasi kekuatan kelompok-kelompok etnis dalam tim tersebut, bukan refleksi dari kemampuan tokoh atau pribadi-pribadi yang diutamakan. Persaingan ini dapat menimbulkan suasana kehidupan segregatif

Masalah yang kita hadapi sebagai konsekwensi dari masyarakat yang majemuk adalah masalah konflik internal, baik yang bercorak vertikal, antara negara dan masyarakat atau

pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial, maupun horizontal, yang sedang dan masih mengancam integrasi nasional dan sosial. Konflik internal yang terbuka dan bahkan bersimbah darah dan air mata adalah hal yang biasa. Di manapun dan bilamanapun konflik internal yang keras ini bisa terjadi. Di negeri yang paling terkebelakang ataupun di negara yang termaju, dulu, sekarang, dan mungkin juga nanti, konflik internal dalam masyarakat bangsa sendiri atau negara sendiri, baik pada tingkat lokasi yang terkecil, maupun pada tahap yang bisa mengancam keutuhan bangsa bukanlah hal yang teraneh. Namun berbagai mekanisme sosial, politik dan ekonomi, akhirnya bisa juga menyelesaikan konflik itu. Berapa kalikah selama sekian tahun kemerdekaan kita konflik vertikal, yang disebut pemberontakan, kerusuhan, demonstrasi berdarah, telah terjadi? Berapa kali pulakah konflik horizontal, yang biasanya diwujudkan dalam keributan kota atau "perang" antar desa, yang pernah dialami masyarakat kita? Andai pun tidak terlalu cepat bisa diatasi, hal-hal yang strategis untuk mengatasi sosial yang terbuka ini biasanya tidak terlalu sukar untuk ditemukan. Mengapakah sekarang setelah sekian lama berlangsung setiap kali tanda-tanda perbaikan didapatkan namun dalam sedetik saja, kesemuanya sirna begitu saja dan konflik tersebut pun "revitalisasi" yang kadang-kadang lebih mengerikan?

Apa yang dipaparkan tadi untuk mengingatkan kita, bahwa konflik horizontal yang sedang kita alami bukanlah letupan seketika, dan bukan pula hura-hura, yang mungkin menjadikan segolongan masyarakat sebagai sasaran, tetapi konflik komunal yang berlanjut. Apapun sebab dan alasannya konflik komunal yang sampai kini masih menggoncang kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan kita ialah yang terjadi di Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, bahkan juga pada tahap yang lebih rendah di Sulawesi Selatan.

Barangkali tidaklah terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa faktor awal yang menyebabkan meletusnya konflik

horizontal terletak pada ketimpangan dalam mobilitas geografis dan sosial-ekonomis. Bukanlah sebuah kebetulan kalau daerah yang paling rawan mengalami kedua corak konflik internal itu adalah juga penerima mobilitas geografis yang penting, yang juga dengan sangat keras memperhatikan betapa mobilitas itu sekaligus membangkitkan suasana deprivation di kalangan penduduk setempat. Tidaklah hal yang aneh kalau konflik sosial juga bisa terjadi di daerah yang mengalami demokratisasi pendidikan telah memberikan kesempatan kepada kelompok sosial yang selama ini tersingkir dari mainstream kebirokrasian - menuntut tempat mereka, sedangkan kelompok lama sudah terlanjur beranggapan birokrasi adalah hak sejarah yang tak bisa digangga-gugat. Karena itu bisa juga dipahami kalau dalam waktu sebentar saja konflik yang bermula dari ketimpangan sosial-ekonomis ini dengan mudah tersalin dalam bahasa agama dan etnis. Sang pendatang, di tengah kemiskinan penduduk setempat dengan mudah bisa juga ditandai sebagai 'orang agung' karena mobilitas sosial ekonomis yang tidak seimbang. Kalau telah begini, maka jalan ke arah didapatkannya pemecahan pun bukan saja bertambah menjauh, konflik pun semakin menajam juga. Selanjutnya? Tahap konflik pun dimasuki - setelah sosial ekonomis, kemudian etnis dan agama - yaitu dendam, yang mungkin tak direkam tak hanya dalam ingatan pribadi atau keluarga, tetapi juga komunitas, dalam ingatan kolektif. Justru yang lebih memprihatinkan kita semua adalah masyarakat pun tak berdaya lagi menyelesaikan konfliknya sendiri.

Taufik Abdullah mengemukakan bahwa sumber utama dari krisis ketidak berdayaan masyarakat menyelesaikan konfliknya sendiri adalah : pertama, kehancuran sistem kepemimpinan lokal, dan kedua, kerusakan tatanan masyarakat yang organik. Selama pemerintah pusat dan daerah masih kuat dan mungkin juga berwibawa, baik karena sistem politik yang otoriter, maupun karena sukses ekonomi, kelemahan ini sama sekali tak dirasakan. Bahkan sesungguhnya kekuatan pemerintah pusat dan daerah itu

didukung oleh proses pelemahan unsur-unsur kemasyarakatan. Dengan kata lain kekuatan negara sesungguhnya bersumber dari keberhasilan melemahkan masyarakat. Ketika krisis terjadi dan pada saat kekuasaan pemerintah mengalami goncangan yang hebat, apakah yang kita dapatkan selain dari kebekuan pemikiran dan ketiadaan pemimpin yang berwibawa, apalagi yang bisa diharapkan sebagai mekanisme keberdayaan masyarakat ketika badai konflik melanda dengan cepat dan dahsyat, selain daripada munculnya pemimpin kerumunan yang sibuk menyatakan 'perang' kepada kelompok lain. Ketika konflik vertikal dan horizontal terjadi siapakah dan pranata tradisional yang manakah serta organisasi sosial yang mana pula yang akan menolong mengatasinya? Dalam konteks konflik vertikal dengan siapakah dan organisasi manakah yang secara berwibawa bisa mewakili masyarakat daerah yang bergejolak? Ketika konflik horizontal terjadi siapakah yang sanggup mengingatkan masyarakat akan pentingnya rasionalitas dan toleransi? Pranata tradisional yang manakah yang bisa menyelesaikan konflik?

Pada waktu ini keadaan telah lain, komponen-komponen kepemimpinan dan kekuasaan dalam masyarakat masa kini memang masih tetap sama, yaitu : wewenang, kewibawaan, kharisma, dan kekuatan fisik, namun tata urut menurut pentingnya telah berubah, dan sebagai akibatnya persyaratan sifat-sifat bagi pemimpin masyarakat masa kini juga berubah. Hal ini disebabkan karena sumber kekuasaan dan wewenang dalam kenyataan Hidup masyarakat masa kini bukan lagi para dewa atau roh nenek moyang, bukan pula kekuatan sakti yang terhimpun di dalam pusaka-pusaka keramat, tetapi sumber kekuasaan dan wewenang seorang pemimpin masyarakat pada zaman ini adalah warga masyarakat itu sendiri. Pemimpin masyarakat masa kini tergantung pada warga masyarakatnya, wewenangnya adalah berdasarkan dukungan dari sebagian besar warga masyarakatnya, dan dengan demikian ia akan berusaha untuk tetap dekat pada rakyat yang dipimpinnya. Ia tidak dapat lagi

mengisolasikan dirinya dari mereka seperti yang dilakukan oleh seorang pemimpin tradisional yang menjauhi warga masyarakatnya dengan dalih menjaga kesucian dan kekeramatannya, agar tidak tercemar oleh rakyat yang hina. Isolasi juga tidak mungkin lagi, karena warga masyarakat masa kini makin lama makin terpelajar, dan karena media massa dalam masyarakat masa kini mendorong adanya sistem kepemimpinan yang sifatnya terbuka (Keller, 1984: 275).

Koentjaraningrat menjelaskan, seorang pemimpin masyarakat masa kini memerlukan dukungan para warga masyarakatnya. Dukungan ini menyebabkan bahwa komponen kewibawaan menjadi komponen yang penting dan kewibawaan itu menuntut popularitas dari seorang pemimpin masa kini. Sebaliknya, popularitas itu ada karena ia memiliki kapasitas, keahlian, dan ketrampilan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat pada umumnya, dan juga karena ia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan cita-cita dan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakatnya.

Walaupun kewibawaan yang berdasarkan popularitas merupakan komponen kekuasaan yang terpenting bagi seorang pemimpin masa kini, yang juga menjadi landasan wewenangnya, tentu saja tidak ada salahnya bila seorang pemimpin masyarakat masa kini memiliki sifat-sifat spritual yang dapat mengisi komponen kharisma.

## **EPILOG**

Kerawanan sosial muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka ketika pertumbuhan ekonomi telah dijadikan strategi utama dengan perimbangan yang tidak proporsional bersama-sama sektor kehidupan yang lain. Konflik terbuka terutama yang kita alami adalah konflik internal ternyata tidak hanya berdimensi horizontal tetapi juga berdimensi vertikal.

Perlu kita sadari dan kita fahami apa yang kita sebut konflik, di mana pun bisa terjadi. Tetapi yang perlu jadi perhatian adalah mengapakah konflik dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, ketika tanda-tanda perbaikan mulai terlihat dalam seketika tanda-tanda perbaikan tersebut sirna dan konflik pun mendapatkan kekuatannya kembali yang kadang-kadang lebih mengerikan. Sungguh menyedihkan lagi ternyata masyarakat pun tidak berdaya lagi menyelesaikan konfliknya sendiri.

Sumber utama dari krisis ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan konfliknya sendiri adalah kehancuran peranan dan sistem kepemimpinan lokal, dan kerusakan tatanan masyarakat yang organik. Untuk itu perlu dibangun dan dihidupkan kembali peranan dan sistem kepemimpinan lokal yang benar-benar secara riil berakar dan mendapat dukungan dari masyarakat serta diberdayakannya kembali pranata-pranata sosial yang selama ini kehidupannya dikebiri.

# **KRISIS KEBUDAYAAN, KONFLIK DAN KEKERASAN**

**Oleh : Mus Huliselan**

## **Pendahuluan**

Pertama-tama saya minta maaf karena keterbatasan waktu untuk menyusun makalah ini dengan baik, sehingga mungkin tidak memuaskan dan juga atas ketidak hadirannya saya dalam acara ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan dalam hal ini Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon, yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan makalah ini.

Dalam era globalisasi dimana batas-batas budaya menjadi kabur justru diperlukan satu ketahanan diri dengan nilai budaya yang kuat untuk mencegah hilangnya kebudayaan nasional dan local. Kita sadari bahwa globalisasi informasi menuntut berbagai perubahan nilai dari berbagai budaya nasional dan local agar dapat eksis sebagai Warga Dunia. Dipihak lain penerapan otonomi daerah dalam sistim kenegaraan kita telah mendorong berbagai masyarakat etnik menoleh kembali ke kebudayaan lokalnya sebagai landasan dan pijakan identitas diri yang telah hilang selama ini akibat uniformitas di berbagai bidang kehidupan social budaya masyarakat. Uniformitas diterapkan Orde Baru selama puluhan tahun ternyata telah langsung sebagai penyebab melemahnya dan bahkan telah menghilangkan berbagai nilai luhur dari kebudayaan local masyarakat etnis di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terganggunya keseimbangan hubungan sosial dan kreatifitas diri. Apakah ini dapat kita namakan sebagai krisis kebudayaan ? Kalau ini dapat kita anggap sebagai krisis kebudayaan maka konflik dan kekerasan yang belakangan ini kita alami adalah buah dari krisis itu.

Sesuai dengan permintaan panitia (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon), makalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan di atas. Mudah-mudahan makalah ini bisa memberi cukup informasi bagi kita semua dan terutama bagi pemrakarsa dalam menjawab tantangan masa depan yang serba tidak berketeraturan itu.

## **Dinamika Kebudayaan**

Berbicara tentang kebudayaan dalam satu makalah seperti ini tentulah tidak cukup sebab apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan adalah satu cakupan yang sangat luas dan kompleks. Untuk itu sebelum berbicara tentang kebudayaan saya ingin lebih dahulu memberikan pengertian tentang apa itu kebudayaan dalam penulisan ini agar dapat menjadi pegangan bersama dalam memahami uraian ini. Ada terdapat beratus-ratus definisi tentang kebudayaan tetapi dalam penulisan ini yang dimaksudkan dengan kebudayaan adalah: **Seluruh pengetahuan manusia yang diperoleh dari hasil pengalaman dan interpretasi terhadap lingkungan hidupnya.**

Kebudayaan oleh pendukungnya selalu dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dipakai sebagai kompas atau penuntun tingkah laku dan tindakan yang dilakukan atau diambil. Ia dipakai sebagai penentu atau pengukur mana yang baik dan mana yang buruk mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Dalam status yang demikian kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis tetapi dia amat dinamis. Kedinamisannya, membuat kebudayaan selalu tumbuh dan berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian memungkinkan pendukungnya mampu bertahan terhadap sesuatu tekanan atau perubahan lingkungan budayanya. Kalau kebudayaan itu kaku dan tidak dinamis maka ia akan hilang atau lenyap ditekan perubahan hal ini menyebabkan pendukungnya pun akan hilang sebagai satu masyarakat budaya

tersebut. Dari gambaran diatas terlihat jelas betapa besar pengaruh satu kebudayaan terhadap pembentukan kelakuan, sikap dan tingkah laku pendukungnya. Perbedaan kebudayaan akan berpengaruh pada perbedaan sifat dan kelakuan. Seseorang mungkin akan bereaksi keras pada sesuatu persoalan yang muncul karena persoalan tersebut sangat bertentangan dengan sistim nilai kebudayaan yang didukungnya. Sedangkan bagi orang lain, reaksinya biasa-biasa saja karena sistim nilai budayanya dapat menerima persoalan itu.

Setiap kebudayaan memiliki kekuatan tersendiri yang memungkinkan pendukungnya untuk tetap bertahan hidup dan menghasilkan karya-karya besar sesuai dengan perkembangan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu kita tidak dapat katakan bahwa ada kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain atau satu kebudayaan lebih rendah dari kebudayaan lainnya, Apa benar kebudayaan Eropah (Barat) lebih tinggi dari kebudayaan Asia (Timur) ? Apakah dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki oleh kebudayaan barat lalu serta merta dapat kita katakana bahwa kebudayaan mereka lebih tinggi dari kebudayaan timur ? Tentu sama sekali tidak benar. Kedua kebudayaan ini adalah sama sebab kebudayaan barat bertumpu pada ratio sedangkan kebudayaan timur pada intuisi. Kebudayaan barat selalu menggunakan akal dan pikiran untuk memahami alam sedangkan kebudayaan timur menggunakan hatinya (perasaannya). Dengan demikian kita melihat bahwa dalam memahami alam lingkungan kebudayaan barat akan berusaha menggunakan pikirannya dengan demikian alam akan di eksplorasi dan di eksploitasi untuk mendapat jawabannya. Kebudayaan timur, tidak demikian, untuk memahami ini mereka tidak mengeksplorasi dan mengeksplorasi tetapi dengan intuisi mencoba memahami alam itu. Misalnya ada sekuntum kembang yang indah berwarna merah bagi orang barat yang mempelajarinya ia akan mencari tahu kenapa kembang itu berwarna merah maka untuk itu dia mengambilnya dan

merobeknya untuk diteliti. Sedangkan seorang dengan kebudayaan timur dia akan meneliti tanpa mengganggu kembang itu sebab merusak baginya tidak sesuai dengan budayanya. Contoh diatas menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam memahami alam, yang mana kebudayaan timur akan berusaha hidup selaras dengan alam sedangkan kebudayaan barat lebih menitik beratkan pada mengeksploitasi alam.

Karena itulah kebudayaan barat selalu berusaha mencari tahu dan membongkar misteri alam dan untuk itu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mereka berkembang dengan pesat. Sebaliknya dalam kebudayaan timur menjaga dan melindungi alam menyebabkan tidak ada upaya yang kuat untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk membongkar misteri alam ini. Maka dapat dipahami kenapa kebudayaan barat lebih unggul dalam pengembangan teknologi tetapi sebaliknya kebudayaan timur unggul dalam kearifan melindungi alam. Karena keingintahuan yang begitu besar dari kebudayaan barat terhadap alam, kebudayaan ini dianggap tidak menghargai dan merusak alam sedangkan kebudayaan timur melindungi alam karena nilai dasarnya yang ingin hidup selaras dengan alam itu. Kedua kebudayaan ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing dan untuk itu masing-masing kebudayaan harus belajar dari kebudayaan yang lain untuk mengambil keunggulan kebudayaan masing-masing.

Saat ini kita masih menyaksikan bahwa masyarakat pendukung kebudayaan barat untuk mencari ketenangan batin mereka belajar di timur dan sebaliknya masyarakat pendukung kebudayaan timur untuk memperoleh pengetahuan dan teknologi mutakhir mereka belajar di barat. Inilah satu gambaran yang nyata dari keunggulan kedua kebudayaan itu.

Pengambil alihan nilai-nilai kebudayaan oleh satu kebudayaan dari kebudayaan yang lain untuk memperkaya kebudayaan itu akan berjalan secara alamiah pada pertemuan antara dua kebudayaan berbeda. Tetapi kalau terjadi pemaksaan

pengambilan nilai oleh satu kebudayaan baik oleh tekanan maupun peraturan akan menyebabkan pendukungnya mengalami krisis kebudayaan.

## **Krisis Kebudayaan**

Kata krisis sangat berkaitan dengan pengertian yang negatif. Saat ini kita selalu mendengar kata krisis ekonomi, krisis politik, krisis pangan, krisis moral dan banyak lagi lainnya. Krisis selalu berkaitan dengan pengertian ketidak berdayaan, ketidak mampuan, kerusakan atau kebobrokan. Demikianpun dengan apa yang dimaksudkan dengan krisis kebudayaan yaitu suatu keadaan ketidak berdayaan kebudayaan sebagai kekuatan penggerak kemajuan dari pendukungnya. Dalam arti kebudayaan tersebut tidak mampu membawa pendukungnya menguasai lingkungannya untuk memperoleh kehidupan sosial maupun ekonomi dengan lebih baik. Atau dengan kata lain krisis kebudayaan berakibat pada hilangnya jati diri baik individu maupun kelompok pendukung kebudayaan itu.

Krisis kebudayaan tidak sama dengan perubahan kebudayaan (culture changes). Perubahan kebudayaan tidak menyebabkan masyarakat pendukungnya kehilangan jati diri mereka. Perubahan kebudayaan pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai dasar dari satu kebudayaan dan walaupun hilang akan memakan waktu yang sangat lama dan panjang akibat penyesuaian secara perlahan serta tidak membawa pendukungnya pada krisis kebudayaan.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa krisis kebudayaan berakibat negative terhadap pendukungnya sedangkan perubahan sosial tidak selalu akan berakibat negative. Krisis kebudayaan dapat terjadi sebagai akibat dipaksanya masyarakat tertentu untuk mengikuti budaya lain. Paksaan ini dapat menimbulkan konflik sosial ataupun timbulnya sikap membangkang tetapi juga dapat timbul sikap menerima dengan terpaksa. Bagi mereka yang

menerima dengan paksa dapat muncul sikap membangkang atau oposisi kalau kekuatan pemaksa itu menjadi lemah.

Timbul pertanyaan sekarang. Apakah betul ada terjadi krisis kebudayaan di Maluku ? Kalau jawabannya tidak maka pertanyaan berikut akan muncul yaitu : Kenapa timbul konflik dan kekerasan dalam masyarakat ini ? Konflik dan kekerasan timbul tentu ada ketidak seimbangan dalam masyarakat, bisa itu ketidak seimbangan ekonomi, sosial, budaya, politik atau lainnya yang menyebabkan ketidak serasian dalam masyarakat. Kalau jawabannya ya krisis kebudayaan yang bagaimana ?

Sesuai dengan judul makalah maka saya akan coba melihat dan memahaminya melalui jawaban kedua yaitu adanya krisis kebudayaan di Maluku. Kita sadar sungguh bahwa Pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan sentralistik sangat banyak mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan – kebudayaan local (daerah). Pemerintahan Orde Baru berusaha menyeragamkan berbagai kultur dengan membuat perubahan-perubahan melalui peraturan-peraturan dan tidak dihargainya kebudayaan local yang memiliki nilai kearifan dan moral yang tinggi. Sebagai contoh: Penerapan berbagai peraturan dan undang-undang demi penyeragaman ternyata telah menghancurkan sistim pemerintahan adat beserta perangkatnya. Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan desa adalah salah satu contohnya. Negeri diganti dengan Desa atau Kelurahan, istilah untuk pemimpin sebuah Negeri yaitu Raja diganti dengan KADES atau Lurah, Saniri di ganti dengan LKMD, Kepala Soa diganti dengan Kepala Rukun Wilayah dan Rukun Kampung, Lembaga Sasi dan Kewang serta Pela-Gandong hilang peranannya.

Rupanya penyeragaman berbagai lembaga adat Negeri dengan sistim Desa telah membawa satu dampak serius dalam kebudayaan orang Maluku. Dampak serius ini dapat dikategorikan sebagai krisis kebudayaan dalam pengertian seperti diatas. Betapa tidak, konsep negeri adat bagi orang Maluku mempunyai

arti sakral sama dengan nilai adat bagi Raja sebagai pemimpin negeri. Masyarakat negeri dinamakan anak negeri bukan penduduk negeri atau rakyat negeri. Dengan demikian keterikatan antara negeri dan penduduknya adalah hubungan antara orang tua dan anak atau adanya hubungan genealogis. Begitu juga dengan Raja disebut upu (tuhan) dengan demikian ketaatan pada Raja menjadi mutlak. Desa dan Kades atau Lurah tidak memiliki nilai sakral. Sehingga pergantian telah membuat hilangnya pengaruh desa dan kades atau lurah pada rakyatnya. Keseimbangan dan keteraturan yang mengatur sebuah Negeri yang dipimpin oleh Raja dan dituntun oleh adat yang ketat hilang. Masyarakat desa hilang kendali adat sebab rupanya kendali dalam konsep desa dan kades tidak dapat diterima dengan baik sebab mereka tidak memahaminya dan memang bukan miliknya. Oleh karena itu konflik-konflik antar masyarakat desa atau antar desa sulit diselesaikan melalui saluran adat sebab perangkat pendukung adat tidak ada lagi yaitu Kewang, Kepala Soa dan lainnya.

Ternyata Kades tidak dapat diterima oleh anak negeri sebagai seorang yang memiliki nilai yang sama dengan Raja. Kades adalah sesuatu yang asing yang tidak dipahami. Begitu juga LKMD tidak dipahami apa itu. Rupanya masyarakat adat telah menerima nilai baru ini karena paksaan dan dipaksakan oleh Undang-undang untuk ditaati dan dilaksanakan. Oleh sebab itulah kita dapat memahami kenapa saat ini KADES tidak lagi memiliki pengaruh kebawah bagi rakyatnya. Perangkat adat Negeri yang hilang maknanya itu ternyata berpengaruh juga pada melemahnya hubungan Pela dan Gandong. Pela dan Gandong yaitu ikatan persaudaraan antar dua negeri atau lebih yang selalu terlibat dalam tolong menolong antar sesama. Ikatan ini terdesak akibat hilangnya perangkat adat pendukungnya yaitu Negeri dan lembaga adatnya. Renggangnya hubungan ini membawa dampak luas pada hubungan sosial antar negeri. Dan sayangnya lagi bahwa ikatan pela-gandong yang sebagian besar dibuat oleh para

leluhur untuk menjaga hubungan antara masyarakat yang berbeda agama dan adat harus turut juga punah dilanda tekanan budaya baru.

Bukan itu saja tapi juga sasi yang dulu didirikan melalui lembaga adat yang kuat dan ditaati ternyata harus turut juga menjadi korban dari konsep Desa. Sasi adalah satu sistim perlindungan terhadap tanaman, binatang atau ikan pada masa tertentu dimana dibuat larangan untuk mengambil hasilnya, membunuhnya, atau menangkapnya. Inilah kearifan yang menjadi korban penyeragaman Orde Baru.

Nilai-nilai baru yang dipaksakan adalah nilai-nilai asing yang sama sekali tidak dipahami dan dihayati. Tetapi nilai ini telah mendesak nilai asli (adat) sehingga tidak digunakan lagi. Hal ini telah menyebabkan masyarakat kehilangan pegangannya. Mau memegang nilai adat tidak bisa lagi karena sudah tidak dipakai dan mau memegang nilai baru tetapi tidak dapat dihayati. Mereka berada dalam satu krisis budaya. Masyarakat kehilangan jati dirinya sebagai satu masyarakat adat yang utuh. Mereka menjadi rendah diri atau tidak mempercayai dirinya sendiri sebagai masyarakat yang memiliki kekuatan adat dengan identitas sendiri, karena nilai budaya yang dimilikinya sebagai warisan leluhur ternyata tidak bermanfaat dan dihargai. Mereka kehilangan kepercayaan kepada dirinya sendiri. Ini memperlemah semua ikatan-ikatan sosial yang telah dibangun dalam adat. Keadaan ini membuat orang mencari identitas baru dan membangun ikatan-ikatan baru. Di berbagai Pedesaan ikatan-ikatan baru ini muncul ada yang bersifat lokal pedesaan seperti: Koperasi Desa, Ikatan Tani/Nelayan Desa dan ada yang lebih luas seperti ikatan-ikatan berdasarkan organisasi politik. Ikatan-ikatan baru yang bersifat lintas agama seperti pengganti Pela Gandong tidak muncul bahkan lebih mengental organisasi-organisasi keagamaan. Terjadi perubahan orientasi dari ikatan Adat ke ikatan Keagamaan atau Politik.

Kekuatan kebudayaan Maluku yang memberi identitas nyata bagi pendukungnya dan memberi kekuatan, ternyata sangat rapuh diterpa tekanan nilai baru. Ini menyebabkan krisis kebudayaan sehingga identitas adat yang telah dibangun sejak leluhur demi menjaga berbagai keseimbangan yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, tidak ada lagi nilai budaya yang dapat digunakan sebagai filter untuk menyaring nilai baru yang masuk. Olehnya dapat dipahami dalam krisis budaya yang demikian, nilai-nilai budaya baru yang tidak dipahami dan tidak sesuai dengan lingkungan sosial justru dapat memecah-belah masyarakat sehingga konflik antar etnik atau agama mudah timbul karena adat sebagai perekat telah hilang atau dilupakan.

### **Konflik dan Kekerasan**

Keterkatian dan keterhubungan antara krisis kebudayaan dengan konflik dan kekerasan adalah sangat erat. Sebab krisis kebudayaan akan membuat pendukung kebudayaan ini kehilangan kompas atau pedoman dalam menentukan mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan, mana yang baik dan mana yang buruk. Krisis kebudayaan juga membuat pendukungnya tidak memiliki pegangan sebagai panutan kebenaran sikap dan tingkah laku (mentalitas). Oleh sebab itu bagi kelompok yang mengalami krisis kebudayaan akan mudah muncul konflik dan konflik bisa berkembang menjadi kekerasan.

Konflik tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan peradaban manusia, dan jika belajar dari sejarah perkembangan peradaban manusia tersebut terlihat bahwa konflik pada tataran tertentu hanya bisa dieliminir namun tidak bisa dihindari. Kalaupun bisa dihindari itu tidak berarti bahwa konflik telah berakhir. Secara alamiah konflik itu tetap eksis selama masih ada peradaban manusia.

Konflik bisa membawa pada suatu suasana yang paling primitif di mana di dalamnya orang saling memangsa dan mematikan.

Namun dipihak lain konflik membuat orang menanjak dan melangkah lebih maju dalam taraf perkembangan peradaban manusia. Konflik dapat menjadikan manusia berfikir dan bertindak secara praktis tapi konflik juga bisa menjadikan manusia memikirkan kembali secara filosofis apa makna kehidupan bersama sebagai komunitas masyarakat manusia yang beradab.

Kala ini telah terbukti paling tidak kalau dilihat dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, setelah berbagai konflik sosial dan perang yang berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di dalamnya perang yang membawa kemusnahan paling hebat bagi umat manusia yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Bangsa-bangsa yang bergabung dalam PBB kemudian berfikir secara serius perlindungan terhadap HAM, yang akhirnya melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1945 yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi setiap manusia baik itu hak ekonomi, politik, sosial, hukum dan sebagainya.

Dalam sejarah perkembangan peradaban di Maluku, konflik antar negeri yang berbeda adat (Uli atau Pata) telah terjadi jauh sebelum bangsa Eropah datang ke Maluku dan bahkan konflik antar agama pernah terjadi sebelum terbentuknya VOC. Pela dan Gandong menurut saya terbentuk karena alasan menghindari perang antar dua negeri dan atau antar dua negeri yang berbeda agamanya. Dari konflik yang terwujud dalam peperangan lahirlah upaya perlindungan manusia dari pemusnahan melalui ikatan perjanjian yang kita kenal di Maluku sebagai Pela-Gandong itu.

Jadi dapat dikatakan bahwa konflik merupakan representasi dari bertemunya nilai-nilai yang berseberangan. Hasil titik temu muncul dalam praktik kekerasan. Konflik bersumber dari kontradiksi, antagonisme dan segala bentuk pertentangan. Jika konflik tidak menemukan jalan keluarnya maka yang terjadi adalah akumulasi perseteruan yang akhirnya dapat meledak dalam realitas kekerasan. Kekerasan adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh konflik.

Di Maluku konflik yang timbul adalah konflik horizontal yaitu antar masyarakat yang mengalami krisis kebudayaan. Masyarakat kehilangan kendali karena pemimpin adat mereka hilang maknanya. Kehilangan kepemimpinan ini ternyata sangat berpengaruh pada perubahan sikap dan tingkah laku Masyarakat. Karena kehilangan kendali mereka jadi bebas dalam bertindak. Dan tindakan mereka bisa melanggar hukum karena telah pudarnya alat pengendali yaitu adat.

Kelompok masyarakat menganggap diri mereka satu berbeda dari yang lain dan satu tidak sama dengan yang lain. Perasaan berbeda inilah yang telah menjadi dasar penggerak konflik dan diikuti oleh kekerasan. Kenapa mereka merasa berbeda ? Karena mereka tidak diikat lagi oleh nilai budaya yang sama yang mereka junjung bersama. Mereka melihat satu sebagai lawan dan musuh yang mengganggu untuk itu perlu disingkirkan. Disingkirkan ini dapat berupa pengusiran atau kekerasan pemusnahan. Sifat keprimitifan ini muncul seiring dengan hilangnya kendali Orde Baru dan munculnya reformasi. Hilangnya kendali Orde Baru membuat orang atau masyarakat adat yang tadinya dengan terpaksa menerima nilai-nilai baru beroposisi dan membangkang. Tapi sayangnya oposisi dan pembangkangan ini muncul melalui konflik dan kekerasan.

Nilai-nilai budaya yang mengatur perasaan, tingkah laku, dan norma-norma persaudaraan, persamaan saling menghormati dan mengasihi telah hilang diganti angkara murka yang barbarian sifatnya. Dan ini ternyata dilampiasikan dalam konflik antar sesama pendukung kebudayaan Maluku yang telah kehilangan jati dirinya.

Inilah mungkin salah satu contoh buah dari krisis kebudayaan yang dialami oleh pendukung satu kebudayaan yang rapuh yang berdiam di Maluku. Diperlukan tangan-tangan trampil dan halus untuk merajut lagi rajutan baru yang utuh dari penggalan-penggalan budaya yang tersisa dan berserakan itu.

## **Kesimpulan**

Krisis kebudayaan yang dialami saat ini oleh masyarakat Maluku dapat dihilangkan dengan jalan memberdayakan kembali kebudayaan lokal. Kembalikan Negeri, Raja, Kepala Soa, Kewang, Sasi, Pela-Gandong, kepada Anak Negerinya. Dengan demikian akan menumbuhkan dan menguatkan kembali dinamika masyarakat untuk berkarya sebab dengan budaya lokal mereka akan menemukan jati dirinya.

Konflik sulit dihilangkan sebab ini merupakan bagian dari kehidupan manusia dan sama tuanya dengan usia manusia. Konflik dapat dikelola menjadi kekuatan pendorong kemajuan satu kebudayaan dan masyarakatnya. Dengan pengelolaan konflik secara fungsional maka kekerasan dapat dihindari.

# KULTUR, DISINTEGRASI DAN INTEGRASI SOSIAL

Oleh : Adi Suryadi Sofian <sup>1</sup>

## Pengantar

Disintegrasi sosial telah menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat Indonesia kini, yang akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk adanya integrasi. Fenomena disintegrasi sosial, yang nampak dari adanya konflik dan penggunaan kekerasan dalam masyarakat bukan saja menjadi masalah kita sendiri di Indonesia, namun telah menjadi salah satu masalah utama disamping masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup dalam dasawarsa 1980 hingga 1990-an (Korten, 1993)

Ada banyak faktor yang dituding bertanggungjawab terhadap munculnya fenomena disintegrasi. Dari banyak faktor tersebut, kultur atau budaya selain struktur masyarakat dan faktor lainnya menjadi penyebab disintegrasi dan sulitnya mencapai integrasi bila faktor budaya tidak dieliminir. Di sini, para pendukung pendekatan kultur melihat ada hubungan (secara timbal balik) antara kultur dan disintegrasi sosial serta integrasi, artinya kultur mempengaruhi disintegrasi dan integrasi atau sebaliknya disintegrasi dan integrasi yang tercapai akan membentuk kultur yang baru.

Pandangan yang demikian perlu dianalisis lebih jauh melalui studi yang mendalam, namun dalam kesempatan ini hanya ingin dibahas (sebagai pembanding dari makalah Prof. Tangdililing) apa dan bagaimana kultur masyarakat itu berproses sehingga menimbulkan adanya disintegrasi dan integrasi sosial. Dalam

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Lulusan program S2 ilmu-ilmu sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 1997. Aktivitas lainnya penulis aktif dalam berbagai kegiatan LSM sebagai Ketua Yayasan Bina Konsumen Indonesia (YBKI), dan Koordinator Konsorsium LSM untuk Pemberdayaan Rakyat Kalimantan Barat.

konteks ini, pembahasan bisa berangkat dari perspektif mikro sosiologis (kasus Kalimantan Barat) tetapi pemakalah lebih berminat untuk melihat fenomena kultur dan disintegrasi serta integrasi ini dalam perspekti makro sosiologis dengan asumsi bahwa fenomena disintegrasi yang berlangsung dalam masyarakat Kalbar merupakan bias ataupun akibat dari proses yang berlangsung di tingkat nasional.

## **Kerangka Konsep**

Ada tiga konsep yang dibahas di sini, yaitu Kultur, Disintegrasi dan Integrasi. Bicara kultur atau budaya menunjuk pada tiga aspek meliputi aspek sistem nilai, pola perilaku dan materi (teknologi). Yang termasuk dalam sistem nilai berupa nilai itu sendiri, norma, aturan, hukum, ideologi, pandangan (wawasan). Pola perilaku menyangkut tindakan ataupun pola aktivitas masyarakat dan materi adalah hasil dari karya. Ketiga Aspek tersebut dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri (otonom). Misalnya : cara pandang (wawasan) masyarakat terhadap sesuatu tercermin dari pola perilaku atau tindakan yang ia lakukan yang pada gilirannya menerbitkan hasil (karya) tertentu. Dalam konteks makalah ini hanya aspek pertama dan kedua yang digunakan sebagai model analisis.

Disintegrasi berarti tidak bersatunya (independensi) berbagai komponen atau struktur dalam suatu sistem sosial atau masyarakat. Sementara integrasi menunjuk pada pola keterkaitan (interdependensi) antara berbagai unsur atau struktur sosial dalam masyarakat atau sistem sosial. Konsep ini pada dasarnya berangkat dari asumsi fungsional bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri unsur, komponen, struktur, dimana masing-masing struktur berkaitan satu sama dalam satu kesatuan untuk suatu tujuan tertentu. Dengan demikian bila ada keterkaitan antar unsur tersebut maka terjadi integrasi sistem, sebaliknya jika

unsur mengalami keterpisahan yang terjadi adalah disintegrasi sistem.

## **Kultur dan Disintegrasi**

Pandangan yang menyatakan ada hubungan kultur dan disintegrasi (dengan demikian dengan integrasi) melihat kultur sebagai faktor penyebab yang dominan dan terjadinya disintegrasi sosial maupun integrasi sosial. Pendekatan kultur semacam ini seringkali mengabaikan struktur sosial sebagai penyebab disintegrasi maupun integrasi. Bertitik tolak dari konsep kultur di atas, disintegrasi dan integrasi sosial muncul disebabkan cara berpikir dan cara pandang masyarakat yang terakomodir di dalam nilai, norma, pengetahuan maupun ideologi masyarakat tertentu. Masyarakat berpikir dan berpandangan mengenai hukum, ekonomi, politik terwujudkan di dalam tindakan-tindakan hukum, ekonomi dan politik tertentu pula.

Identifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi (dan integrasi) seperti etnosentrisme, kontak budaya yang lemah, primordialisme, sosialisasi nilai budaya dan sebagainya sebagaimana diungkapkan dalam sesi ini pada dasarnya dapat dilihat dari perspektif mikro. Fenomena demikian bisa terlihat di dalam kancah budaya tiap masyarakat atau komunitas yang mendiami suatu daerah tertentu di Indonesia ini. Namun yang juga harus menjadi persoalan adalah apakah yang menjadi penyebab munculnya praktek budaya semacam itu. Barangkali perspektif makro dalam mengidentifikasi faktor penyebab itu ataupun mencari akar persoalan diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena disintegrasi dan integrasi sosial dalam konteks budaya.

Berangkat dari perspektif yang demikian, faktor-faktor yang tercakup dalam unsur budaya masyarakat pada hakekatnya dapat dipandang sebagai akibat dari pola perilaku atau tindakan tertentu (hukum, ekonomi dan politik) dari masyarakat. Seperti telah

dikemukakan, pola tindakan itu merupakan pengejawantahan dari suatu sistem nilai tertentu sebagai salah satu unsur budaya masyarakat. Dengan kata lain disintegrasi yang terjadi dalam masyarakat hanya merupakan fenomena yang hanya tampak di permukaan misalnya dalam bentuk pertikaian-pertikaian sosial, penggunaan kekerasan, disorientasi sosial dan sebagainya.

Dalam perspektif makro fenomena disintegrasi dari segi budaya kiranya dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yang dibagi ke dalam faktor historis (masa lalu) dan kontemporer (kekinian)

Pertama, faktor historis berasal terutama dari tindakan pengambil kebijakan orde lalu di tingkat nasional mengenai berbagai masalah ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya yang berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 32 tahun (1966-1998). Dalam kurun waktu tersebut sistem politik dan pemerintahan relatif bersifat otoriter dan sentralistik. Dengan sistem yang demikian otonomi dan keberdayaan masyarakat tak berkembang, pemberontakan muncul secara terselubung dan penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan yang lebih represif. Sistem semacam ini oleh para sejarawan bahkan ditengarai telah dimulai sejak 1959 (Dekrit Presiden Juli 1959). Akibatnya muncul ketidakpatuhan, pembangkangan terbuka, demonstrasi, kekerasan dan indikasi negatif lainnya yang berakumulasi secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 ketika rezim Soeharto jatuh.

Kedua, dari faktor kontemporer berkaitan dengan faktor kesejarahan tersebut. Sistem otoriter dan sentralistik yang diterapkan dalam segala bidang kehidupan ekonomi, politik, hukum hingga pada praktek indoktrinasi pikiran masyarakat berakibat pada kondisi masyarakat yang sangat rawan saat ini untuk membangun integrasi masyarakat.

Di bidang Ekonomi misalnya menyangkut sistem ekonomi yang diterapkan secara kapitalistik (kapitalistik malu-malu), yang mengedepankan modal dan uang ketimbang harkat kemanusiaan melahirkan manusia Indonesia yang materialistik, individualistik

dan konsumtif. Di masyarakat terjadi ketimpangan dan kecemburuan ekonomi yang sangat mencolok sehingga tak kondusif bagi berkembangnya integrasi.

Di bidang politik dan pembangunan, sejak dua dasa warsa perjalanan pembangunan di Indonesia tampak peran pemerintah yang sangat dominan. Masyarakat hanya menjadi obyek ketimbang subyek dari proses politik dan pembangunan itu sendiri. Kondisi ini ternyata sangat menyulitkan membangun keberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan birokrasi politik yang efektif. Akibat dari tekanan politik yang berlebihan dari orde lalu yang terjadi sekarang masyarakat ingin diakui eksistensi sehingga terjadinya “supremasi masyarakat” dan mencoba menggusur “supremasi pemerintah” sebagai mekanisme pertahanan diri atau kalau tak dapat disebut sebagai pemberontakan dan “balas dendam” masyarakat terhadap situasi ketertekanan yang dialami pada masa lalu. Dengan demikian integrasi dalam konteks hubungan masyarakat dan pemerintah menjadi tidak harmonis. Hal ini tentu saja menyulitkan proses integrasi atau justru menjadi salah satu substansi yang memunculkan disintegrasi di dalam masyarakat akhir-akhir ini.

Terakhir, dibidang hukum jelas berhubungan dengan proses penegakan hukum. Penegakan hukum sejauh ini menjadi fokus pendekatan-pendekatan struktural, termasuk dalam melihat penyimpangan ataupun ketidakadilan ekonomi di masyarakat. Namun penegakan hukum disini lebih dilihat sebagai perilaku atau tindakan dari sementara penegak hukum yang kurang memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Dalam praktek penegakan hukum acapkali vonis hukum menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat yang berindikasi mengabaikan unsur keadilan yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum sehingga muncul masyarakat main hakim sendiri sebagai konsekuensi logis dari ketidakberdayaan hukum itu sendiri. Dalam penanganan kasus-kasus kerusuhan yang terjadi akhir-akhir di

Kalimantan Barat sedikit memberikan informasi mengenai penegakan hukum yang lemah dan pada akhirnya berkorelasi pada munculnya disintegrasi di masyarakat.

## **Upaya Integrasi Sosial**

Upaya integrasi sosial dapat dilakukan dengan sebagian menghilangkan berbagai faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi. Namun dalam perspektif makro upaya integrasi perlu dilakukan dengan mengidentifikasi serta merubah berbagai faktor budaya yang ditengarai menjadi akar masalah dari terjadinya disintegrasi. Langkah awal bisa dibangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Komitmen semacam ini harus paralel dengan praktek penyelenggaraan praktek bermasyarakat dan bernegara baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Artinya ada konsistensi antara kata, ucapan dan tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Selanjutnya bila komitmen sudah terbangun segera dilakukan penataan sistem dan struktur (sebagai landasan dari tindakan politik, hukum, ekonomi dan sebagainya) yang kondusif terhadap terbangunnya integrasi dan sebagai koreksi terhadap sistem dan struktur yang selama ini ditengarai bertanggungjawab terhadap terjadinya disintegrasi. Sistem dan struktur bermasyarakat dan bernegara (sebagai landasan) tentunya harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab sehingga tidak menimbulkan disharmoni dan disorientasi dalam kehidupan masyarakat dan negara.

## KONFLIK DAN KEKERASAN: AKAR-AKAR KOLONIAL DAN POST-KOLONIAL

Oleh: John Bamba

Setiap budaya bertumbuhkembang dengan budaya-budaya lain dan ditumbuhkembangkan oleh budaya-budaya lain.....

Artinya: tidak ada yang namanya satu budaya. Budaya adalah *plurale tantum*, ia hanya ada secara jamak, dan ia ada seperti apa adanya juga karena budaya-budaya lain--sehingga ia pun dibatasi, dihalangi, dirusak atau diancam oleh budaya-budaya lain. Budaya telah berarti multibudaya, dan ia berarti budaya dari beranekaragam budaya <sup>1</sup>

### BUDAYA KEKERASAN

Kemajemukan adalah keniscayaan dan keanekaragaman adalah hakekat. Penderitaan yang dialami oleh umat manusia bersumber dari penolakan dan pengingkaran akan realitas ini. Konflik kekerasan, pertikaian dan perang yang terus menerus berlangsung dalam sejarah umat manusia justru seringkali ditimbulkan oleh akar persoalan yang sama yakni keinginan untuk mengingkari realitas kemajemukan dan menciptakan keseragaman. Perbedaan, termasuk perbedaan etnis

---

<sup>1</sup> "Every culture cultivates itself with regard to other cultures and is cultivated by other cultures... This means: there is no one culture. Culture is *plurale tantum*: it exist only in the plural, and its exist only as given also by other cultures---and thus as withheld, impaired, diminished, or threatened by other cultures. Culture already means multicultural, and it means the culture of the multiplicity of culture." Werner Hamacher. "One 2 Many Multiculturalism" dalam Hent de Vries & Samuel Weber (Ed.), *Violence, Identity, and Self-Determination*, Stanford-California: Stanford University Press, 1997, hal. 295-296

sesungguhnya bukan penyebab konflik<sup>2</sup>. Konflik sesungguhnya berawal dari pikiran. "*Wars begin in the minds of men*" demikian kalimat pertama yang dipakai UNESCO dalam Mukadimahnya. Karena itu, memahami pikiran manusia merupakan salah satu prasyarat penting dalam resolusi konflik. Sebab persepsi seseorang atau suatu komunitas tentang diri dan dunia di sekelilingnya akan menentukan cara mereka berpikir dan bertindak. Pikiran dan tindakan tersebut beserta seluruh konsekwensinya lama kelamaan mewujudkan diri dalam bentuk budaya. Demikianlah, budaya kekerasan muncul dan menjadi bentuk penyelesaian masalah yang paling awal yang dikenal dalam peradaban umat manusia. Sayangnya budaya tersebut masih tetap menjadi pilihan yang paling populer hingga saat sekarang sehingga melahirkan berbagai perseteruan dan pertikaian dan menciptakan ketidakadilan dan penderitaan yang tak kunjung usai di berbagai belahan dunia.

Kekerasan memang dapat menjadi suatu budaya, bahkan kekerasan bisa diturunkan secara genetik! Penelitian membuktikan bahwa seorang anak yang orangtuanya memiliki perilaku kekerasan secara dominan, dapat mewarisi perilaku tersebut<sup>3</sup>. Jadi kekerasan bukan hanya sekedar hasil dari sebuah proses sosial melainkan dapat menurun secara genetik. Karena itu, menghentikan tindakan kekerasan membutuhkan suatu perubahan budaya: perubahan cara berfikir dan bertindak.

Secara sederhana, ada dua jenis kekerasan yang umumnya dikenal yakni: Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung. Kekerasan Struktural lebih sulit untuk diatasi sebab ia dikendalikan oleh sistem sosial dan politik yang sedang berlaku yang terkait dengan kekuasaan. Lebih parah lagi, Kekerasan

---

<sup>2</sup> Cf. Michael Banton, "Ethnic and Racial Consciousness." 2<sup>nd</sup> Edition, London & New York: Longman, 1997:1

<sup>3</sup> Michel Montaigne dalam Michael E. Salla. "Conflict Resolution, Genetics and Alchemy – The Evolution of Conflict Transmutation." <http://trininstitute.org/ojper/3salla.htm> 8/20/2001 6:25:09. PM

Struktural biasanya mampu mengendalikan dan memandulkan kapasitas institusi yang seharusnya berfungsi sebagai promotor dan aktor perdamaian. Baik Kekerasan Langsung maupun Kekerasan Struktural bersumber dan disebabkan oleh Budaya Kekerasan. Karena itulah, menghindari atau menghentikan kekerasan merupakan suatu usaha untuk melakukan perubahan budaya yakni dari Budaya Kekerasan menjadi Budaya Damai<sup>4</sup>.

Figure 1

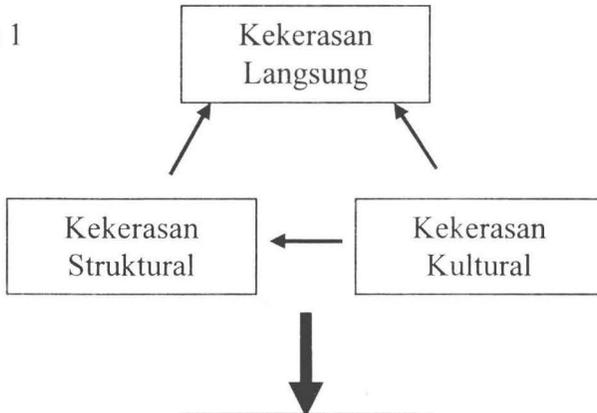
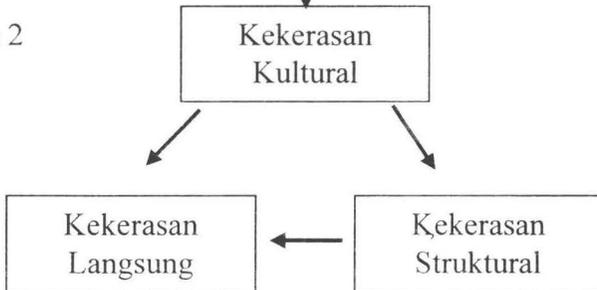


Figure 2



## PERSEPSI TENTANG KONFLIK DAN KEKERASAN

<sup>4</sup> Lih. Johan Galtung dalam Chaiwat Satha-Anand. "Towards a Peace Culture in Asia," dalam *UNESCO Studies on Peace and Conflict: Peace and Conflict Issues after the Cold War*, Paris: UNESCO, 1992. Diskusi yang lebih komprehensif tentang fenomenologi kekerasan ini juga dapat ditemukan dalam Bamba: 2001

Konflik seumur dengan manusia. Ketika keanekaragaman menjadi realitas semesta dunia, konflik adalah konsekuensi yang mengikutinya. Konflik timbul karena adanya perbedaan keinginan dan keyakinan. Oleh sebab itu, secara sederhana, konflik adalah, “suatu perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu” yang berlainan. Dan ketika tujuan tersebut sulit didapat, lama-kelamaan konflik dapat berlanjut dengan tujuan “untuk menetralkan, menyakiti dan menghabisi lawan-lawannya.”<sup>5</sup> “Pada tingkat inilah, perilaku kekerasan menjadi unsur yang dominan dalam sebuah konflik. Karena itu, konflik tidak identik dengan kekerasan dan munculnya konflik tidak selalu bersamaan dengan kekerasan. Oleh sebab itu, konflik dapat berdampak positif dan konstruktif<sup>6</sup> selain negatif dan destruktif.

Perbedaan antara konflik dan persaingan memang agak tipis. Namun para ahli sependapat untuk membedakan persaingan sebagai adanya “kepentingan yang sama” dibandingkan dengan “kepentingan yang berbeda” pada konflik. Menurut Mark dan Snyder<sup>7</sup>, kompetisi menyangkut perjuangan untuk mendapatkan objek-objek yang terbatas persediaannya...sasaran utama kompetisi adalah untuk mendapatkan obyek yang terbatas, bukan untuk merugikan atau menghancurkan orang yang menjadi lawan berkompetisi itu per se.” Dengan demikian persaingan lebih

---

<sup>5</sup> Definisi konflik ini berdasarkan Lewis Coser dan paling sering dikutip. Menurut Coser, “*Conflict is a struggle in which the aim is to gain objectives and simultaneously to neutralize, injure or eliminate rivals.*” Lihat Donald I. Horowitz, “Ethnic Groups in Conflict,” Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 2000: 95

<sup>6</sup> Beberapa dampak positif dari konflik misalnya: 1. membuat orang menyadari adanya banyak masalah; 2. mendorong ke arah perubahan yang diperlukan; 3. memperbaiki solusi; 4. menumbuhkan semangat; 5. mempercepat perkembangan pribadi; 6. menambah kepedulian diri; 7. mendorong kedewasaan psikologis; 8. menimbulkan kesenangan. Lihat: Simon Fisher et al. “Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak.” Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta The British Council, 2001 hal. 4

<sup>7</sup> Dalam Ralf Dahrendorf, “Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis.” Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1986, hal. 259

kurang potensial dalam memicu kekerasan dibandingkan konflik, meskipun persaingan bisa sejak awal mewarnai sebuah konflik. Sama seperti kekerasan, persaingan pun merupakan salah satu unsur konflik.

Memahami konflik melalui sebagai perilaku kekerasan akan melestarikan “Budaya Kekerasan”.

Di bawah ini disajikan beberapa persepsi yang keliru tentang konflik<sup>8</sup>.

### 1. Konflik adalah negatif dan destruktif.

Karena negatif dan destruktif, maka konflik tidak boleh terjadi. Ia harus ditekan (*suppressed*) dan dihindari. Jika pandangan ini dimiliki oleh mereka yang memiliki kekuasaan, maka penindasan dan represi akan diadopsi sebagai kebijakan utama. Akibatnya, aspirasi dan perbedaan pandangan yang menjadi hakekat manusia akan disumbat penyalurannya dan lama kelamaan menumpuk seperti lahar kawah candradimuka. Rejim Orde Baru merupakan contoh yang paling jelas dari fenomena ini.

### 2. Konflik adalah perilaku kekerasan.

Jika belum terjadi tindak kekerasan, konflik dianggap belum ada dan karenanya diabaikan. Ungkapan kekecewaan, ketidakpuasan dan ketidaksetujuan, jika belum diwujudkan dalam bentuk tindakan pengrusakan, penghancuran, dan pembunuhan dianggap sepele. Akibatnya tindak kekerasan dipersepsikan sebagai cara untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah yang paling efektif. Hal ini menyebabkan timbulnya budaya kekerasan seperti yang telah disinggung diatas.

### 2. Konflik adalah agresi

---

<sup>8</sup> Disarikan dari Samsu Rizal Panggabean, “Negara dan Kekerasan Subnasional” disampaikan dalam Seminar “Peran Negara dan Resolusi Konflik. Transformasi Konflik Menuju Indonesia Baru.” Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM dan The British Council, Kamis 18 November 1999.

Tuntutan aspirasi dalam bentuk demonstrasi, protes damai, pawai, atau mogok kerja dianggap “merongrong kewibawaan yang sah”, “menggangu keaman dan ketertiban”, “mengancam persatuan dan kesatuan” sehingga dianggap sebagai agresi. Akibatnya, demonstrasi buruh atau mahasiswa, atas penolakan rakyat terhadap beroperasinya suatu perusahaan di wilayah adat mereka ditanggapi dengan mengirim tentara dan Brimob. Rakyat yang protes dan menyampaikan aspirasinya dianggap kriminal.

### 3. Perspektif Hidrolik

Menurut perspektif ini, “masyarakat adalah semacam wadah tempat amukan kebringasan, dan frustrasi yang apabila dipanaskan akan menimbulkan dinamika yang pada gilirannya, meletup menjadi tindakan kekerasan<sup>9</sup>. “Karena itu, rakyat dianggap orang yang mudah dikipasi, dihasut dan diprovokasi sebab tidak memiliki nalar dan akal sehat. Bilama suatu kasus terjadi, yang diselesaikan bukan penyebab dan akar masalahnya melainkan diselesaikan dengan mencari para “provokator”, “dalam” atau “penghasut”.

Harus diakui, ke-4 persepsi tentang konflik seperti yang disebutkan di atas sangat dominan di Indonesia, terutama selama di bawah rejim Soeharto. Ada beberapa implikasi yang sangat jelas sebagai akibat dari penanganan konflik berdasarkan ke-4 persepsi tersebut. Pertama, rakyat miskin pengalaman dalam mengelola konflik. Kompetisi yang terjadi, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, kekuasaan maupun status sosial cenderung dilakukan dengan cara-cara yang tidak sportif sehingga melahirkan konsekwensi yang kedua yakni munculnya budaya kekerasan dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Budaya kekerasan ini semakin lestari manakala aspirasi dan tuntutan masyarakat yang disalurkan melalui saluran-saluran non-kekerasan berakhir ditempat “penampungan aspirasi” semata tanpa tindak lanjut yang konkret. Akibatnya, rakyat “dididik” untuk menggunakan kekerasan sebagai cara efektif

---

<sup>9</sup> Panggabean, 1999, *ibid.* hal. 5

untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.

## **BUDAYA KEKERASAN DI KALIMANTAN**

Akhir milenium ke-2 bagi bangsa Indonesia ternyata ditandai dengan serangkaian tragedi. Dimulai dengan krisis ekonomi yang tak terbayangkan sebelumnya, Indonesia berubah dari salah seekor macan yang merajai perekonomian di Asia menjadi seekor macan merana akibat “anak-anaknya” saling membunuh dan menghancurkan<sup>10</sup>. Kalimantan sendiri dikejutkan oleh 3 tragedi kemanusiaan berupa perang antar etnis Dayak dan Madura tahun 1997 (Peristiwa Sanggau Ledo), Melayu dan Madura tahun 2000 (Peristiwa Sambas) serta Dayak dan Madura tahun 2002 (Peristiwa Sampit). Ketiga tragedi ini masing-masing telah menelan ratusan korban jiwa serta ribuan pengungsi yang bahkan hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Berbagai tudingan tiba-tiba diarahkan ke orang Kalimantan mulai dari para kanibal, pembunuh barbar sampai para pengayau. Menyaksikan dan mengalami apa yang telah terjadi dalam

---

<sup>10</sup> Beberapa analis berpendapat, berbeda dengan fenomena kekerasan di negara-negara lain seperti di Bosnia, kekerasan yang terjadi di Indonesia, jika dikaji secara mendalam, memiliki satu fenomena khas yakni kebencian terhadap lawan yang justru sesungguhnya sama-bukan berbeda- seperti dirinya. Peristiwa pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI misalnya, dilakukan oleh kaum nasionalis terhadap mereka yang dianggap komunis yang sesungguhnya juga nasionalis. Demikian pula perang yang dikobarkan terhadap Fretilin di Timor-Timur, GAM di Atjeh atau OPM di Papua dilakukan terhadap orang-orang yang justru dipersepsikan dan dipercaya sebagai sesama bangsa Indonesia. Bahkkan jika ditengok lebih jauh ke belakang, perang melawan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang pun dilakukan tidak hanya melawan orang yang benar-benar Belanda dan Jepang, melainkan pula melawan orang-orang Indonesia yang dianggap antek-antek Belanda dan Jepang. Demikian pula halnya kebijakan Presiden Soekarno dalam Konfrontasi dengan Malaysia yang didasarkan pada persepsi bahwa Kalimantan Utara termasuk wilayah dan dengan demikian Bangsa Indonesia. Tentang hal ini, lihat James T. Siegel, “A New Criminal Type In Jakarta: Counter-Revolution Today” “Durham & London: Duke University Press : 1998

beberapa peperangan antar etnis tersebut, banyak kalangan menyimpulkan bahwasanya Budaya kekerasan memang bukan sekedar legenda melainkan masih dominan dipraktikkan oleh orang Kalimantan, khususnya orang Dayak dan Melayu. Benarkah demikian? Benarkah kekerasan berakar dalam budaya rakyat Kalimantan?

Tidak dapat disangkal bahwa Budaya Kekerasan selalu dikaitkan dengan Tradisi Mengayau pada masa lampau yang pernah dipraktikkan oleh beberapa subsuku Dayak. Dengan asumsi bahwa Mengayau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Dayak, sering dilaporkan bahwa Budaya Kekerasan pada orang Dayak didorong oleh kebiasaan dalam tradisi tersebut di masa lampau. Persepsi seperti ini selanjutnya disebarluaskan melalui berbagai media sehingga menjadi persepsi publik tentang Budaya kekerasan pada orang Dayak<sup>11</sup>.

Namun, menyimpulkan bahwa tradisi Mengayau sebagai pendorong utama perilaku kekerasan orang Dayak terhadap orang Madura adalah persepsi yang keliru. Karena yang terjadi dalam berbagai pertikaian tersebut bukanlah Mengayau melainkan Perang. Pemahaman tersebut semakin keliru manakala Tradisi Mengayau dipahami hanya semata-mata dari terjadinya kegiatan pemotongan kepala lawan yang dilakukan oleh orang Dayak. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, tindakan memotong kepala lawan merupakan kekejaman yang jamak dilakukan dalam

---

<sup>11</sup> Bdk. Pernyataan-pernyataan berikut: “Di Kalimantan Barat sekarang, orang Dayak sedang **menghidupkan kembali kebiasaan lama,**” (*In West Kalimantan these days, the Dayaks are resurrecting an old practice*) dalam Susan Berfield & Keith Loveard (2001); “Geng-geng Dayak mengusung kepala musuh-musuh mereka di atas tonggak, tombak dan di atas truk pikup, sambil **membangkitkan kembali tradisi lama Mengayau mereka**” (*Dayak gangs have paraded victims’ heads on poles, spears and the tops of pick-up trucks, reviving their ancient tradition of headhunting*) dalam Alex Spillius (1999), “Ada yang dipotong-potong-kepala mereka disimpan dan diusung di atas tongkat sebagi tropi-**sebagaimana layaknya kebiasaan orang Dayak**” *Some were decapitated-their heads kept and paraded on sticks of trophies-as is the custom of the Dayak people*) dalam Marianne Bray (2001), cetak tebal ditambahkan.

setiap kekerasan atau tindak kriminalitas dimanapun di dunia ini. Jika tidak, bagaimana kita memahami tindakan yang sama yang dilakukan oleh orang Melayu dalam Peristiwa Sambas<sup>12</sup> atau orang Jawa dalam peristiwa Dukun Santet di Banyuwangi<sup>13</sup>? Tradisi Mengayau sendiri, pada orang Dayak telah berakhir dengan dibuatnya kesepakatan oleh kepala-kepala adat Dayak dari berbagai subsuku di Tumbang Anoi pada tahun 1894<sup>14</sup>.

Oleh sebab itu, adanya Tradisi Mengayau pada beberapa subsuku Dayak di masa lampau tidak serta merta menjadi pemicu utama perang antar etnis di Kalimantan. Sebab jika Mengayau yang menjadi penyebab, maka dengan berakhirnya tradisi ini sejak lebih dari satu abad yang lalu seharusnya budaya kekerasan tidak ada lagi pada orang Dayak. Logika yang sama juga dapat kita terapkan untuk berbagai tindak kekerasan bernuansa SARA yang menjadi sangat jamak sekarang ini di berbagai tempat di Indonesia. Meskipun demikian, Budaya Kekerasan adalah sebuah realitas, termasuk di Kalimantan saat ini.

Tetapi sebaliknya, Tradisi Mengayau dengan berbagai *image* kekerasan yang melekat padanya dapat dieksploitasi dan diperalat untuk mencapai tujuan tertentu. Tampaknya, fenomena inilah yang justru sedang berlangsung di Kalimantan. Secara eksternal, Mengayau dan *image* kesadisan orang Dayak dijadikan alat untuk menciptakan histeria massa dan kekacauan sosial seperti yang terjadi dalam peristiwa Demonstrasi tahun 1968-1996 di Kalimantan Barat. Dampak yang sama terlihat dengan jelas dalam peristiwa Sanggau Ledo dan Sampit. Kekacauan sosial ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk

---

<sup>12</sup> Lihat: Edi Petebang & Eri Sutrisno, "Konflik Etnik di Sambas" Jakarta: ISAI, 2001

<sup>13</sup> Lihat: Abdul Manan, Imam Sumaatmadja & Asep SP. Wardhana, "Geger Santet Banyuwangi", Jakarta: ISAI, 2001

<sup>14</sup> Lihat: Prof. KMA. M. Usop, M.A., "Pakar Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak & Daerah Kalimantan Tengah." Palangkaraya: Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Batang Garing, 1994. Lihat juga Dr. J.J. Kusni, "Dayak Membangun" The Paragon's: 1994., hal. 30-38.

mencapai kepentingannya<sup>15</sup>. Secara internal, Mengayau beserta simbol keberanian, kekejaman dan kehebatannya dijadikan sarana untuk memperteguh identitas dan eksistensi orang Dayak yang selama ini mengalami proses penindasan, peminggiran dan pengabaian. Kekerasan yang dilakukan dengan memakai simbol-simbol dalam tradisi Mengayau seperti kekuatan supranatural, mangkok merah dan tarian yang bersimbiose dengan kepentingan pihak eksternal kemudian memang efektif sebagai sarana peneguhan identitas dan eksistensi<sup>16</sup>.

Kedua proses tersebut didukung dan diperkuat oleh laporan media massa lokal, nasional dan internasional yang secara dominan memberitakan aspek-aspek perilaku kekerasan dan kekejaman yang ditimbulkan dengan mengkaitkannya secara langsung dengan Tradisi Mengayau di masa lampau.<sup>17</sup>

## **AKAR-AKAR KOLONIAL YANG MEMPENGARUHI BUDAYA KEKERASAN**

Faktor yang agak jarang disinggung dalam berbagai diskusi dan perdebatan tentang konflik di Indonesia adalah sejauh mana konflik antar etnis dan Budaya Kekerasan berakar pada kebijakan pemerintah Kolonial di masa lampau. Sumbernya tidak lain yakni kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam menciptakan dualisme kekuasaan melalui sistem pemerintahan bayangan<sup>18</sup>. Di

---

<sup>15</sup> Bdk. Anna I. Tsing. "In the Realm of The Diamond Queen." Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1993

<sup>16</sup> Bdk. Nancy Lee Peluso Emily Harwell, "Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan, Indonesia," dalam Nancy Lee Peluso & Michael Watts (Eds.) *Violent Environment* Cornell University Press, 2001, hal. 83-115

<sup>17</sup> Lihat: John Bamba, "CNN Effects atau Haatzaat Artikelenn? Pemberitaan Media Massa Asing tentang Perang Antar Etnis di Kalimantan," disampaikan dalam Lokakarya "Covering Conflict for Kalimantan Journalist" ID, BC & BBC, Hotel Mahkota-Pontianak, 22 Oktober 2001

<sup>18</sup> Bdk. Gerry van Klinken, "Akar-akar Kolonial dari Konflik Etnis," makalah untuk International Conference: Indonesian Transition to Democracy: Issues and Actors in the

satu pihak pemerintah Kolonial menempatkan dirinya sebagai penguasa tertinggi untuk semua, namun di pihak lain penguasa-penguasa lokal dipelihara dan dipertahankan eksistensinya dalam rangka efektifitas dan efisiensi kolonialisme yang sedang berlangsung<sup>19</sup>. Dengan mempertahankan keberadaan dan memperlalat para penguasa lokal dengan seluruh infrastrukturnya, pemerintah kolonial mendapat keuntungan dan efisiensi dari segi sumber daya manusia maupun secara ekonomis. Namun implikasinya lebih luas dan berdampak panjang daripada sekedar keuntungan ekonomis yang dinikmati pemerintah kolonial. Praktik penindasan, ketidakadilan dan bahkan perbudakan tetap berlangsung meskipun pemerintah kolonial Belanda bertekad untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tuntutan komunitas internasional dan keadaan ekonomi dan politik dalam negeri Belanda pada akhir abad ke-19<sup>20</sup>. Sistem pemungutan pajak melalui upeti yang dilakukan melalui para penguasa lokal menimbulkan sentimen negatif dari golongan rakyat jelata terhadap penguasa lokal jauh melebihi sentimen yang dirasakan oleh para penguasa lokal terhadap pemerintah Kolonial. Ini merupakan salah satu perbedaan mencolok antara strategi kolonialisme yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Seperti yang dapat kita saksikan dengan jelas, politik *divide et imperum* yang sangat canggih ini memberikan

---

Local and International Perspective” diselenggarakan oleh ISAI & KONTRAS, Jakarta 17-19 January 2002

<sup>19</sup> Menurut Usep Ranawidjaja, sedikitnya ada 4 alasan mengapa pemerintah Hindia Belanda mempertahankan keberadaan Kerajaan-kerajaan tersebut yakni terbatasnya sumber daya yang dimiliki Hindia Belanda, tidak ada niat baik Belanda untuk memakmurkan daerah jajahannya, rakyat jajahan lebih mudah dikendalikan oleh raja-rajanya sendiri, serta untuk menghindari perlawanan dan kekecewaan rakyat jajahan. Lihat: Mr. Usep Ranawidjaja, “Swapradja: Sekarang dan Dihari Kemudian”, Penerbit Djambatan, Djakarta 1955, hal. 4-5

<sup>20</sup> Untuk diskusi lebih lanjut mengenai isu ini, periksa A.M. Djuliaty Suroyo, “Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1860, “Yogyakarta: yayasan untuk Indonesia, November 2000, hal. 272-280

keuntungan-keuntungan luarbiasa bagi pemerintah kolonial tidak hanya secara ekonomis melainkan pula secara sosial dan politis. Kebencian dan perlawanan terhadap Belanda misalnya, jauh lebih lunak dibandingkan terhadap Jepang. Dengan dibumbui oleh strategi lain yang disebut “Politik Balas Budi” seperti yang pernah dijalankan oleh Inggris, pemerintah kolonial semakin berhasil dalam melunakkan usaha-usaha perlawanan yang ekstrem dan radikal.

Namun strategi *divide et imperium* tentu saja tidak semata-mata dilakukan melalui ‘cara-cara yang lebih manusiawi’ seperti dijelaskan di atas. Sejarah juga mencatat bagaimana pemerintah kolonial Inggris memperlak orang Dayak Iban sebagai Pasukan Pengejut (*Shock Troops*) melawan orang Melayu dan Tionghua<sup>21</sup>, atau pemerintah kolonial Belanda yang merekrut para jagoan Madura ke dalam Pasukan Barisan yang bertugas melawan para pemberontak di Jawa (Perang Jawa 1825-1830), Sulawesi Selatan (1825), Bali (1846), Kalimantan Barat, Atjeh dan bahkan hingga tahun 1923 untuk menghentikan pemogokan buruh kereta api di Jawa<sup>22</sup>. Apalagi, seperti yang ditulis oleh Cleary & Eaton, kedua pemerintah kolonial ini memang bekerjasama dengan sangat baik dalam menjalankan kolonialismenya.

Kerjasama yang baik juga terjadi antara pemerintah kolonial Belanda dengan para penguasa dan elit lokal yang memperoleh keuntungan dari patronase yang dijalankan Belanda. Meskipun kondisinya tidak selalu sama antara daerah yang satu dengan yang lain, namun penelitian menunjukkan bahwa bagi kebanyakan penguasa lokal di Jawa, sistem perkebunan yang dikenal dengan istilah “tanam paksa” (*stelsel van kultures*) yang dijalankan oleh Gubernur Jendral J. Van Den Bosch justru mendapat dukungan

---

<sup>21</sup> Mark Cleary Peter Eato, “Borneo: Change and Development,” Singapore: Oxpord University Press, 1992, hal. 52-53, 57

<sup>22</sup> Glenn Smith, “Carok Violence in Madura: From Historical Conditions to Contemporary Manifestations,” dalam *FOLK: Journal of The Danish Ethnographic Society*, Vol. 39, 1997, hal.60 Lihat Juga: Dr. A. Latief Wiyata, 2002: 68-69

penuh dari penguasa di Jawa. J. Van Den Bosch sendiri mengaku bahwa sistem tersebut dia adopsi dari “adat kebiasaan petani Jawa dalam pembayaran pajak *in natura* kepada raja”<sup>23</sup>. *Cultuurstelsel* yang disebut oleh Benedict Anderson sebagai “sistem perkebunan yang brutal dan eksploitatif” (*brutally exploitative cultivation system*) tersebut menghasilkan keuntungan bersih bagi pemerintah kolonial Belanda sejumlah 823 juta guilders untuk kurun waktu 1831-1877<sup>24</sup>.

Keuntungan besar yang dinikmati oleh Belanda tersebut tentu saja diperoleh melalui pengorbanan dan kesengsaraan para petani miskin yang diperas melalui para penguasa dan elit lokal yang diberi wewenang oleh Belanda sebagai pemungut berbagai macam pajak dan cukai. Semakin rendah kedudukan dan status seseorang, semakin banyak pula pajak dan cukai yang harus ia bayar. Sistem “membayar uang toll” sesungguhnya telah dimulai pada masa itu yakni melalui pajak yang disebut *bandar palawang* yakni “cukai bagi setiap barang yang diangkut melalui pintu gerbang khusus”<sup>25</sup>. Semakin banyak gerbang yang dilalui tentu saja semakin banyak pula cukai yang harus dibayar. Sultan Hamengkubuwono I mempelopori pengontrakan *bandar-bandar palawang* tersebut kepada para *kapitan* Cina pada tahun 1755 dengan memberikan wewenang yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Suroyo berikut ini.

“.....seorang Cina pengontrak *bandar palawang* di Medono bernama Ka (Ga) He Te (Ko He Ti?) menaruh dua buah tombak di warung *bandarnya*. Apabila seorang pedagang menolak membayar cukai, ia boleh membunuhnya. Selanjutnya ia menarik cukai antara 5-25% pada setiap penjual.

---

<sup>23</sup> Suroyo (2000), catatan kaki no. 11, hal. 8

<sup>24</sup> Benedict Anderson, “The Spectre of Comparison: Nationalism, Southeast Asia and the World,” London-New York: Verso, 2000, hal. 122.

<sup>25</sup> Suroyo (2000), *ibid*, hal. 68

Kemudian si pedagang akan dikenakan lagi cukai apabila ia melewati *bandar* yang lain.<sup>26</sup>

Sistem seperti ini tentu saja tidak membuahkan rasa keadilan pada rakyat kebanyakan, apalagi kesejahteraan. Hal ini kemudian diperparah dengan sistem hukum yang lebih memihak para penguasa dan elit sehingga mendorong sebagian besar rakyat untuk mencari keadilan melalui caranya sendiri. Dr. A. Latief Wiyata dan Dr. Huub de Jonge dengan yakin menyatakan bahwa tradisi *Carok* di Madura tidak lain bersumber dari tidak terpenuhinya rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat akibat penguasa yang korup dan memeras serta hukum yang dijalankan berdasarkan hukum rimba belaka. Menurut Wiyata,

“.....akar permasalahan yang sesungguhnya dari malapetaka ini adalah pemerasan oleh elite pemerintahan yang terus berlangsung di pulau Madura. Dengan kata lain, kondisi politik feodalisme yang diterapkan di pulau Madura pada masa itu menjadi penyebab utama terjadinya penekanan-penekanan, penindasan-penindasan, serta pemerasan-pemerasan oleh elite pemerintahan terhadap rakyat yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya kesengsaraan baik secara sosial maupun ekonomi ..... keadaan di Madura mulai ada perubahan ketika mulai diterapkan sistem pemerintahan langsung.”<sup>27</sup>

## **IMPLIKASINYA DI MASA SEKARANG**

Douglas Kammen dari University of Canterbury-New Zealand menyebutkan bahwa Doktrin Teritorial yang dijalankan oleh militer Indonesia sesungguhnya telah menciptakan Pemerintah Bayangan (*Shadow Government*) dimana Pangdam dan Danrem

---

<sup>26</sup> Suroyo, *ibid*, hal. 68-69 (cetak miring oleh penulis)

<sup>27</sup> Wiyata (2002): 67-68

membayangi Gubernur, Dandim membayangi Bupati dan Walikota, Koramil membayangi Camat dan Babinsa membayangi Kepala Desa<sup>28</sup>. Dengan kata lain, sistem pemerintahan yang dijalankan sesungguhnya menerapkan kombinasi sistem pemerintahan sipil langsung dan sistem pemerintahan militer secara tidak langsung. Sistem ini konon dipilih untuk diterapkan berdasarkan pengalaman dalam Perang Gerilya melawan Belanda dimana kemenangan ditentukan oleh “horisontalisasi dan lokalisasi” serta “pentingnya keterlibatan secara mendalam dengan basis populernya.” Keterlibatan militer ini tentu saja semakin diperkuat dengan Doktrin Kekaryaannya yang memungkinkan anggota militer untuk menduduki jabatan-jabatan sipil dimasa lampau. Meskipun secara internal telah ada usaha-usaha dalam tubuh militer untuk mengurangi keterlibatannya dalam birokrasi sipil seperti dihapusnya dwifungsi TNI serta keluar dari keanggotaan DPR/MPR mulai tahun 2004, namun sistem pemerintahan bayangan tampaknya masih dipertahankan hingga sekarang.

Sistem ini tentu saja memiliki dampak yang sangat luas terhadap proses sosial dan pembentukan *nation-state* di Indonesia. Seserius apapun usaha pihak militer sekarang ini untuk mengurangi peran mereka dalam birokrasi sipil, namun jika penetrasi institusi militer ini tetap dibiarkan hingga ke tingkat birokrasi yang paling bawah seperti di desa-desa, maka usaha mengurangi militerisme niscaya akan sangat sulit dilakukan mengingat budaya yang telah terbangun selama ini. Masih dominannya keterlibatan militer dalam penyelesaian berbagai konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan misalnya, tidak akan mendorong terciptanya proses demokratisasi seperti yang kita harapkan bersama.

---

<sup>28</sup> Douglas Kammen, “Akhir Kedigdayaan” ABRI? (The End of the Indonesian Military’s “Invulnerability”?)” paper untuk The 12nd INFID Conference: The Role of Civil Society in Changing Indonesia. Natour Hotel, Kuta-Bali, September 14-17, 1999, hal. 16

Konflik yang destruktif dan disertai perilaku kekerasan hanya dapat diatasi manakala akar-akar masalah yang melatarbelakangi-nya diidentifikasi dan diselesaikan dengan tuntas. Dalam banyak kasus, lemahnya penegakkan hukum selalu menjadi pembuka gerbang bagi konflik yang lebih destruktif. Oleh sebab itu, lambannya kerja aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus yang berpotensi memicu terjadinya konflik etnis layak saja, dicurigai sebagai adanya "agenda tersembunyi" dari kelompok tertentu untuk memanfaatkan konflik yang terjadi demi kepentingan-kepentingan bisnis dan politisnya. Telah menjadi rahasia umum bahwa Peristiwa Demonstrasi terhadap etnis Tionghua tahun 1968-1969 tidak terlepas dari kepentingan militer dan penguasa saat itu untuk memerangi sisa-sisa PGRS/PARAKU yang memberontak.

Seperti yang telah banyak dikemukakan dan didiskusikan selama ini, berbagai kekerasan dan kerusuhan yang kerap melanda bangsa Indonesia berakar dari kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang memberi keadilan dan pemerataan bagi rakyat kebanyakan. Penghancuran sumber daya alam, terperangkapnya Indonesia dalam hutang luar negeri yang tak terbayar, maraknya praktik KKN, militerisme yang masih kental serta kebijakan yang gagal mengakomodir berbagai realitas kemajemukan di Indonesia telah mendorong terjadinya kekerasan demi kekerasan. Ancaman disintegrasi bangsa yang saat ini dianggap sebagai tantangan yang paling serius yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia-pun sesungguhnya berawal dari akar-akar persoalan yang sama. Rasa kecewa, frustrasi dan kemarahan yang sekian lama terpendam, menemukan salurannya dalam era reformasi yang memberi ruang lebih besar bagi keterbukaan dan demokratisasi.

Seperti yang diungkapkan oleh UNESCO, ".....since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." Dengan kata lain, harapan-harapan tentang Indonesia yang lebih damai dan berperikemanusiaan

harus dimulai dengan memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu hanya dapat terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang melanggengkan praktik-praktik ketidakadilan dan penindasan yang selama ini terjadi segera diubah dan diganti. Dan sekali lagi hal itu baru bisa diwujudkan jika seluruh komponen bangsa ini, terutama para elite politik dan pemegang kekuasaan lebih memikirkan kepentingan rakyat daripada kepentingan politis mereka sesaat seperti yang sering digelar dan dipertontonkan dalam berbagai peristiwa politik hingga saat ini.

## SUMBER BACAAN

Anderson, Benedict.

2000 "The Spectre of Comparison: Nationalism, Southeast Asia and The World," London-New York: Verso

Bamba, John.

2001a "Mengayau atau Perang? Fenomenologi kekerasan Antar Etnis di Kalimantan Barat"

Makalah untuk *Seminar Dalam Rangka Kampanye Melawan Diskriminasi Ras, Etnis, Agama, Jender, Xenophobia dan Bentuk-bentuk Intoleransi lainnya*, kerjasama Komnas HAM-Institut Dayakologi, Pontianak 18 September 2001.

2001b "CNN Effects atau Haatzaat Artikelen? Pemberian Media Massa Asing tentang Perang Antar Etnis di Kalimantan," disampaikan dalam *Lokakarya "Covering Conflict for Kalimantan Journalist"* ID, BC & BBC, Hotel Mahkota-Pontianak, 22 Oktober 2001.

Banton, Michael.

1997 "Ethnic and Racial Consciousness," 2<sup>nd</sup> Edition, London & New York Longman.

Berfield, Susan., & Keith Loveard

2001 "Kalimantan's Killing Fields," *AsiaweekCom Magazine*, 12 October 2001

Bray, Marianne.

2001 "Hate the Legacy of Indonesian's Tribal War," *CNN.Com*, June 29

Cleary, Mark., & Peter Eaton

- 1992 "Borneo: Change and Development," Singapore: Oxford University Press.
- Dahrendorf, Ralf.  
2001 "Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik," Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
- Fisher et.al., Simon.  
2001 "Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak," Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta The British Council.
- Hamacher, Werner.  
1997 "One 2 Many Multiculturalisms" dalam Hent de Vries & Samuel Weber (Ed.), dalam *Violence, Identity, and Self-Determination*, Stanford-California: Stanford University Press.
- Horowitz, Donald L.  
2000 "Ethnic Groups in Conflict," Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
- Kammen, Douglas.  
1999 "Akhir "Kedigdayaan" ABRI? (The End of the Indonesian Military's "Invulnerability"?)" paperuntuk *The 12<sup>th</sup> INFID Conference: The Role of Civil Society in Changing Indonesia*, Natour Hotel, Kuta-Bali, September 14-17.
- Kusni, Dr. J.J.  
1994 "Dayak Membangun" The Paragon's
- Manan, Abdul, Imam Sumaatmadja & Asep SP. Wardhana.  
2001 "Geger Santet Banyuwangi," Jakarta: ISAI

Panggabean, Samsu Rizal.

1999 "Negara dan kekerasan Subnasional," disampaikan dalam *Seminar "Peran Negara dan Resolusi Konflik: Transformasi Konflik Menuju Indonesia Baru*, "Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM dan The British Council, Kamis 18 November 1999.

Peluso, Nancy Lee & Emily Harwell.

2001 "Territory, Custom, and the Cultural Politics of Ethnic War in West Kalimantan, Indonesia," dalam Nancy Lee Peluso & Michael Watts (Eds.) *Violent Environment*, Cornell University Press.

Patebang, Edi & Eri Sutrisno.

2000 "Konflik Etnik di Sambas," Jakarta: ISAI.

Ranawidjaja, Mr. Usep.

1955 "Swapradja: Sekarang dan Dihari Kemudian", Djakarta: Penerbit Djambatan.

Salla, Michael E. Hamacher,

1997 "Conflict Resolution, Genetics, and Alchemy – The Evolution of Conflict Transmutation," <http://trininstitute.org/ojper/33salla.htm> 8/20/2001 6:25:09.

Satha-Anand, Chaiwat.

1992 "Towards a Peace Culture in Asia," dalam *UNESCO Studies on Peace and Conflict: Peace and Conflict Issues after the Cold War*, Paris: UNESCO

Siegel, James T.

1999 "A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today," Durham & London: Duke University Press.

Smith, Glenn.

- 1997 "Carok Violence in Madura: From Historical Conditions to Contemporary Manifestations," dalam *FOLK: Journal of the Danish Ethnographic Society*, Vol. 39.

Spillius, Alex.

- 1999 "5,000 Trapped in Forest as Tribal Feud Continues," *Electronic Telegraph*, Tuesday 23 March.

Suroyo, A.M. Djuliaty.

- 2000 "Eksplorasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1860," Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Tsing, Anna L.

- 1993 "In the Realm of the Diamond Queen," Princeton-New Jersey: Princeton University Press.

Usop, M.A., Prof. KMA. M.

- 1994 "Pakar Dayak: Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak & Daerah Kalimantan Tengah" Palangkaraya: Yayasan Pendidikan & Kebudayaan Batang Garing.

Van Klinken, Gerry.

- 2002 "Akar-akar Kolonial dari Konflik Etnis," makalah untuk *International Conference: Indonesia Transition to Democracy: Issues and Actors in the Local and International Perspective* diselenggarakan oleh ISAI & KONTRAS, Jakarta 17-19 January 2002.

Wiyata, Dr. A. Latief.

- 2002 "Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura," Yogyakarta: LKiS.

# **POLA PERTIKAIAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHINYA**

***Syarief Ibrahim Alqadrie***

Program Strata Dua Ilmu-Ilmu Sosial (S2 IIS)  
Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak

## **ABSTRAK**

Pola pertikaian etnis di Kalimantan Barat (Kalbar) berbeda dengan pola yang terjadi di propinsi lainnya di Kalimantan. Pola pertikaian di propinsi ini tampaknya lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi dan faktor sosial politik. Faktor sosial budaya antara lain terdiri media identifikasi, identifikasi etnis-keagamaan (*ethnic-religio identification*), karakter gerakan sosial, hubungan antara sikap keagamaan dengan pandangan terhadap eksistensi sumberdaya alam dan terhadap martabat manusia, kesenjangan antara sistem nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat, dan pola kepemimpinan dan daya kepengikutan. Faktor sosial ekonomi meliputi kompetisi yang kurang adil dalam kegiatan ekonomi seperti pengambilalihan dan pemindahan secara perlahan-lahan lapangan kerja maupun asset ekonomi dari tangan atau milik anggota beberapa kelompok etnis tertentu kepada anggota satu kelompok etnis pendatang. Sedangkan faktor sosial politik mencakup afiliasi politik yang berkaitan dengan ambisi politik dari elit-elit politik yang ingin memperoleh kedudukan atau jabatan-jabatan politik dan strategis dalam berbagai sektor. Afiliasi politik terhadap partai tertentu yang dimiliki oleh anggota kelompok etnis tertentu cenderung dianggap sebagai faktor penghalang dari ambisi politik tersebut. Elit-elit politik dari kelompok etnis tertentu akan berusaha mencegah agar

afiliasi politik yang menjadi penghalang bagi ambisi politik mereka tidak timbul dan tidak terkristal di dalam keanggotaan di DPRD Kabupaten. Pertikaian etnis, dalam kasus ini, tampaknya bertujuan mencegah afiliasi politik semacam itu dengan menekan dan memindahkan anggota kelompok etnis tersebut ke daerah pemilihan lain.

Dua faktor yang disebut terakhir, ekonomi dan politik, tampaknya merupakan faktor kunci atau akar masalah yang mendorong faktor pemicu yang disebut sebelumnya untuk menimbulkan pertikaian horizontal. Pertikaian yang memprihatinkan itu telah berlangsung selama 12 kali sejak 1963, bahkan juga telah menghasilkan pola pertikaian etnik yang khas di Kalbar yang berbeda dengan pertikaian di daerah lainnya.

# POLA PERTIKAIAN ETNIS DI KALIMANTAN BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHINYA<sup>1</sup>

*Syarief Ibrahim Alqadrie*<sup>2</sup>

Program Strata Dua Ilmu-Ilmu Sosial (S2 IIS)  
Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak

## 1. Pendahuluan

Sejak 1963 telah terjadi 12 kali pertikaian antar anggota kelompok komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar) yaitu 1 (satu) kali antara anggota komunitas Dayak dengan anggota komunitas Cina (di daerah ini mereka biasa dan suka disebut Tionghoa) yang terjadi pada beberapa kawasan pedalaman di Kabupaten Sambas, Pontianak dan Kabupaten Sanggau, 9 (sembilan) kali antara anggota komunitas Dayak pedalaman dengan komunitas Madura

---

<sup>1</sup> Makalah ini disajikan kepada para peserta Temu Budaya yang bertema Konsep Sosial dan Kebudayaan Daerah dengan Sub tema Identitas dan Krisis Budaya yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, 3 September 2002.

<sup>2</sup> Alqadrie adalah Profesor Sosiologi pada FISIPOL UNTAN, Pontianak. Sejak Agustus 1995 s/d September 2001 ia menjabat Dekan pada Fakultas tsb. Selama dua kali masa jabatan. Pengalaman kerjanya dimulai dari menjadi Guru SD Islamiyah Kampung Bangka (1966-1968), Guru SMEP Negeri Ptk. (1968-1972), Guru SMEA Negeri, Ptk. (1972-1974), Asisten Dosen Luar Biasa (UNTAN) (1969-1974) dan Dosen Tetap UNTAN (1975-sekarang). Pendidikan S1 diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) di masing-masing dalam Jurusan Sosiologi Pertanian dan Pedesaan (*Agricultural and Rural Sociology*) dalam Jurusan Sosiologi Politik dan Etnisitas (*Political Sociology and Ethnicity*) pada University of Kentucky, Lexington, AS. Tahun 1993 ia memperoleh Penghargaan *David Penny Award* dari Yayasan Agro Ekonomika (YAE) bekerjasama dengan *David Penny Foundation*, Australia, sebagai peneliti dan penulis terbaik tentang Kemiskinan. Tahun 1998 mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) VII LEMHANNAS (selama 4 ½ bulan) di Jakarta. Pada tahun 1999 dianugrahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden R.I. Sejak Juli 2000 diangkat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial UNTAN.

pedalaman yang terjadi pada beberapa kawasan pedalaman di Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang setelah kabupaten baru ini berdiri tahun 1999), sebagian besar kawasan pedalaman di Kabupaten Pontianak (termasuk di Kabupaten Landak setelah kabupaten ini berdiri tahun 1999) dan pada beberapa kawasan di Kabupaten Sanggau, 1 (satu) kali antara anggota komunitas Melayu Sambas yang berlangsung di berbagai kawasan Kabupaten Sambas (pertikaian ini tidak termasuk pada kawasan di Kabupaten Bengkayang), dan 1 (satu) antara komunitas Melayu campuran – Pontianak, Sambas, Ketapang, dan sebagainya – dan komunitas campuran – Keturunan Banjar, keturunan Arab dan sebagainya, disatu pihak, dengan anggota komunitas Madura, yang terjadi di Kota Pontianak, khususnya di sekitar Jembatan Kapuas<sup>3</sup>. Dibanding dengan pertikaian-pertikaian sebelumnya, pertikaian yang disebut terakhir ini yang

---

<sup>3</sup> Ada dua kelompok ilmuwan yang berbeda pandangan dalam hal ini menamakan apakah pertikaian di Kalbar sejak 1963 lebih tepat dinamakan sebagai pertikaian atau konflik antar kelompok etnis atau pertikaian antar komunitas. Saya sendiri lebih cenderung setuju pada pandangan kedua, konflik antar anggota komunitas (Alqadrie, 1999a:34), karena tiga kali pertikaian berdarah sangat besar yang menimbulkan banyak korban nyawa, harta benda dan pengungsian besar-besaran – Kasus Samalantan, Sanggau Ledo, dan Sambas – dari 12 kali pertikaian sejak 1963, tidak sama sekali melibatkan bagian terbesar dari anggota-anggota dari kelompok –kelompok etnis – Dayak, Madura dan Melayu – pada saat or setelah pertikaian terjadi di tempat-tempat lain di luar kawasan pertikaian dari dua pihak yang saling bermusuhan. Bahkan, pada kasus Sambas, pertikaian atau konflik tersebut tidak juga sama sekali melibatkan sebagian terbesar dari orang-orang Melayu dan Madura secara keseluruhan di tempat-tempat lain baik di Kalbar maupun di propinsi Indonesia lainnya, pertikaian tersebut hanya terjadi di atau sekitar kawasan Kabupaten Sambas. Dengan demikian perasaan permusuhan dari anggota kedua komunitas tersebut terhadap satu dengan lainnya tidak ditemukan di luar kawasan perbatasan Kabupaten Sambas pada saat itu (sebelum daerah kabupaten Madura, yang berada di Desa Sungai Duri I dan Desa Sungai Pinyuh sedikit di luar kawasan tapa batas kabupaten (*district border area*) antara Kabupaten Pontianak dengan Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang setelah kabupaten baru ini berdiri pada tahun 1999), tidak merasa perlu ikut-ikutan bermusuhan, tetapi sebaliknya mereka masih tetap bersahabat dan berkomunikasi dengan lancar antara satu dengan lainnya.

terjadi awal tahun 2000 berlangsung hanya selama tiga hari dan menelan korban tidak lebih dari 2 (dua) orang.

Dari 12 kali pertikaian tersebut, 10 kali diantaranya terjadi antara dua komunitas – Dayak dengan Madura di pedalaman Kalbar. Tiga dari 10 kali pertikaian tersebut merupakan pertikaian sangat besar dan paling berdarah (*very bloody conflicts*), apa yang disebut dengan kasus Samalantan, Kabupaten Sambas (sekarang Kabupaten Bengkayang), yang terjadi pada tahun 1967, dan kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan Kasus Salatiga, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Landak), yang meletus secara bersamaan pada tahun 1996/1997.

Ketiga pertikaian besar di atas telah menelan kerugian harta benda dan korban nyawa yang tidak kecil<sup>4</sup> yang menimbulkan

---

<sup>4</sup> Berapa besar kerugian harta benda dan korban nyawa yang timbul dalam ketiga kasus tersebut, sampai sekarang sulit dinyatakan dengan pasti. Bahkan para pakar, peneliti atau pengamat pertikaian Kalbar, dan juga para tokoh masyarakat Dayak, Melayu dan Madura sendiri, dan Pemda Propinsi Kalbar, yang diwakili oleh Petugas dari Bagian/Dinas terkait maupun Petugas Keamanan, dalam hal ini Petugas Kepolisian dan Pemda Kabupaten, masih berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu dapat di kelompokkan ke dalam tiga kelompok: Pertama, pendapat atau perkiraan yang muncul mengenai kerugian harta benda dan korban nyawa dari sumber Pemda dan Petugas Keamanan cenderung dikecilkan/direndahkan dari jumlah yang terjadi sesungguhnya; kedua, perkiraan yang berasal dari tokoh/pemuka masyarakat dari kelompok etnis/komunitas tertentu terhadap besarnya kerugian harta benda dan korban nyawa dari komunitasnya sendiri cenderung dibesar-besarkan; ketiga, perkiraan dari tokoh masyarakat dari kelompok komunitas tertentu terhadap besarnya korban harta benda dan nyawa dari kelompok komunitas lain (lawan dari komunitasnya) cenderung direndahkan; keempat, perkiraan dari para pakar atau pengamat juga sulit diharapkan obyektivitasnya, karena pertikaian antar komunitas di daerah ini selama ini berlangsung pada kawasan yang luas, terjadi secara tiba-tiba, bahkan serangan terhadap anggota satu komunitas terkait dalam satu kawasan tertentu, misalnya kampung, desa atau kecamatan tertentu, dilakukan oleh mereka yang berasal dari kampung, desa atau kecamatan lain (dari luar kawasan tersebut). Sehingga, para pengamat mengalami kesulitan mengikuti secara langsung dan menghitung besarnya kerugian harta benda dan jumlah korban nyawa yang timbul dalam pertikaian tersebut. Lagipula, tidak sama dengan pertikaian atau peristiwa kriminalitas lainnya yang menimbulkan korban nyawa dan kerugian harta benda dalam mana korban yang jatuh dibawa ke rumah sakit untuk segera diotopsi dan

kepedihan mendalam, ketakutan, trauma, dendam yang tidak habis-habisnya, bahkan kebencian mendalam kedua belah pihak yang tidak mudah dihapuskan sebelum ada rujuk atau rekonsiliasi dan penyelesaian menyeluruh. Konsekuensi di atas masih ditambah lagi dengan kekhawatiran sangat mendalam dari Pemda, berbagai kalangan dan kelompok etnis termasuk ketiga kelompok etnis di atas tentang kemungkinan pertikaian seperti itu akan terulang kembali.

Kepedihan, ketakutan, trauma, dendam, kebencian dan kekhawatiran akan terulang kembali pertikaian yang memprihatinkan itu, merupakan konsekuensi logis dari dan membentuk pola pertikaian tersendiri yang khas Kalimantan Barat (*Typical West Kalimantan conflict pattern*), yang membedakannya dari pola pertikaian lainnya tidak saja di bagian lainnya di dunia tetapi juga di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Keunikan pola pertikaian antar anggota komunitas di daerah ini diperkaya oleh fakta bahwa hubungan baik dan harmonis yang telah berlangsung cukup lama antara anggota dari dua kelompok etnis ini, Dayak dengan Madura, dan Melayu dengan Madura, dalam satu desa, kampung bahkan kecamatan, terpaksa harus berakhir sementara, karena serangan terhadap anggota komunitas Madura, dilakukan secara tiba-tiba oleh anggota komunitas Dayak pedalaman yang berasal dari luar desa, kampung dan kecamatan, dimana hubungan sangat bersahabat itu telah berjaln. Hampir tidak ada kesempatan bagi anggota komunitas Dayak untuk melindungi/menyelamatkan sahabat dan "saudara" Madura mereka yang telah lama menjadi tetangga dekat mereka, kalau mereka tidak ingin menjadi korban.

Pola pertikaian khas yang dimiliki Kalbar pada dasarnya disebabkan oleh fakta bahwa pertikaian antar komunitas di daerah ini tidak saja menimbulkan 6 (enam) konsekuensi logis yang

---

dihitung, korban nyawa dalam pertikaian di Kalbar tersebar di berbagai sudut kawasan yang sangat luas, bahkan ada yang segera dikuburkan.

memprihatinkan sebagaimana disebutkan diatas, dan terjadi berulang kali sebanyak 12 kali sejak tercatat pada 1963 (Alqadrie, 1999b), tetapi juga pertikaian tersebut, yang tampaknya terjadi secara besar-besaran berulang kali secara periodik hampir setiap 30 tahun sekali (1990-an, 1930-an, 1967/1968, 1997/1998, dan 2026/2027 (?), didorong atau dimotivasi oleh berbagai kondisi dan faktor.

Faktor-faktor penyebab timbulnya pertikaian antar kelompok komunitas yang telah menghasilkan apa yang di sebut sebagai pola pertikaian khas Kalbar antara lain adalah faktor sosial, budaya, yang merupakan faktor pemicu, dan faktor ekonomi dan politik, yang dianggap sebagai faktor akar masalah.

Tulisan ini diharapkan dapat mengungkapkan pola pertikaian khas yang terjadi di Kalbar melalui berbagai kondisi dan faktor-faktor khas yang mempengaruhi terjadinya pertikaian di daerah ini selama ini dan yang membentuk pola pertikaian tersendiri yang khas dan berbeda dengan apa yang terdapat di daerah lain.

## **2. Faktor Sosial Budaya**

Faktor ini, yang dianggap sebagai faktor pemicu (*trigger factors*) bagi sebagian terbesar pertikaian di Kalbar, antara lain terdiri dari media identifikasi, identifikasi etnis-keagamaan (*ethnic-religio identification*), karakter gerakan sosial, hubungan antara sikap keagamaan dengan pandangan terhadap eksistensi sumberdaya alam dan terhadap martabat manusia, dan kesenjangan antara sistem nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat.

### **2.1. Media Identifikasi (*Identification Media*).**

Kelompok etnis tidak dapat dipisahkan dari identitas fisik dan bukan fisik atau karakteristik biologisnya sendiri yang berbeda dengan kelompok etnis lain yang mampu baik dalam berkembang biak dan bertahan, maupun dalam menentukan ciri kelompoknya

sendiri yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok etnis lain, yaitu pengakuan sosial karena masing-masing adanya persamaan ke dalam dan perbedaan ke luar dalam nilai-nilai budaya, termasuk di dalamnya nilai-nilai keagamaan dan bahasa (Narrol, 1964; Barth, 1969). Demikian halnya dengan Melayu, sebagai suatu kelompok etnis seperti batasan ideal yang dikemukakan oleh dua sarjana di atas, ia juga merupakan sebuah media identifikasi bagi para anggota kelompok etnis Dayak dan kelompok etnis lainnya di Kalbar yang tampaknya menyumbang tidak saja bagi tampilnya kelompok etnis Melayu sebagai kelompok yang mampu menampung para anggota dari berbagai-bagai kelompok etnis yang merasa kehilangan identitas mereka setelah memeluk agama Islam, tetapi juga bagi terbentuknya pola pertikaian (*conflict pattern*) antar komunitas antar kelompok etnis yang khas di daerah ini.

Anggota kelompok etnis dayak dan kelompok etnis lainnya yang bukan beragama Islam di Kalbar, seperti Cina (Tionghoa), kecuali Jawa, Batak dan Ambon, mengidentifikasikan diri mereka dan diidentifikasikan sebagai “Melayu”. Dalam kaitannya dengan anggota kelompok etnis Dayak, mereka yang masuk Islam, dianggap “naik” atau “masuk” Melayu<sup>5</sup>. Melayu sebagai media identifikasi di daerah ini secara langsung dan tidak langsung telah “menarik” dan menyediakan ruang budaya yang sangat luas bagi anggota kelompok etnis Dayak bukan muslim. Pertemuan antara proses pengidentifikasian diri orang-orang Dayak Muslim untuk “menjadi” dan “diterima” sebagai Melayu melalui proses diidentifikasikannya (“ditolakny”) mereka oleh kelompok mereka sendiri untuk tidak lagi dianggap sebagai Dayak, tampaknya,

---

<sup>5</sup> Di Kapuas Hulu, anggota kelompok etnis Dayak yang masuk Islam diidentifikasikan oleh masyarakat di situ khususnya oleh anggota kelompok etnis Dayak non-Muslim sebagai *Senganan*. Istilah ini menunjuk tidak hanya pada akulturasi Islam dengan Budaya Dayak (Sutini Ibrahim, 1996: 203-212), tetapi juga pada media identifikasi transisi dari kelompok etnis asal (Dayak) menuju kelompok etnis “baru”, Melayu, setelah melalui proses waktu dalam berakulturasi dan “pendalaman.”

menurut pengamatan Syarif I Alqadrie (2002:15), telah menyebabkan keduanya, komunitas Dayak Muslim, disatu pihak, dan anggota kelompok Dayak non-Muslim, di lain pihak, masing-masing merasa telah “dikeluarkan, diasingkan” dan “tidak diterima” lagi sebagai keluarga besar Dayak, dan merasa bahwa Melayu dan saudara mereka yang masuk Islam telah meninggalkannya, memisahkan dan “mengisolasi” mereka.

Perasaan dan anggapan seperti itu merupakan faktor psiko-kultural dan sosiologis dari beberapa faktor yang menyebabkan pertikaian antar komunitas di Kalbar memiliki pola khas yang berbeda dengan pertikaian lainnya di Indonesia: keras (*violent*), berlangsung berkali-kali (selama sembilan kali sejak 1963), dan sulit diantisipasi. Namun, pemahaman terhadap pola pertikaian dimana pun ia terjadi perlu pula dilihat dari kelompok etnis atau komunitas lain yang juga sering terlibat dalam pertikaian tersebut, dalam hal ini komunitas Madura dan Melayu. Faktor psiko-kultural dan sosiologis sebagaimana diuraikan di atas juga dapat menjelaskan mengapa kebanyakan anggota kelompok etnis Dayak Kalbar, khususnya non-Muslim merasa “sendiri”, “introvert”, “rasa rendah diri” (*inferiority complex/self unconfidence*), sangat sabar dalam menghadapi rintangan dan masalah, namun sampai pada batas kesabaran, kemarahan mereka dapat meledak dan sulit terbenyung (Alqadrie, 1994, 1996a, 1996b), cepat percaya dengan apa yang dikatakan oleh tokoh/elit politik mereka, karena mereka memerlukan tempat bergantung dari rasa keterasingan dan ketersingkiran itu.

## **2.2 Faktor Identifikasi Etnis dan Keagamaan (*ethno-religio Identification*).**

Di Kalbar kedua faktor sosial budaya ini tidak berdiri sendiri. Mereka secara bersama-sama tampaknya membentuk pola pertikaian antar komunitas yang khas terjadi di daerah ini melalui solidaritas dan kesadaran etnis. Di propinsi ini identifikasi etnis

orang-orang Dayak dan orang-orang Madura, khususnya mereka yang berdomisili di kawasan pedalaman dimana pertikaian itu terjadi, cenderung mengarah pada kelompok etnis, yaitu masing-masing pada kelompok etnis Dayak dan pada kelompok etnis Madura secara keseluruhan. Adalah benar, ke dalam, anggota kelompok etnis atau komunitas Dayak pedalaman dan Madura Kalbar mengenal dan mengakui bahwa mereka, orang-orang Dayak, terdiri dari sub-sub kelompok etnis, seperti Kenayatri, Kendayan, Bekatek, Menyuke, Kayan, Taman, Kenyah dan lain sebagainya, dan orang-orang Madura berasal dari Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan lain sebagainya, tetapi ke luar, mereka masing-masing mengidentifikasi secara etnis sebagai satu kelompok etnis: Dayak dan Madura secara keseluruhan. Ada kesan kedua komunitas ini masing-masing adalah tunggal, homogen.

Konsekuensi logis dari identifikasi etnis yang terpusat dan tidak tersebar semacam itu adalah bahwa kesetiakawanan etnis (*ethnic solidarity*) mereka – Dayak dan Madura – masing-masing juga menjadi terpusat, bulat, satu, tunggal, sangat kuat dan tidak terpecah atas dasar garis sub kelompok etnis. Solidaritas etnis semacam ini cenderung membentuk atau memperkuat kesadaran etnis (*ethnic consciousness*).

Reformasi dalam segala bidang yang mengantar bangsa Indonesia ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi (Mardjono, 1998; Mubyarto, 1998), telah melahirkan kembali (*revivalism*) dan memperkuat kembali (*revitalism*) kesadaran etnis dan keetnikan (*ethnicity*) itu sendiri. Ini barangkali dapat menjelaskan mengapa jauh sebelum bangsa-bangsa di negara-negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia), menghadapi fenomena disintegrasi nasional yaitu perpecahan dan keinginan untuk bebas dari pemerintah pusat, negara-negara industri maju (NIM) pada permulaan perkembangan mereka, bahkan sampai sekarang pun, telah sedang menghadapi fenomena disintegrasi seperti itu sebagai

konsekuensi dari kesadaran etnis yang bersifat ke luar (*external ethnic consciousness*)<sup>6</sup> yang melahirkan nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*), kemerdekaan dan bebas dari penguasaan dominasi dan eksploitasi pemerintah pusat (Sumartana, dkk., 2001; Tiryakian, 1985; Alqadrie, 1989).

Kesadaran etnis yang melahirkan nasionalisme etnis terjadi baik di NSB, seperti Kasus Karen, Myanmar; Kasus Moro atau Mindanao, Filipina Selatan; Kasus Thailand Selatan; Kasus Kashmir pada kawasan yang dikuasai oleh India; Kasus Tibet yang sekarang dikuasai oleh RRC; Kasus Macan Tamil, Sri Lanka (Alqadrie, Dalam Bamualim dkk., 2002b; 125-156); Kasus Aceh, Riau, Papua Barat (Irian Jaya) di Indonesia, dan sebagainya, maupun di NIM seperti antara lain Kasus Quebequois, Canada (Dofny, 1985); Kasus Celtic, Irlandia Utara (O'Sullivan, 1980; Smith, 1981; Alqadrie, 1989); Kasus Catalan, Spanyol; Kasus Basque, Spanyol dan Prancis (Smith, 1987; Alqadrie, 1989); Kasus Flemish, Denmark (Smith 1987; Alqadrie, 1990); Kasus-kasus Bosnia-Herzegovina dan Kosovo, Bekas Yugoslavia (Alqadrie, Dalam Bamualim, dkk., 2002:125-156); dan Kasus-kasus bekas Republik Uni Sovyet yaitu Chechnya, Slovenia, Azerbaijan, and lain sebagainya. Kesemua kasus tersebut yang melahirkan pertikaian etnis, nasionalisme etnis dan gerakan yang ingin dan bahkan telah memerdekakan diri, tidak semata-mata

---

<sup>6</sup> Kesadaran etnis dilihat dari sumbernya dibagi dua: (1) Kesadaran etnis yang berasal dari dalam (*internal ethnic consciousness*) adalah kesadaran yang timbul dari pemahaman bahwa adanya suatu kelompok etnis merupakan suatu entitas dan produk dari fakta sosial dan sosio-historis yang tidak dapat dihindari, karena itu keberadaannya harus diakui dan dihargai oleh siapapun. Hubungan etnis, dalam konteks ini, adalah hubungan timbal balik yang saling menghargai dan menguntungkan. (2) Kesadaran etnis yang timbul dari luar (*external consciousness*) adalah kesadaran yang terbentuk dari realitas dari relasi sosial pada mana ketika suatu kelompok etnis tertentu berhadapan atau berhubungan dengan kelompok lain, kelompok etnis pertama menemukan realitas yang tidak menguntungkan bahkan mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitatif, karena hubungan tersebut berjalan secara tidak seimbang dan didasari tidak saja oleh unsur dominasidan manipulatif, tetapi juga oleh motif sepihak bagi penciptaan ketergantungan dan marginalisasi.

timbul dari perbedaan budaya maupun agama tetapi tampaknya lebih merupakan akibat dan reaksi terhadap apa yang dipahami sebagai praktek kolonialisme interen (*internal colonialism*) (Hecter, 1985), sentralisme yang sangat berlebihan, ketidakadilan dan marginalisasi.

Kembali pada diskusi di atas tentang hubungan antara kesetiakawanan etnis dan kesadaran etnis, adalah tidak sulit dibayangkan mengenai apa yang akan dan telah terjadi dalam realitas hubungan antar etnis atau komunitas di Indonesia, khususnya di Kalbar, bilamana kesadaran etnis eksteren yang begitu besar sampai menjadi kekuatan perlawanan dan disintegrasi sebagaimana terjadi pada kasus-kasus yang diuraikan di atas, mempengaruhi dan mendorong kesetiakawanan etnis yang memang telah cukup besar sebagai konsekuensi dari identifikasi etnis pada anggota komunitas Dayak dan Madura yang mengarah dan terpusat pada kelompok etnis, bukan pada sub kelompok etnis.

Tidak berbeda dengan identifikasi etnis yang menghasilkan kesetiakawanan etnis yang besar dan terpusat, identifikasi keagamaan (*religious identifications*) pada masyarakat Dayak, khususnya non-Muslim, di Kalbar mengarah dan terpusat pada kekristenan (*Christeninty*). Dalam masyarakat Dayak Kalbar telah terjadi dua kali perubahan identifikasi dalam segi keagamaan. **Pertama**, dimulai sejak pertengahan 1970-an, identifikasi keagamaan mereka mengalami perubahan dari identifikasi pada adat dan tradisi sebagai masyarakat adat ke Kristenan sebagai masyarakat Kristen (Alqadrie, 1987; 2000). Perubahan ini terjadi sebagai konsekuensi tidak saja dari kesadaran dan kesetiakawanan etnis maupun komitmen untuk menjadikan kehadiran mereka kembali ke kelompok etnis mereka dapat membantu mengantisipasi pertikaian etnis di masa mendatang, tetapi juga dari keberhasilan dan proses perjuangan panjang para misionaris dan zending dalam menginjilkan masyarakat Dayak.

**Kedua**, dimulai sejak sekitar awal 1998 yaitu beberapa bulan sebelum memasuki era reformasi, telah terjadi pula perubahan dalam media identifikasi bagi orang-orang Dayak. Ada kecenderungan bahwa Melayu tidak lagi sepenuhnya menjadi media identifikasi bagi orang-orang Dayak baik yang telah memeluk agama Islam dan “menjadi” Melayu maupun yang baru akan masuk Islam. Dengan kata lain, bagi mereka, memeluk agama Islam tidak dengan sendirinya “menjadi” atau “masuk” Melayu, tetapi mereka kembali mengidentifikasi diri mereka sebagai Dayak. Proses perubahan kembali ke identifikasi semula dilakukan oleh mereka dengan mendirikan dan bergabung ke dalam organisasi Ikatan Keluarga Dayak Islam (IKDI) (Alqadrie, 2002a:16). IKDI belum diterima sebagai anggota Dewan Adat Dayak (DAD), karena sebagian kecil anggota kelompok etnis ini, tetapi sebagian besar dari elit politik mereka belum sepenuhnya menerima kehadiran saudara mereka kembali.

Perubahan kedua dalam media identifikasi di kalangan orang-orang Dayak Muslim tampaknya tidak mampu mencegah identifikasi keagamaan dari anggota kelompok etnis ke arah Kristenitas. Identifikasi etno-religio semacam itu dapat ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak di Kalbar sehari-hari dalam bentuk pernyataan mereka sehari-hari : “Saya ini orang Dayak”. Pernyataan ini secara implisit mengandung pengertian dan ia ingin mengatakan bahwa ia adalah anggota dari kelompok etnis Dayak (bukan anggota dari sub kelompok etnis Dayak yang banyak itu) dan beragama kristen, walaupun ia tidak perlu menyebutkan secara eksplisit identitas tersebut. Konsekuensi logis dari makna implisit dari pernyataan itu adalah kalau ada tuntutan terhadap bupati atau gubernur agar diisi oleh orang dayak, itu berarti pejabat itu haruslah mereka yang beragama Kristen.

Seperti juga halnya dengan identifikasi etnis yang menghasilkan solidaritas masyarakat Dayak dan komunitas Madura di Pedalaman yang terpusat, identifikasi keagamaan

orang-orang Dayak terhadap Kristenitas, di satu pihak, dan anggota komunitas Madura di kawasan itu terhadap Islam, dilain pihak, menghasilkan pula solidaritas etnis yang terpusat, tidak menyebar maupun tidak terpecah-pecah atas dasar garis-garis agama, besar dan sangat kuat. Solidaritas etnis semacam ini dipasangkan dengan kesadaran etnis baik ekstern pada kelompok etnis Dayak, yang menurut pengamatan Alqadrie (1994:2001), merupakan reaksi dari rasa terpinggirkan dan menjadi penonton atas proses kehancuran sumberdaya hutan (*deforestation process*) dan sumber daya alam (SDA) lainnya, maupun kesadaran etnis interen dan eksteren pada anggota komunitas Madura, yaitu keinginan untuk diakui tentang keberadaan mereka yang mereka percaya masih berada pada posisi bawah dan proses marginalisasi dan dipinggirkan oleh Pemerintah ORBA sejak mereka berada ditempat asal mereka, telah mewarnai perilaku mereka yang kelihatan tenang dan sabar di luar, tetapi menyimpan “api di dalam sekam”, setiap saat membakar, terbakar dan meledak. Kondisi ini menyumbang bagi terciptanya pola pertikaian khas – keras, bringas, berdarah (*violent conflict*) dan terjadi berulang kali.

### **2.3 Hubungan antara Sikap Keagamaan dengan Pandangan terhadap Eksistensi Sumberdaya Alam dan Martabat Manusia, dan Kesenjangan antara System Nilai Budaya dengan Aplikasinya Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat.**

Anggota kelompok etnis Dayak meemluk berbagai-bagai agama resmi yang diakui oleh Pemerintah, dan agama nenek moyang mereka seperti Kaharingan dan semacam Animisme. Akan tetapi sebagian besar dari mereka menganut agama Katolik, Berbeda dengan ajaran agama Protestan dan Islam, Katolik tampaknya lebih cenderung “membumikan” agama. Ini berarti bahwa ajaran agama ini lebih mungkin masih memberikan

ruang budaya (*cultural space*) yang lebih luas bagi penganutnya untuk menjalin hubungan dengan, mengakui, mempraktekkan dan mempertahankan kebiasaan, adat istiadat, tradisi nenek moyang, nilai-nilai budaya dan orientasi nilai budaya lama. Selain itu, agama ini masih memberikan toleransi yang cukup besar bagi pesta atau upacara-upacara adat (*customary party*) dan memberikan tempat bagi berkembangnya kearifan setempat (*local wisdom*).

Ruang budaya yang lebih luas yang diberikan oleh Katolik terhadap penganutnya mendorong sebagian terbesar anggota kelompok etnis Dayak Kalbar untuk memiliki kepedulian yang relatif besar terhadap SDA, lingkungan dan kelestarian mereka. Begitu besarnya rasa memiliki orang-orang pedalaman terhadap SDA dan lingkungannya, sehingga mereka memiliki semacam prinsip dan motto budaya yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti : “hutan adalah dunia kita”, “hutan adalah pasar swalayan (*supermarket*). (Alqadrie, 1990; 1994), yang dapat dimanfaatkan secukupnya untuk keperluan sehari-hari, tanpa dihancurkan. Dalam rangka otonomi daerah dengan menerapkan desentralisasi kebijakan pembangunan kehutanan, hutan seharusnya daspat “dijual” dengan tanpa merusak dan menghancurkannya (Tim Peneliti CIFOR Kalbar, 2001) melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektoral, termasuk di dalamnya mengembangkan obyek dan kegiatan pariwisata di sekitar dasn di luar kawasan hutan sebagai pagar pengaman (*bumper*).

Selama lebih dari tiga dekade ini, kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan ORBA bahkan sampai sekarang ini ternyata didasari pada paradigma yang tidak tepat – yaitu paradigma yang semata-mata menekankan pada [pertumbuhan ekonomi semata dan kestabilan semu (Mansour Fakih, 2000), yang dirumuskan dari atas-bawah (*top-down policy*) dan sangat sentralistis. Kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi semata

adalah kebijakan pembangunan yang mengandung unsur kapitalistis sempit dan mengundang keserakahan (Fakih, 2002), dengan membuka dan mengeksploitasi sebesar-besarnya potensi ekonomi dan SDA tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya setempat, maupun mengenyampingkan kehidupan dan kepentingan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma kestabilan semu adalah kebijakan pembangunan yang memberikan peluang sangat besar bukan kepada daerah dan rakyat setempat tetapi justru kepada kelompok konglomerat dan elit-elit politik dan militer untuk mengelola pembangunan dan SDA guna memperoleh devisa sebesar-besarnya bagi dana pembangunan dan pengamana status quo.

Kebijakan pembangunan sebagaimana disebutkan diatas, ternyata sangat melukai hati masyarakat setempat, membuat mereka merasa dipinggirkan dan dikorbankan bagi pembangunan, itu sendiri, karena kebijakan semacam itu jelas-jelas melanggar prinsip keleluasaan ruang budaya, tidak menghormati kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan adat istiadat, maupun tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap kelestarian lingkungan. Kondisi seperti ini tampaknya merupakan andil bagi terciptanya pola pertikaian khas di Kalbar yang berbeda dengan daerah lainnya.

Perasaan dan kondisi terluka, terpinggirkan dan dikorbankan yang dialami oleh masyarakat di pedalaman tidak berdiri sendiri. Mereka bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan sikap keagamaan anggota komunitas Madura pedalaman. Max Weber(1958) memberi informasi kepada kita tentang keterkaitan antara sikap keagamaan dengan perilaku ekonomi.

Adalah benar bahwa 99% dari jumlah anggota komunitas madura beragama Islam, tetapi juga dapat diterima bahwa sikap keagamaan antara satu komunitas, dalam hal ini komunitas Madura, berbeda dari sikap keagamaan yang dimiliki oleh anggota

komunitas lain, walaupun mereka berada dalam satu agama. Tingkat pendidikan, kedalaman dalam penguasaan pengetahuan agama, dan latarbelakang sosial, budaya, ekonomi yang dimiliki oleh anggota dari suatu kelompok komunitas tertentu mewarnai sikap keagamaan mereka yang berbeda dari sikap keagamaan kelompok lainnya.

Dalam agama Islam dikenal dua jalur pokok hubungan yang menentukan corak dan kualitas kepribadian umatnya, yaitu (1) hubungan manusia dengan penciptanya (*Habluminallah*), (2) hubungan manusia dengan manusia (*hablumminanaas*). Berhubung sebagian besar Madura pendatang tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang cukup, rata-rata hanya kelas 2 SD (Tim Peneliti FISIPOL, UNTAN, 1991), mereka tampaknya lebih menguasai pengetahuan mengenai hubungan pertama daripada kedua. Kondisi seperti ini mungkin dapat menjelaskan mengapa hubungan sosial mereka dengan anggota kelompok etnis lain kurang berjalan lancar, dan mereka kurang mampu mengadakan penyesuaian.

Tidak lancarnya hubungan sosial sebagai konsekuensi dari rendahnya pengetahuan anggota komunitas Madura mengenai hubungan antar manusia dihadapkan dengan kekecewaan dan rasa terpinggirkan yang dirasakan oleh anggota komunitas Dayak dan kedekatan hubungan mereka dengan alam dan lingkungannya, menyebabkan seakan-akan tidak ada lagi jalan rekonsiliasi antara mereka untuk mencairkan pertikaian berdarah yang pernah terjadi antara mereka sebanyak 9 (sembilan) kali sejak 1963. Fenomena sosial budaya di atas tampaknya dapat menjelaskan pola pertikaian antar anggota komunitas yang khas di Kalbar.

#### **2.4 Potensi Konflik dan Karakter Gerakan Sosial, etnis-keagamaan (socio, ethno-religio movement) pada Masyarakat Dayak dan Sistem Nilai Budaya Carok pada Masyarakat Madura.**

Reaksi terhadap tekanan dan himpitan dari luar yang berpengaruh terhadap berbagai sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat pedalaman<sup>7</sup>, khususnya masyarakat Dayak, baik berupa keterpurukan dan marginalisasi yang timbul dari dominasi dan ketidakadilan di bidang ekonomi oleh kongsi dan pengusaha Cina (seperti terjadi di Kalbar), maupun intervensi kolonialistis dan imperialistis dan penyebaran agama yang menghancurkan nilai-nilai budayasetempat yang dilakukan oleh para zending dan misionaris (seperti terjadi di Kaltim, Kalsel dan Kalteng), menimbulkan gerakan sosial yang memakan waktu ribuan tahun (*millenarian movement*). Gerakan sosial (*social movement*) atau gerakan etnis keagamaan (*ethno-religio movement*) yang jumlahnya cukup banyak itu di Pulau Kalimantan, menurut pengamatan Alqadrie (dalam Florus, dkk., 1994:18-39), pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : (1) Gerakan etnis keagamaan yang mengandung konflik fisik; (2) Gerakan etnis keagamaan yang tidak mengandung konflik fisik. ,

Dari dua bagian gerakan etnis keagamaan tersebut, Viktor King (1978) mengemukakan 3 (tiga) gerakan sosial yang sangat

---

<sup>7</sup> istilah masyarakat pedalaman di Kalimantan menunjuk pada anggota masyarakat Dayak sebagai kelompok etnis yang biasanya berlaku di Kalbar untuk hal-hal yang menyangkut ke luar (*external terminology of Dayaknese*) maupun anggota sub kelompok etnis yang menurut pembagian H.J. Malinckrodt (Dalam Lontaan, 1975:45 dan Yusnono (102-111) dalam Florus, dkk. 1994), atau dari 7 kelompok etnis (suku induk), menurut pembagian F.H. Duman (dalam Lontaan, 1975: 49-63) yang pada umumnya berlaku di Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Beberapa dari 405 suku kekeluargaan itu, seperti Kayan, Ot-Danum, Kenyah, Punan, Bukat, Murut, Iban, Taman, Ngaju, Desa dan lain sebagainya. Selain itu masyarakat pedalaman Kalimantan juga terdiri dari Melayu, khususnya di Kalbar – kelompok ini merupakan penduduk asli kedua dalam segi jumlah dan keberadaannya setelah kelompok etnis Dayak – baik sebagai kelompok etnis menurut kriteria Narroll (1964) dan Barth (1969) (lihat Bab 1 halaman 5 tulisan ini) maupun hasil pengelompokan ke dalam media identifikasi (lihat Sub Bab 2.1 dari Bab 2, hal. 5-6 tulisan ini) Selain terdiri dari berbagai sub kelompok etnis dan anak suku Dayak, masyarakat pedalaman pada tiga propinsi tersebut diatas juga meliputi antara lain kelompok etnis Banjar, Kutai, Bugis, Melayu dan Paser yang menjadi penduduk mayoritas kedua setelah sub-sub kelompok etnis Dayak di Kaltim.

terkenal yang prosesnya berlangsung lama di Kalimantan, yaitu : (a) adat *Bungan* di Kalsel, yang ditujukan kepada kekuasaan Imperialisme dan Kolonialisme Belanda; (b) *Nyuli* di Kaltim dan Kalteng, yang ditujukan baik kepada Imperialisme dan Kolonialisme Belanda maupun kepada agresivitas para penginjil dari *Zending* dan *Misionaris* Barat sebelum kemerdekaan. Sejak kemerdekaan kedua gerakan sosial etnis *millenarian* ini memiliki dan menampilkan karakter damai, lembut dan tidak bermusuhan (*peacefull, nonviolent socio-ethno movement*) terhadap siapapun dari luar; (c) *Tariu* atau Mangkok Merah di Kalbar, yang sasaran gerakannya tidak terlalu jelas. Gerakan sosial etnis ini lebih keras, dahsyat dan cenderung lebih bringas (*more violent*) dibanding dengan dua gerakan sosial lainnya.

Dari dua tipologi umum gerakan sosial atau gerakan etnis keagamaan tersebut, gerakan sosial etnis *millenarian* (c) – *Tariu* atau Mangkok Merah – di Kalbar dapat dikategorikan kedalam gerakan etnis keagamaan pertama yang mengandung konflik fisik.

Sedangkan dua gerakan sosial etnis *millenarian* (a) Adat *Bungan* dan (b) *Nyuli* masing-masing di Kalsel, dan Kaltim dan Kalteng, dapat dikategorikan ke dalam gerakan etnis keagamaan kedua yang tidak mengandung konflik fisik. Informasi dan data empiris menunjukkan bahwa pengkategorian tiga gerakan sosial etnis *millenarian* ke dalam dua tipologi umum gerakan etnis keagamaan sangat cocok/sesuai (*fit*), karena tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa telah terjadi pertikaian keras dan berdarah (*violent, bloody conflict*) di Kaltim dan Kalsel, bahkan sampai dengan tahun 1999, tidak juga telah terjadi pertikaian yang sama kerasnya di Kalteng (Petebang, 2001).

Sebaliknya, berdasarkan informasi dan catatan tertulis, Kalbar mengalami sisi gelap dan menduduki reputasi tertinggi, paling tidak di Kalimantan, dalam hal pertikaian antar komunitas, yang selama ini dikenal dengan konflik etnis. Sejak tahun 1963 di Kalbar telah terjadi pertikaian antar komunitas sebanyak 12 kali yang melibatkan anggota komunitas Cina keturunan/Tiongoa

dengan komunitas Dayak<sup>8</sup> tahun 1967; anggota komunitas Madura pedalaman dengan komunitas Dayak di kawasan tersebut antara 1963-1996/1997; anggota komunitas Madura Sambas dengan Melayu Sambas di Kabupaten Sambas tahun 1998/1999; dan anggota komunitas Madura Pontianak dengan anggota komunitas Melayu berbaaur dengan anggota kelompok etnis lainnya tahun 2000.

Tinggi dan kerasnya frekuensi maupun intensitas pertikaian antara komunitas, khususnya yang terjadi di kawasan-kawawsan pedalman di Kabupaten Pontianak, Landak, Bengkayang, Sambas dan Sanggau di propinsi ini (dengan tinggi rendahnya tingkat dan intensitas pertikaian berdasarkan urutan kabupaten) merupakan dukungan secara tidak langsung terhadap pernyataan Victor King (1975) yang menyebutkan bahwa potensi konflik fisik dari gerakan etnis dan keagamaan dalam masyarakat Dayak Kalbar jauh lebih besar, keras, dahsyat (much more violent) dibanding dengan gerakan etnis keagamaan pada tiga propinsi lainnya di Kalimantan. Potensi konflik ini menjadi riil, meledak keras dan dahsyat sampai menelan korban ratusan nyawa, ratusan juta kerugian harta benda dari kedua belah pihak dan puluhan ribu

---

<sup>8</sup> Pertikaian antara kedua komunitas ini tahun 1967 menimbulkan pengungsian besar-besarnya seluruh anggota komunitas Cina keturunan dari sebagian terbesar daerah kecamatan dan pedesaan di kawasan pedalaman kabupaten Pontianak (termasuk kawasan kabupaten Landak sekarang setelah kabupaten yang disebut pertama dimekarkan), Kabupaten Sambas (khususnya kawasan Kabupaten Bengkayang yang merupakan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Sambas), sebagian kawasan pedalaman kabupaten Sanggau, ke kota Pontianak and Singkawang selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Kasus ini tidak diakui oleh sebagian elit politik dan tokoh masyarakat Dayak di Kalbar sebagai salah satu dari 12 kasus pertikaian antar komunitas di daerah ini. Tidak ada catatan yang membuktikan bahwa telah terjadi pertikaian antar komunitas di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Tampaknya tiga kabupaten ini, diantaranya dua kabupaten yang disebut pertama, menepis anggapan budaya, khususnya dalam hubungan dengan gerakan sosial atau gerakan etnis keagamaan dan gerakan sosial etnis millenarian bahwa tidak semua kawasan pedalaman Kalbar dapat dikategorikan secara sesuai, pas (fit) ke dalam tipologi gerakan sosial keagamaan yang mengandung konflik fisik, keras, brutal dan bringas.

orang menjadi pengungsi, ketika potensi konflik, katakanlah yang ada dalam masyarakat Dayak Kalbar, yang tersimpan di dalam gerakan etnis keagamaan mereka, bersentuhan dengan sistem nilai budaya Madura, *Carok*.

Berbeda baik dengan kelompok etnis Jawa di pedalaman Pulau Jawa, kelompok masyarakat Syi'ah dan kelompok etnis Dayak, yang ketidanya memiliki unsur mesianisme di dalam budaya mereka yang masing-masing mengharapkan kehadiran Ratu Adil (Bruinessen, 1922:20), Imam Mahdi (Cole dan Nikke, 1986) dan harapan akan munculnya secara riil putera-puteri Dayak yang berpendidikan (Alqadrie, 1994b: 18-39) untuk menegakkan keadilan maupun membangun hari depan mereka secara damai, anggota komunitas Madura di Kalbar, yang datang ke daerah ini untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang melanda mereka selama di daerah asal mereka, tidak memiliki harapan eskatologis dan mesianistik (*eschatological and messianistic expectation*) semacam itu.

Kemiskinan dan keterpurukan sosial yang dialami oleh para perantau Madura yang merupakan dampak dari sistem ekonomi Kapitalisme "Banci" selama lebih dari dua dekade membuat mereka lebih realistis dan pragmatis (mengenai aspek ekonomi dari bagian ini akan didiskusikan pada Bagian/Bab 3). Kondisi dan pilihan "rasional" seperti itu mendorong mereka bekerja sangat keras dan melakukan apa saja termasuk memiliki dan menerapkan sikap dan pandangan keagamaan yang berbeda dengan sikap keagamaan orang lain. Implimentasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa bukan saja adanya kecenderungan pelanggaran adat istiadat setempat tetapi juga ketika pelanggaran dilakukan, baik yang bertentangan dengan hukum positif dengan adat istiadat atau hukum adat setempat dan dengan norma-norma kesusilaan, maupun dengan norma atau ajaran agama yang mereka yakini dengan teguh, mereka mengatakan bahwa kebaikan (pahala/ibadah yang mereka lakukan) dengan pelanggaran/dosa yang mereka perbuat akan

“ditimbang” tuhan, kalau timbangan pada hal pertama (kebaikan/pahala) lebih berat daripada hal kedua (pelanggaran/dosa), maka ia akan “masuk” surga, begitu pula bila sebaliknya. Jadi sebagian perantau Madura dari kelompok kelas bawah ini memiliki sikap keagamaa yang “boleh” saja melakukan pelanggaran sosial (norma hukum, susila dan adat), karena Tuhan akan memutuskan apakah ia bersalah atau tidak.

Sikap keagamaan seperti ini tampaknya lebih dilandasi oleh ketidakseimbangan penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh sebagian anggota komunitas Madura kelompok bawah baik di kawasan pedalaman Kalbar maupun di kabupaten Sambas tentang substansi hubungan dalam ajaran Islam antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia sebagaimana telah sedikit didiskusikan sebelumnya (lihat bagian 2.3, hal. 12). Mereka sangat bangga menjadi Muslim, teguh dalam melaksanakan ajaran Islam, khususnya sangat menguasai pengetahuan agama tentang prinsip hubungan antara manusia dengan Pencipta (ibadah dalam arti sempit), tetapi ada kesan mendalam bahwa mereka sangat kurang, bahkan tampaknya mengenyampingkan tentang prinsip hubungan antar manusia yaitu mengenai apa yang perlu dilakukan dan yang tidak harus dilakukan dalam hubungan mereka dengan orang lain menurut ajaran Islam.

Konsekuensi dari pemahaman yang tidak seimbang tentang substansi kedua hubungan tersebut, tidak saja adanya kesan bahwa hubungan sosial mereka dengan kelompok komunitas, kelompok etnis di sekitar mereka dan dengan penduduk setempat dimana mereka sebagai pendatang, tidak akrab dan harmonis maupun sering terjadi pergesekan dan benturan-benturan, tetapi juga adanya ketidak amanan dalam bertetangga, ketidak jelasan mengenai baik hak dan kewajiban maupun hak milik warga setempat yang berkaitan dengan penyewaan dan peminjaman tanah/kebun, halaman, ternak, buah-buahan, dan lain sebagainya. Perbenturan cenderung juga terjadi dalam hal kompetisi sosial ekonomi (yang akan didiskusikan pada

bagian 3 mengenai faktor ekonomi (yang akan didiskusikan pada bagian 3 mengenai faktor ekonomi) maupun melakukan kompromi atas perselisihan atau ketidaksepakatan yang sering mereka menangkan atas warga setempat (anggota komunitas Dayak pedalaman dan Melayu Sambas) melalui .....

Akan tetapi, walaupun karakter budaya dari anggota kedua kelompok etnis ini relatif sama, frekuensi pertikaian, khususnya pertikaian komunal, antara anggota komunitas Bugis dengan anggota kelompok etnis lain di Kalbar sangat rendah, bahkan tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan peristiwa tersebut telah terjadi sebagaimana itu terjadi antara anggota komunitas Dayak dengan Madura.

Hasil pengamatan saya sementara menunjukkan bahwa perbedaan pada frekuensi pertikaian antara anggota komunitas Bugis dengan Madura kelihatannya terletak pada ada atau tidaknya faktor/kekuatan penyeimbang yang ada dan melekat di dalam diri mereka dalam kaitannya dengan bekerjanya sistem nilai budaya mereka masing-masing, *siri* dan *carok*, sehingga orientasi mereka tidak hanya diarahkan terhadap diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tetapi juga berorientasi pada orang lain.

Faktor penyeimbang itu ternyata ada dan terdapat di dalam diri pribadi orang-orang Bugis yang konsisten dengan sistem nilai budaya mereka, yaitu *pesse esse babua*. Bagian dari sistem nilai budaya ini tampaknya mampu menciptakan keseimbangan terhadap bekerjanya *siri' ripakasiri*, sehingga ada keseimbangan kepribadian, yaitu ketika mereka tidak mau dipermalukan atau dihancurkan harga diri mereka oleh orang lain, maka mereka juga tidak akan mau memermalukan dan menghancurkan harga diri orang lain. Faktor penyeimbang seperti itu juga memang ada pada masyarakat berbudaya Madura, tetapi justru ia terdapat dan dapat ditemui di luar diri pribadi orang-orang Madura. Faktor penyeimbang itu adalah *Kyai* dan *Habib* (Alqdrrie, dalam Antropologi Indonesia, 1999b: 36-57; 1999c).

Walaupun peranan kyai dalam menyampaikan ceramah /pendidikan agama Islam kepada murid-muridnya, sebagaimana dikemukakan oleh Nagian Imawan (dalam Petebang dan Sutrisno, 2000: 33-37), hanya sebesar 20%, tetapi Kyai merupakan figur sentral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang Madura. Akan tetapi Kyai yang menyertai mereka adalah Kyai yang berwawasan rendah, pendidikan pesantren yang hanya mempelajari Kitab Kuning<sup>5</sup> atau tidak selesai pendidikan SLTP umum, bahkan ada diantara mereka yang tidak dapat membaca huruf latin. Dengan kualifikasi seperti itu, pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia diperkirakan tidak lebih tinggi daripada pemahaman orang biasa. Kondisi kekayaan ini tampaknya merupakan salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya intensitas dan frekuensi pertikaian anggota komunitas Madura dengan anggota komunitas lainnya di Kalbar, khususnya dengan komunitas Dayak di pedalaman.

Habib bukanlah fenomena yang asing di negeri ini, khususnya di Kalbar. Sebagai anggota kelompok masyarakat yang dianggap sebagai baik penyeimbang maupun keturunan Nabi, mereka sangat dihormati, dihargai dan dijadikan oleh anggota komunitas Madura sebagai guru, tokoh masyarakat, pribadi yang diteladani, dan lain sebagainya. Peranan yang dimainkan oleh *Habib* sangat menentukan dalam membina dan “menenangkan” anggota komunitas Madura, khususnya dalam

---

<sup>5</sup> Ada banyaknya pesantren yang bertaraf nasional dan internasional di Jawa Timur yang menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menyeimbangkan antara pendidikan agama itu sendiri dengan pendidikan non-agama (pendidikan umum). Mereka menggunakan kurikulum nasional dan yang alumni mereka mampu bersaing dengan lulusan pendidikan umum dan agama baik dari dalam dan luar negeri, seperti misalnya Pesantren Gontor, Daarunnajah, Darul Ma'rifat, Darul Muttaqin, dan lain sebagainya. Akan tetapi para Kyai yang mereka bawa bukan dari pesantren tersebut, melainkan dari pesantren “*Salafiah*” yang hanya mempelajari ilmu agama saja (hubungan mahluk dengan Tuhan dan tidak berorientasi pada perkembangan zaman) atau berasal dari kampung mereka sendiri.

menetralisir apa yang disebut oleh latief Wiyata (2002) sebagai sisi gelap dari *carok*. Besar kecilnya frekuensi dan intensitas pertikaian tampaknya dipengaruhi pula oleh peranan yang telah dimainkan oleh sang *Habib*. Namun tidak semua kawasan di Kalbar memiliki dinasti kehabiban sehingga peranan mereka dapat dimainkan dan berjalan dengan efektif.

Pengamatan saya tentang fenomena ini mengasilkan suatu hipotesis bahwa **“semakin dinasti kehabiban tumbuh dengan suburnya dan habib dapat berfungsi dengan baik di suatu kawasan, semakin pertikaian yang melibatkan anggota komunitas Madura jarang terjadi”**. Data empiris dan catatan tertulis (Kapolres Sambas, 1990; Camat Kabupaten Sambas, 1999) menunjukkan bahwa dari 12 kali pertikaian secara fisik keras, berdarah (*physically violent, bloody conflict*) sejak 1963, sepuluh kali diantaranya terjadi antara anggota komunitas Madura kabupaten pedalaman dan Kabupaten Sambas disatu pihak dengan anggota komunitas Melayu Sambas dan Komunitas Dayak Pedalaman dilain pihak. Pertikaian itu justru terjadi di kawasan-kawasan yang tidak memiliki tradisi kehabiban dan kalaupun ada sejumlah habib di situ, mereka tidak berfungsi sebagai pembina dan penyeimbang bekerjanya sistem nilai budaya *carok*, seperti misalnya di berbagai kawasan pedalaman (Kabupaten Landak; Bengkayang); hampir keseluruhan kawasan Kabupaten Sambas; dan sejumlah kawasan pedalaman Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Sintang. Akan tetapi, pertikaian yang berarti atara kelompok komunitas tidak pernah sama sekali terjadi di Kabupaten Ketapang, seluruh kawasan pesisir Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak (terjadi hanya satu kali yang berlangsung hanya tiga hari), dan kabupaten Kapuas Hulu, karena di kawasan ini traisi kehabisan yumbuh dengan suburnya dan mereka memainkan peranan yang sangat berarti dalam “menjinakkan” sistem budaya *carok*.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa sistem nilai budaya *corak*, kualitas kekayaan, tampilnya tradisi kehabisan, dan

peranan yang dimainkan oleh para Habib dalam membina anggota komunitas Madura dimana mereka berada dan menralisasikan dan menciptakan keseimbangan dalam proses bekerjanya sistem nilai *carok*, mempengaruhi dan membentuk pola pertikaian khas di Kalbar. Pengaruh ini menjadi sangat berarti dan menentukan ketika faktor-faktor sosial budaya diatas berhadapan dan bersinggungan denga gerakan sosial etnis keagamaan dalam komunitas Dayak Kalbar di pedalaman dekat yang mengandung potensi konflik dan kekerasan.

## **2.5 Faktor Kepemimpinan dan Daya Kepengikutan**

Sebelum tahun 1970-an kepemimpinan tokoh masyarakat, pemuka adat, orang-orang yang dituakan dan pemuka agama masih sangat berpengaruh dalam masyarakat Dayak. Peranan dan kewibawaan mereka terhadap masyarakat cukup besar dan daya kepengikutan masyrakat terhadap mereka cukup tinggi. Sehingga berbagai maslah sosial dan kesulitan hidup dimusyawarahkan oleh mereka dengan tokoh masyarakat tersebut untuk diperoleh jalan keluar. Sejak akhir 1970, terutama ketika sumberdaya hutan (SDH) di Kalbar mulai mengalami kehancuran (*deforestation process*), oposisi terhadap sumber kehancuran itu mulai timbul (Alqadrie, 1994a) diikuti secara perlahan dan pasti oleh menurunnya kewibawaan, ke[percayaan dan peranan tokoh atau pemuka adat dalam masyarakat mereka.

Krisis kepercayaan terhadap adat pada umumnya dan terhadap pemuka adat pada khususnya mencapai klimaksnya dan terlihat jelas ketika dalam pertikaian antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas Madura pedalaman yang terjadi tahun 1996/1997 pada peristiwa atau kasus Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang (setelah pisah dari Kabupaten Sambas) dan Kasus Salatiga, Kabupaten Landak (setelah Kabupaten Pontianak dimekarkan), sebagian besar pemuda dan mahasiswa Dayak menendang tempayan (simbol upacara adat dalam masyarakat

Dayak) dan tidak mau lagi mendengarkan himbuan tokoh adat mereka maupun pemuka agama Nasrani (Katolik dan Protestan) untuk tidak bertindak anarkis. Para pemuda ini menganggap bahwa pemuka adat mereka tidak lagi mampu melindungi dan membina mereka.

Dalam kondisi ketidakpastian seperti itu tampillah elit-elit sosial dan politik mereka yang timbul di permukaan melalui jalur baik LSM maupun lembaga Eksekutif dan Legislatif yang memberikan harapan –harapan ekonomis dan politis secara rasional. Kepemimpinan sosial dalam masyarakat Dayak mengalami perubahan mendasar dari kepemimpinan yang dilandasi oleh pilar tradisional adat ke kepemimpinan rasional birokratis politis yang bertumpuh pada tiga pilar yaitu eksekutif, legislatif dan LSM. Kebringasan dan kebrutalan massa bukan tidak boleh jadi disebabkan pula oleh perubahan karakter kepemimpinan dari bentuk kepemimpinan disebut pertama yang tidak memiliki ambisi politis sama sekali, ke bentuk kedua yang tidak sepi dari motif, obsesi dan ambisi yang kompleks – politik ekonomi dan kemegahan.

Pola pertikaian yang bernuansa kebringasan dan kekerasan tampaknya lebih ajek timbul dipermukaan setelah perubahan kepemimpinan dalam komunitas Dayak di pedalaman bersentuhan dengan pola kepemimpinan dan daya kepengikutan khas dalam komunitas Madura di pedalaman Kalbar.

Pola kepemimpinan sosial dalam masyarakat Madura tidak banyak mengalami perubahan yaitu tetap mengarah pada bentuk kepemimpinan kharismatis dengan daya kepengikutan lebih besar pada tokoh agama dan Habib. Akan tetapi daya kepengikutan mereka mengalami perkembangan ke arah tokoh masyarakat yang memiliki kepemimpinan rasional yang bergerak dalam bisnis. Daya kepengikutan pertama diharapkan dapat mengisi ruang kejiwaan dan moril. Sedangkan daya kepengikutan kedua dipandang sebagai jalur penghubung dan penampung bagi perkembangan usaha ekonomi kecil mereka. Kekurangmampuan

pemuka agama atau kyai mereka bagi pemahaman terhadap hubungan sosial yang manusiawi dengan anggota komunitas lainnya ditambah lagi dengan ketidakpekaan sosial dan kegersangan dalam nuansa rohani maupun mental dari kepemimpinan rasional bisnis mereka, ternyata menyeret mereka pada usaha memperoleh dan menguasai jalur pemasaran yang menggebu-gebu tanpa instropeksi apakah usaha tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar adat, kebiasaan dan istiadat penduduk setempat. Kondisi seperti ini telah melahirkan pola pertikaian khas yang keras dan menghancurkan seperti yang diperlihatkan pada kasus-kasus pertikaian di daerah ini sebelumnya.

### **3. Faktor Sosial Ekonomi**

Faktor ketiga dari sisi komunitas masyarakat pedalaman dan perhuluan (Dayak dan Melayu) meliputi keterdesakan anggota komunitas ini dalam mata pencaharian dan lapangan kerja. Keterdesakan dalam mata pencaharian dan lapangan kerja. Keterdesakan dalam pencaharian antara lain meliputi : (1) pengalihan hak atas tanah (yang biasa mereka sebut dengan pengambilalihan hak atas tanah) untuk lahan perusahaan HPH, lahan perkebunan kelapa sawit dan lainnya, dan lahan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) baik dengan pembayaran ganti rugi yang sangat kecil maupun bahkan dengan tanpa ganti rugi; (2) pengoperasian/pengeksplotasian hutan secara besar-besaran dengan menggunakan alat –alat besar dan teknologi canggih; dan (3) pengalihan fungsi lahan atau areal hutan secara spihak melalui kebijakan atas-bawah (*top-down policy*) dari Hutan Kerakyatan/Masyarakat yang dilandasi oleh hukum adat dan telah berjalan ratusan tahun atau Hutan Produksi

Biasa ke Hutan Lindung (HL) atau Taman Nasional (TN) (Tim Peneliti CIFOR Kalbar 2001)<sup>6</sup>.

Tiga faktor keterdesakan itu tampaknya sangat menyakiti dan mengecewakan masyarakat pedalaman, khususnya komunitas Dayak di kawasan-kawasan tersebut. Hal ini dapat dimengerti, karena lahan-lahan hutan, kebun rakyat, pemukiman dan tanah milik adat dan tanah negara di daerah ini yang telah berpindah tangan dan dimiliki oleh Perusahaan HPH sangat luas yaitu sekitar 74,32% dan 46,6% dari masing-masing luas areal kawasan hutan dan luas seluruh wilayah Kalbar telah dikuasai oleh atau menjadi areal perusahaan HPH (Bappeda dan Kantor Statistik Pro. Kalbar, 1990; Alqadrie, 1994a: 30). Oleh karena baik menyempitnya areal hutan yang mengurangi lapangan kerja di sektor kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan menyempitnya "dunia" mereka maupun proses kehancuran hutan yang berdampak negatif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat setempat, tampaknya telah mengurangi penghasilan riil masyarakat setempat secara keseluruhan sebesar 33,3% dari penghasilan sebelumnya yang terdiri dari 20% dari sub sektor kehutanan dan 13% sisanya dari sub sektor pertanian

---

<sup>6</sup> Pada dasarnya masyarakat Kalbar pada umumnya dan masyarakat pedalaman dan perhuluan pada khususnya, lebih khusus lagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan, tidak berkeberatan pemerintah menetapkan lahan hutan yang menjadi tumpuan harapan hidup mereka sehari-hari untuk dijadikan /diubah statusnya menjadi HL atau TN. Mereka hanya menginginkan kebijakan pemindahan dan pengalihan fungsi hutan itu dirumuskan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat melalui pemerintahan daerah Kabupaten dan kecamatan dan beserta tokoh masyarakatnya masing-masing. Setelah itu, aparat Pemd Kabupatn dan Kecamatan mengadakan sosialisasi kepada anggota masyarakat kecamatan dan masyarakat setempat di sekitar hutan denga biaya dari Pempus. Penglolaan, Pengawasan dan pengamanan terhadap HL dan TN tidak hanya dilaksanakan oleh Pempus tetapi juga hendaknya menyertakan Pemd Kabupatn dan Kecamatan dimana HL dan TN itu berada secara aktif dan bertanggungjawab. Keberadaan instansi/lembaga pegawai tersebut hendaknya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dari pimpinan tingkat menengah ke bawah sampai karyawan pelaksana.

ladang dan perkebunan rakyat yang ditanam di sekitar hutan (Alqadrie, 1990; 1994: 29-30).

Keterdesakan dalam mata pencaharian dan lapangan kerja yang berujung pada berkurangnya pengahsilan masyarakat pedalaman tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga menyebabkan mereka, khususnya anggota komunitas Dayak di pedalaman kehilangan identitas mereka (Alqadrie, 2001:15). Ini pada akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kebencian mereka terhadap Pemerintah Pusat (Pempus). Kalau kebencian dan kekecewaan seperti ini di Aceh berpindah ke anggota komunitas Jawa yang dianggap merupakan personifikasi dari kebudayaan kesultanan Jawa. Di kawasan-kawasan dari beberapa kecamatan dan kabupaten pedalaman dan Kabupaten Sambas, Kalbar, kebencian itu, berdasarkan pengamatan Syarif I. Alqadrie (2001:15) bukan dipindahkan atau digantikan (*substituted /transferred*) kepada anggota komunitas Jawa dan Sunda, tetapi justru kepada sebagian anggota komunitas Madura. Hal ini disebabkan , mereka, sebagaimana dipahami oleh beberapa pihak, tidak saja merasa sangat hebat, unggul, kuat dan berani (*superior*) di bidang budaya (*cultural arrogance*) tetapi juga sangat agresif di bidang ekonomi.

Kompetisi yang kurang adil dalam kegiatan ekonomi seperti pengambilalihan dan pemindahan secara perlahan-lahan lapangan kerja maupun asset ekonomi dari tangan atau milik anggota komunitas Dayak di kawasan pedalaman dan Melayu di berbagai kecamatan di Kabupaten sambas, ketidaksegaran beberapa oknum anggota komunitas Madura untuk menganggap ternak dan hasil tanaman milik orang lain sebagai milik mereka sendiri, ditambah lagi kurang membaurnya mereka dengan anggota komunitas setempat dalam satu pemukiman, tampaknya mempersulit bagi terciptanya hubungan sosial yang serasi antara mereka. Superioritas dan agresivitas semacam itu yang sedikit banyaknya diwarnai oleh sistem nilai budaya *carok*, tampaknya sangat membekas di hati para anggota komunitas Dayak dan

Melayu Kalbar. Faktor ini tampaknya telah mempengaruhi dan mewarnai pola pertikaian khas Kalbar.

#### **4. Faktor Sosial Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Faktor politik yang dibahas pada bagian ini berkenaan dengan pemerintahan dan otonomi daerah. Ketidakjelasan otonomi daerah di Kalbar, dibanding dengan daerah lain seperti antara lain Sumatera Barat, Jawa Barat, apalagi Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali, merupakan masalah yang berkepanjangan, dan ini antara lain disebabkan tidak hanya oleh kekhawatiran Pempus akan kehilangan penghasilan (*income*) sangat berarti dari “kebebasan” yang diberikannya kepada daerah Kalbar yang cukup kaya dan potensil dalam segi SDA, tetapi juga oleh sangat kurangnya, kalau boleh disebut, tidak adanya, perhatian yang diberikan Pempus kepada daerah ini. Hal kedua ini merupakan akiba dari fakta bahwa ada kesan tidak banyak orang Kalbar yang berada di Jakarta yang bersedia menjadi pelobi-pelobi (*lobbyists*) “ulung” untuk memperjuangkan kepentingan Kalbar di Pempus.

Ketidakjelasan dan kengganannya Pempus memberikan otonomi daerah yang luas dan riil kepada daerah Kalbar sampai dengan keluarnya UU No. 22/1999 dan UU No. 21/1999 menimbulkan konsekuensi logis bagi daerah ini sebagai berikut:

- (1) hubungan pusat dan daerah dilaksanakan sangat sentralistis
- (2) pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop (*dropped*) dari/oleh Pempus;
- (3) timbulnya dan meningkatnya kemiskinan struktural.

Sampai dengan keluarnya dua UU diatas, ada kesan desentralisasi masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan sentralisme untuk hal-hal yang sebenarnya tidak lagi perlu dilaksanakan oleh Pempus dalam era otonomi daerah (Otda),

seperti misalnya antara lain urusan kehutanan, perdagangan lintas batas dan urusan pos lintas batas (PLB), dan urusan tenaga kerja Indonesia (TKI) (Tim Peneliti Program S2 IIS, UNTAN, 2001), masih tetap dipraktikkan. Hal ini tentu saja merugikan daerah Kalbar, khususnya masyarakat pedalaman yang bermukim tidak jauh dari kawasan perbatasan. Konsekuensi pertama ini merupakan perwujudan dari keseganan Pempus menyerahkan Otda khususnya kepada daerah-daerah yang tidak memiliki putra-putera terbaik mereka di Departemen-Departemen atau instansi pusat.

Dalam era reformasi, Otda sebenarnya merupakan kesempatan emas khususnya bagi rakyat di daerah yang kaya akan SDA untuk memperoleh kesejahteraan secara maksimal. Tetapi kesempatan emas seperti itu belum juga terealisasi, karena kedua UU tersebut mengandung sejumlah distorsi yang melahirkan perbedaan filosofis tersebut melahirkan paling tidak dua cara pandang alternatif terhadap Otda, yaitu : (a) Otda sebagai otonomi masyarakat daerah dan bukan hanya sekedar otonomi Pemda; (b) Otda sebagai hak daerah yang sudah ada secara tradisional pada masyarakat setempat, dan bukan sebagai hal baru yang merupakan belas kasihan Pusat dan kewajiban daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang pertama adalah bahwa kebijakan Otda harusnya ditujukan pada **pemberdayaan** dan **kesejahteraan** masyarakat setempat di daerah, dan bukan hanya Otda Pemda sehingga hanya dinikmati oleh para elit-elit politik daerah di jajaran Pemda, Kepala daerah dengan segala aparaturnya maupun di DPRD. Konsekuensi logis dari cara pandang kedua adalah bahwa Otda sebagai hak tradisional masyarakat **tidak dapat dicabut** oleh Pempus. Kewenangan Pusat hanya terbatas pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada pada daerah melalui berbagai kebijakan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagaimana kenyataan Otda dan pelaksanaannya di Kalbar? Dari segi pelaksanaan Otda saja, sebenarnya telah terjadi konflik antara Pempus dan daerah dalam hal ini Pemda dan masyarakatnya selama Republik Indonesia berjalan, khusus dalam tiga dekade Pemerintah ORBA. Menurut hemat saya, salah satu faktor utama (*main causing factor*) yang menimbulkan pertikaian berlarut di Kalbar adalah ketidaksesuaian atau pertikaian pusat – Daerah mengenai hak-hak otonomi masyarakat daerah dan hak-hak tradisional masyarakat daerah yang keduanya merupakan hak asasi mereka. Konflik ini menjalar terus sampai ke bawah.

Konsekuensi lebih lanjut dari perbedaan tersebut adalah jangankan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat daerah dilaksanakan dan diprioritaskan, bahkan hak-hak tradisional mereka di daerah dikesampingkan oleh Pempus dan Pemda. Eksekutif menjadi lebih dominan daripada Legislatif pada era ORBA, sebaliknya Legislatif mendominasi Eksekutif pada era Reformasi dan pusat masih mendominasi daerah. Dominasi Pempus terhadap daerah dan masyarakat lebih tampak jelas terhadap daerah-daerah yang “sabar”, “lembut”, menjadi “anak baik”, tidak pernah “berkeinginan berontak,” dan tidak memiliki “wakil” di kabinet<sup>7</sup>, Seperti Kalbar ini.

Puncak dari ketidakpedulian dan dominasi Pusat terhadap hak-hak masyarakat daerah dapat dilihat paling tidak dari dua hal : (1) Pejabat-pejabat yang akan duduk pada jabatan-jabatan teras dan strategis, seperti Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Propinsi (bahkan Kanwil ketika UU No. 22/1999 belum diundangkan) dan Kepala Dinas Kabupaten, dikirim/didrop dari Pusat. Setelah J.C.

---

<sup>7</sup> Kalbar sebenarnya sangat beruntung memiliki Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Sebenarnya ia seyogyanya telah banyak memperjuangkan dan membangun daerahnya Kalbar, tetapi sejak menjadi anggota DPR RI wakil rakyat Kalbar sampai ia pindah mewakili rakyat Jakarta dan sampai sekarang menjadi RI 2, tampaknya ia belum sempat berbuat banyak. Untuk beraudiensi dengan para akademisi daerahnya untuk berdiskusi bagaimana memperkecil ketinggalan dari Sarawak, ia tidak tertarik.

Oevang Oeray, putera Dayak Kalbar, menjadi Gubernur Kalbar periode 1967-1972, tidak seorangpun Gubernur Kalbar berasal dari Putera Daerah Kalbar (Alqadrie, 202a:25)<sup>8</sup>. Sampai sekarang Gubernur daerah ini dijabat oleh mereka yang belum dapat dikategorikan sebagai Putra Daerah. Jabatan lain yang masih dijabat oleh bukan Putera Daerah sejak masa ORLA, diteruskan ke ORBA sampai sekarang ini adalah Kepala Dinas (Kadis) adalah Kadis Kesehatan, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kadis Perkebunan, Kadis perkebunan, Kadis Kehutanan, seluruh Direksi dan Kepala-kepala Bagian pada PT Perkebunan Nasional (PTPN XIII) dan lain sebagainya. (2) Hancurnya SDA dan lingkungan sebagai akibat dari kurangnya komitmen dan rasa memiliki dari para pejabat yang didrop dari Pusat itu. Kedua hal negarif yang merupakan wujud dari ketidakpedulian Pusat sangat menyakiti hari masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat setempat dimana lingkungan itu hancur. Ketidakpastian untuk memiliki kembali Gubernur dan pejabat teras dan strategis dari kalangan sendiri tampaknya juga bertanggungjawab terhadap meledaknya potensi konflik yang ada dalam masyarakat.

Sentralisme yang berlebihan dapat pula menimbulkan kemiskina struktural bagi daerah dimana sentralisme itu dipraktekkan. Walaupun Kalbar tergolong daerah yang tidak terlalu miskin dibanding dengan daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, NTT, tetapi pada tahun 1990-an, daerah ini pernah menduduki kedudukan ketiga baik sebagai penduduk miskin (55,09%) setelah Sultra (58,30%) dan Timtim (82,13%) (pada saat itu) maupun sebagai jumlah desa miskin (27,60%) setelah Maluku

---

<sup>8</sup> Konsep Putra Daerah yang belum memiliki istilah baku, sedang disosialisasikan agar dapat diterima secara nasional. Konsep ini menunjuk pada tiga kriteria: (1) Berdasarkan darah dari garis lurus ayah, seperti Putera Dayak dan Melayu; (2) Berdasarkan kelahiran dan loyal terhadap daerah tersebut. Contoh : termasuk kategori ini adalah siapa saja, termasuk orang-orang Tionghoa, yang lahir di daerah itu, dikategorikan sebagai Putra Daerah; (3) Berdasarkan lamanya berdomisili disuatu tempat palig kurang satu generasi (25 tahun) dan terus berada di daerah itu serta loyal. Mereka dengan kriteria ini dikategorikan sebagai Putra Daerah.

(29,27%) dan Timtim (42,84%) (Alqadrie, 1993: 6-8). Kedudukan sebagai termiskin ketiga di Indonesia pada masa itu ternyata merupakan dampak dari tidak adanya Otda yaitu ketidakberdayaan Pemda dan masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengolah SDA maupun mengolah keuntungan daerah. Ini terbukti Kalbar menyettor penghasilan daerah yang bersumber dari SDA ke Pusat nomor 5 dari atas secara nasional, tetapi setelah dikembalikan lagi ke daerah dan menerima daslam bentuk APBD, Kalbar menerima dalam urutan nomor 3 dari bawah.

Rendahnya APBD yang diterima dari Pusat dibanding dengan penghasilan dari daerah sendiri, menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat kecil, khususnya masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman dan perhuluan jauh dari kota-kota besar. Kondisi ini dirasakan langsung atau tidak langsung oleh anggota komunitas Dayak dan Melayu di kawasan pedalaman yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kebencian kepada Pempus.

Berbeda dengan anggota komunitas Dayak, anggota komunitas Madura Pedalaman hampir tidak merasakan hantaman sebagai akibat baik dari ketiadaan Otda maupun dari krisis ekonomi dan politik, karena mereka adalah pekerja keras, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia menerima upah rendah, dan hemat. Dalam krisis ekonomi dan politik, taraf ekonomi mereka tetap mengalami peningkatan secara perlahan-lahan dan pasti. Dalam segi politik, anggota komunitas Madura di Kalbar pada umumnya dan dikawasan pedalaman pada khususnya memiliki afiliasi politik tunggal dan konsisten, yaitu pada partai Islamyaitu PKB atau PPP. Afiliasi politik semacam ini dianggap oleh sejumlah elit politik komunitas Dayak sebagai penghalang dan ancaman terhadap ambisi politik mereka maupun keinginan mereka untuk mendorong tokoh Dayak untuk menjadi Gubernur dan Bupati maupun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis disitu.

Perubahan daya kepengikutan pada masyarakat Dayak dari tokoh adat ke elit, politik dan ketergantungan mereka

terhadap elit politik mereka, ditambah dengan kepentingan maupun ambisi politik jangka pendek dari para elit politik tersebut mendorong timbulnya perbenturan dengan anggota komunitas Madura dari kawasan pedalaman ke kawasan-kawasan sekitar perkotaan yang berarti mengurangi wakil mereka di lembaga legislatif baik pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat propinsi diperkirakan mampu memperlancar strategi politik jangka panjang mereka dengan memenangkan calon mereka melalui pemilihan yang demokratis. Strategi ini tampaknya bertanggung jawab terhadap terciptanya Pola pertikaian khusus di Kalbar.

## **6. Kesimpulan dan Penutup.**

Pola pertikaian etnis di Kalimantan Barat (Kalbar) berbeda dengan pola yang terjadi di propinsi lainnya maupun di Kalimantan. Pola pertikaian di propinsi ini tampil dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, berlangsung 12 kali sejak 1963, menimbulkan korban nyawa dan harta benda relatif besar dan melibatkan tiga kelompok etnis, Madura vs Dayak – sebanyak 10 kali – dan Madura vs Melayu – sebanyak 2 kali. Pertikaian di daerah ini tampaknya lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi dan faktor politik. Faktor sosial budaya antara lain meliputi media identifikasi (*media of ethnic identification*), identifikasi etnis-keagamaan (*ethnic-religio identification*), karakter gerakan sosial, hubungan antara sikap keagamaan tertentu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Dayak dan Madura dengan pandangan terhadap eksistensi sumber daya alam dan terhadap martabat manusia, kesenjangan antara sistem nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat, maupun pola kepemimpinan dan daya kepengikutan. Faktor ekonomi meliputi kompetisi ekonomi yang tidak adil dalam memperebutkan lapangan kerja dan asset ekonomi. Sedangkan faktor politik mencakup afiliasi politik yang berkaitan dengan ambisi politik dari

elit-elit politik yang ingin memperoleh kedudukan atau jabatan-jabatan politik dan strategis dalam berbagai sektor.

Melayu merupakan media identifikasi bagi anggota kelompok etnis bukan Islam, termasuk Dayak, yang masuk/menganut agama Islam. Mereka yang masuk Islam diidentifikasi dan mengidentifikasi diri mereka sebagai "Melayu". Faktor ini menyebabkan timbulnya rasa keterisolasian dan tertinggalkan khususnya bagi orang-orang Dayak yang merasa tidak saja ditinggalkan oleh saudara mereka yang telah "menjadi Melayu", tetapi juga membuat mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan. Ini tanpaknya merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya kesetiakawanan dan kesadaran etnis maupun adanya perubahan dalam identifikasi keagamaan dalam masyarakat Dayak.

Identifikasi keagamaan (*religio identification*) masyarakat Dayak sejak pertengahan 1970 telah mengalami perubahan dari masyarakat adat ke masyarakat yang beragama Kristen (Christenuty), sedangkan identifikasi etnis masyarakat Dayak mengarah pada kelompok etnis, bukan pada sub kelompok etnis, sebagaimana itu terjadi di Kaltim, Kalsel dan Kalteng. Di Kalbar, masyarakat Dayak lebih dikenal dengan Dayak sebagai satu kelompok etnis. Identifikasi seperti ini mengakibatkan kesetiakawanan etnis masyarakat Dayak lebih terpusat dan lebih kuat, tidak terpecah, dan kesadaran etnis mereka cenderung lebih meningkat dibanding dengan identifikasi atas dasar sub kelompok etnis. Dengan demikian, setiap tindakan yang dianggap baik merusak tatanan adat dan lingkungan atau sumber alam, amapun menyerang secara fisik, dipahami sebagai serangan secara kolektif terhadap eksistensi kelompok etnis.

Berbeda dengan gerakan sosial tradisional (*millenarian social movement*) di Kaltim dan Kalteng – *nyuli* – dan di Kalsel – *Adat Bungan* – yang pada masa Kolonialisme diarahkan untuk melawan penjajah dan sekarang tidak lagi keras dan berdasrah (*un-blooding, non violent traditional movement*), karena ia

diarahkan pada perlawanan terhadap kekuasaan Kolonialisme Belanda, gerakan sosial tradisional dalam masyarakat Dayak di Kalbar – *tariu* atau **Mangkok Merah** – cenderung lebih keras dan berdarah (*blooding, violent traditional movement*), karena gerakan ini dianggap sebagai media dan mekanisme pertahanan diri kelompok secara kolektif dan perlahan terhadap “lawan” yang bermaksud mengganggu eksistensi kelompok, Faktor budaya ini tampaknya lebih dijiwai oleh nilai budaya mengayau yang secara fisik.

Berbeda dengan ajaran Protestan, Katolik yang dianut oleh mayoritas anggota masyarakat Dayak, memiliki kecenderungan untuk “membangkitkan” agama yaitu memberikan ruangan sosial, budaya dan psikologis sangat luas bagi penganutnya untuk mempertahankan kelestarian tidak hanya adat, istiadat, tradisi dan kebiasaan tradisional mereka, tetapi juga sumberdaya alam (SDA). Persepsi tentang terganggunya baik eksistensi nilai-nilai budaya dan tradisi maupun SDA disekitar mereka, menimbulkan kekecewaan mereka yang sangat mendalam terhadap Pemerintah Pusat.

Kompetisi dalam bidang ekonomi dan karakter individu dalam kelompok yang merasa superior dan dirasakan menyimpang dari norma yang ada, sebaliknya kurang pada kecemburuan dan kesenjangan sosial, kelihatannya juga merupakan faktor yang bertanggungjawab terhadap tampilnya pola konflik yang khas di Kalbar. Pengambilalihan dan perpindahan secara perlahan-lahan lapangan kerja maupun asset ekonomi dari tangan atau milik anggota beberapa kelompok etnis lain kepada anggota satu kelompok etnis pendatang, tampaknya cenderung menjadi sumber penggerak terciptanya pola pertikaian khas Kalbar.

Dari pihak lain terhadap siapa pertikaian itu sering terjadi, sebagian dari anggota komunitas Madura pendatang baru cenderung masih mempertahankan nilai budaya *carok* dengan mempraktekannya secara kaku tanpa menyesuainya dengan

kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesenjangan dalam mempraktekannya ajaran agama dalam kehidupan sosial, khususnya dengan kelompok etnis lain, yaitu hubungan antar manusia (*hablumminannaas*) tampaknya bertanggungjawab terhadap pola konflik khas di Kalbar.

Keinginan secara cepat untuk menduduki jabatan atau kedudukan dalam bidang politik dan kedudukan strategis lainnya mendorong elit politik untuk memanfaatkan tidak saja psikologi massa yang merasa dirugikan dengan aplikasi yang kaku dari nilai budaya maupun kesenjangan dalam mempraktekan doktrin hubungan dalam ajaran agama, tetapi juga membendung afiliasi politik dari anggota kelompok etnis tertentu yang dianggap akan menghambat ambisi politik kelompok etnis lain.

Semua faktor diatas, baik sosial, budaya, ekonomi dan politik tampaknya bertanggungjawab terhadap kecenderungan terbentuknya pola konflik yang khas di Kalbar yang berbeda dengan pola konflik di daerah lain.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Andi Zainal. 1983. ***Persepsi Orang Bugis – Makasar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar.*** Bandung : Alumni.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1987. ***Cultural Differences and Social Life Among Three Ethnic Groups in West Kalimantan.*** Tesis Master (M.Sc.). Lexington, KY.: Department of Rural and Agricultural Sociology, College of Agriculture, University of Lexington.
- 1989. ***Ethnicity, Religion and Social Change: Ethnic Movement and Nationalism in the West and the Third World.*** A seminar paper presented in the Six Monthly Discussion conducted by Sociological Student Association of Department of Sociology. University of Kentucky, Lexington, KY.: Fall Semester.
- 1990. ***Ethnicity and Sivial Change in Dayaknese Society of West Kalimantan.*** Ph.D. Dissertation in Department of Sociology, University of Kentucky, Lexington, KY.: May, 1990.
- 1991. ***Kehidupan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Madura di Kabupaten Pontianak.*** Hasil Peneliatian. Pontianak: Lembaga Penelitian UNTAN.
- 1993. ***Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial: Reorientasi Kebijakan Pembangunan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan.*** Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Sosiologi pada

FISIPOL, Universitas Tanjungpura, 18 September 1993. Pontianak: UNTAN.

----- 1994. "Dampak Perusahaan Pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan Perkebunan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat. " Dalam Paulus Florus, Stephanus Djuweng, dkk., ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi***. Jakarta: PT. Grasindo – Gramedia.

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1994b. "Mesianisme Dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat." Dalam Paulus Florus, Stephanus Djuweng, dkk. ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi***. Jakarta: PT. Grasindo – Gramedia.

----- 1999a. "Konflik Etnis (?) di Sambas" (hal. 34). Dalam ***Panji Masyarakat***. No. 51 Tahun II, 7 April.

----- 1999b. "Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis"(hal. 36-57) Dalam ***Jurnal Antropologi Indonesia***. Diterbitkan oleh jurusan Antropologi, Universitas Indonesia, Th. XXIII, No. 58. Januari – April.

----- 1999c. ***Pertikaian Antara Anggota Komunitas Madura Sambas dengan Anggota Komunitas Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat***. Hasil penelitian berdasarkan kerjasama MABES POLRI, UI DAN FISIPOL UNTAN. Jakarta: Direktorat Penerangan MABES POLRI.

- , dkk. 2000. ***Pertikaian antara Komunitas Madura Kalbar dengan Komunitas Dayak di Kawasan Pedalaman tahun 1996/1997, dan antara Komunitas Madura Sambas dengan Komunitas Melayu Sambas Tahun 1998/1999 di Kalimantan Barat.*** Hasil penelitian atas kerjasama YIIS, Jakarta, dengan FISIPOL, UNTAN, Jakarta: YIIS.
- , 2001a. ***Otonomi Daerah, Reformasi Kebijakan dan Pelestarian Hutan.*** Makalah disajikan kepada peserta lokakarya berjudul Desentralisasi Kebijakan dan Hutan di Indonesia diselenggarakan oleh Center for International Forest Research (CIFOR) di Ketapang, Kalbar, 29 Maret 2001.
- , 2001b. ***Are Cultural Pluralism Uniting, Stabilizing and Disruptive Factors? : The Function of Ethnic Identity and Consciousness, and The Indication of Disintegrative Process in West Kalimantan.*** A paper for the Workshop on Governance, Identity and Conflict: Assesing the Impact of Democratization, Decentralization and Regional Autonomy on Stability in Post-Soeharo Indonesia. Organized by the Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen, Denmark, August 31 – September 1, 2001.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2002a. ***Pemerintahan, Otonomi Daerah, Identifikasi Etnis, dan Konflik Horizontal di Kalimantan.*** Makalah disampaikan kepada para peserta Workshop yang di-

selenggarakan oleh PP. AIPI bekerjasama dengan PFGRI dan UNDIP di Semarang, 25 – 27 Maret.

- , 2002b. "Factors in Ethnic Conflict, Ethnic Identity and Consciousness, and the Indication of Disintegrative Process in West Kalimantan." (hal.: 125-156). Dalam Chaider Bamualim dan Karlina Helmanita. ***Communal Conflict in Contemporary Indonesia***. Jakarta: The Center for Languages and Cultures, IAIN Syarif Hidayatullah dan The Konrad Adenauer Foundation.
- Bamualim, Chaider, dan Karlina Helmanita. ***Communal Conflict in Contemporary Indonesia***. Jakarta: The Center for Languages and Cultures, IAIN Syarif Hidayatullah dan The Konrad Adenauer Foundation.
- Bappeda Kalbar dan Kantor Statistik Prop. Kalbar, 1990. ***Kalimantan Barat Dalam Angka***. Pontianak: Bappeda Kalbar.
- Barth, Fredrik. 1969. ***Ethnic Groups and Boundaries***. New York : Little Brown & Co. Narroll, R. 1964. "Ethnic Unit Classification". ***Current Anthropology***. Vol. V, No. 4.
- Bruinessen, Martin. 1992. "Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia : Latar Belakang Sosial Budaya." Dalam ***Ulumul Qur'an. III No. 1***.
- Camat Jawai, Kabupaten Sambas. Data dan Informasi mengenai Peristiwa Kriminalitas dan Premanisme di Daerah Kecamatan Jawai Sejak 1950. Tidak diterbitkan; Berupa Laporan Lepas. Jawai "Kantor Kecamatan Jawai, Kab. Sambas.

- Cole, Juan dan Nikkie Kiddie. 1986. ***Shi'ism and Social Protest***. New Haven : Yale University Press.
- Dofny, Jacques. 1985, "Ethnic Cleavages, Labor Aristocracy, and Nationalism in Quebec. Dalam Edward Tiryakian dan Ronald Rogowski. ***New Nationalism of the Developed West***. Boston: Allen and Unwin.
- Fakih, Mansour. 2000. ***Sesat Fikir Teori Pembangunan dan Globalisasi***. Jakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 2002. ***Runtuh Teori Pembangunan dan Globalisasi***. Jakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Florus, Paulus dan Stepanus Djuweng, dkk., ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi***. Jakarta: PT. Grasindo – Gramedia.
- Haris, Syamsudin. 2001. ***Otonomi Daerah, Demokratisasi dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat Daerah***. Makalah pada Work Nasional "Sentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal" diselenggarakan dalam rangka Kongres AIPI di Semarang, 25-27 Maret 2001.
- Hecter, Michael. 1985. "Internal Colonialism Revisited." Dalam Tiryakian, Edward, dan Ronald Rogowski. 1985. ***New Nationalism of the Developed West***. Boston: Allen & Unwin.
- Ibrahim, Sutini. 1996 "Senganan: Akulturasi Islam dengan Budaya Dayak di Kalimantan Barat" (203 – 212). Dalam ***Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara***. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Kapolres, Sambas. 1999. Kerusuhan Sosial Antar Kelompok Etnis Madura dengan Kelompok Etnis Dayak dan

- Melayu di Kabupaten Sambas : Data dan Informasi Tentang Kerusuhan Antar Etnis di Kalbar. Singkawang : Polres Sambas.
- Khleif, Bud. 1985. "Issues of Theory and Methodology in the Study of Ethnolinguistic Movements: The Case of Frisian Nationalism in the Netherlands." Dalam Tiryakian, Edward, dan Ronald Rogowski. 1985, ***New Nationalism of the Developed West***. Boston: Allen & Unwin.
- King, Victor. 1978. "Revitalization Movement in Kalimantan." Dalam ***Borneo Research Bulletin***. 4
- Lontaan, J.U. 1975. ***Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat***. Jakarta: Pemda Tingkat I Kalbar.
- Mahasin, Aswab. 1996. ***Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara***. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal.
- Mardjono, Hartono. 1998 ***Reformasi Politik Suatu Keharusan***. Jakarta: Gema Insani.
- Mubyarto. 1998 ***Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Rakyat***. Yogyakarta: Aditya Media.
- O'Sullivan See, K., 1980. ***First World Nations: Class and Ethnic Politics in Northern Island and Quebec***. Chicago: University of Chicago Press.
- Petebang, Edi. 2001. ***Amuk Sampit Palangkaraya***. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Petebang, Edi, dan Eri Sutrisno. 2000, ***Konflik Etnik Sambas***. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Smith, Anthony. 1981 ***Ethnic Revival***. New York: Cambridge University Press.
- Sumartana, Th., Elga Sarapung, Zuly Qadir. Dkk. (Penyt.) 2001. ***Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan***

- Sebuah Wacana Kebangsaan.*** Jakarta: Institut DIAN dan INTERFIDEL.
- Tim Peneliti CIFOR Kalbar, 2001. ***Desentralisasi Pembuatan Kebijakan dan Administrasi Kebijakan Dalam Mempengaruhi Sektor Kehutanan Pada Wilayah Luar Pulau Jawa: Hubungan Antara Otonomi Daerah dengan Kelestarian Hutan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.*** Hasil Penelitian berdasarkan Kerjasama CIFOR dengan Program Strata 2 IIS UNTAN, Jakarta: CIFOR.
- Tim Peneliti Program Strata 2 Ilmu-ilmu Sosial, UNTAN. 2001. ***Tinjauan Kebijakan Pemerintah Mengenai Hubungan Ekonomi, Perdagangan Lintas Batas Antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia Timur.*** Pontianak/ Jakarta: Hasil Penelitian melalui kerjasama Balitbang Masalah Luar Negeri, Deplu dengan Program S2 IIS, UNTAN.
- Tiryakian, Edward, dan Ronald Rogowski. 1985. ***New Nationalism of the Developed West.*** Boston: Allen & Unwin
- Weber, Max. 1958 ***Protestant Ethnics and the Spirit of Capitalism.*** Translated in English by Talcot Parsons. New York: Charles Scribner's Sons.
- Wiyata, Latief. 2002 ***Carok: Konflik, Kekerasan dan Harga Diri orang Madura.*** Yogyakarta: LKiS.
- Yusnowo, P. 1994 "Peranan Strategis Yang Semestinya Dimainkan oleh Dewan Adat." Dalam Florus, Paulus dan Stepanus Djuweng, dkk., ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi.*** Jakarta: PT. Grasindo – Gramedia.

